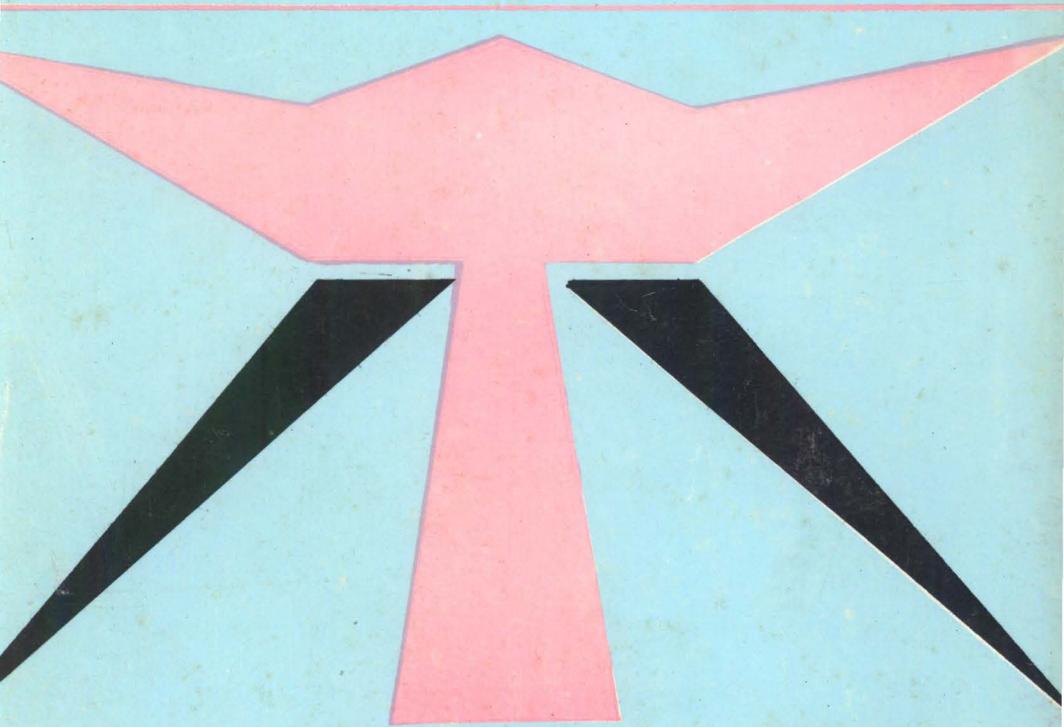


# Sejarah Sosial Daerah

Kotamadya Pontianak



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

# SEJARAH SOSIAL DAERAH KOTAMADYA PONTIANAK

Tim Penulis :

Syarif Ibrahim Alqadrie  
Pandil Sastrowardoyo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1984

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN . . .	iii
KATA PENGANTAR . . . . .	v
PRAKATA . . . . .	vii
DAFTAR ISI . . . . .	ix
<b>Bab PENDAHULUAN . . . . .</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Permasalahan . . . . .	1
2. Tinjauan Kepustakaan . . . . .	4
<b>Bab I Tata Lingkungan . . . . .</b>	<b>11</b>
1. Letak dan Batas . . . . .	11
2. Keadaan Tanah . . . . .	13
3. Cuaca . . . . .	15
4. Transportasi . . . . .	16
<b>Bab II Perkembangan Demografis . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>A Keadaan Penduduk . . . . .</b>	<b>18</b>
1. Pertumbuhan Penduduk . . . . .	18
2. Komposisi Etnis . . . . .	21
3. Mobilitas Geografis . . . . .	23

<b>B</b>	<b>Sistem Sosial</b> .....	27
	1. Pola Tempat Tinggal .....	27
	2. Sistem Pelapisan Sosial .....	30
	3. Diferensiasi Kerja .....	33
	4. Hubungan Sosial .....	35
<b>C</b>	<b>Organisasi Sosial</b> .....	38
	1. Organisasi Pendidikan .....	38
	2. Organisasi Pendidikan sosial 1945 .....	46
	3. Organisasi Sosial Keagamaan .....	47
	4. Organisasi Sosial Pada Masa Pendudukan Jepang .....	50
<b>D</b>	<b>Kehidupan Ekonomi</b> .....	51
	1. Mata Pencaharian .....	51
	2. Perdagangan .....	59
	3. Jaringan Pasar .....	66
<b>Bab III</b>	<b>Orang-orang Cina di Kalimantan Barat</b> .....	69
<b>Bab IV</b>	<b>Administrasi dan Pemerintahan</b> .....	78
	1. Perkembangan Daerah Administrasi .....	78
	2. Sistem Birokrasi .....	83
<b>Bab V</b>	<b>Peristiwa Mandor</b> .....	92
	1. Posisi Pulau Kalimantan .....	92
	2. Rasionalisasi .....	95
	3. Tindak Kekayaan .....	96
	4. Sikap Jepang Terhadap Suku Dayak .....	101
<b>Bab VI</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	103
	1. Masa Kesultanan Pontianak .....	103
	2. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda .....	106
	3. Masa Pemerintahan Balatentara Jepang .....	109
	4. Masa Kemerdekaan .....	111
<b>DAFTAR BACAAN</b>	.....	114

Penyunting :

1. Prof. DR. I. Ibrahim Alfian
2. Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan



**Prof. Dr. Haryati Soebadio**  
**NIP. 130119123**

## **KATA PENGANTAR**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan pesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial dimaksudkan ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu menjalani perubahan dan pertumbuhan. Karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut; seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di Propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, permulaan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juli 1984

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional

## **PRAKATA**

Laporan penelitian ini merupakan hasil penelitian tentang "Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak". Studi sejarah sosial daerah ini menitikberatkan studinya pada periode 1900 – 1950, dengan ketentuan bahwa periode-periode sebelumnya dan sesudahnya tetap diperhatikan.

Studi sejarah sosial ini dimaksudkan sebagai studi yang ingin menangkap secermat mungkin berbagai peristiwa sosial dan kaitan-kaitannya satu dengan lain dalam kerangka waktu tertentu dan pada lokalitas tertentu pula. Melalui sejarah sosial maka dinamika dari berbagai aspek kehidupan diteliti dan dengan ini pula kemungkinan hubungan kausal dari berbagai aspek diperhatikan. Jadi, dengan Sejarah Sosial Daerah Kotamadya Pontianak ini sebenarnya kita ingin memotretkan seluruh aspek kehidupan sosial masyarakatnya serta melihatnya dalam perjalanan waktu. Selain itu kita juga ingin melihat hubungan kausal aspek-aspek kehidupan sosial tersebut antara satu dengan lainnya di daerah ini. Obyek penelitian dan penulisan ini dapat dianggap sebagai proyek studi sejarah sosial perkotaan, khususnya Kotamadya Pontianak. Tetapi kota ini tidak hanya dilihat sebagai kota yang terlepas dari lingkungannya. Kotamadya Pontianak sebagai lokasi penelitian ini, terutama akan diperhati-

kan dalam hubungannya yang dinamis dengan perkembangan sosial ekonomis dari daerah sekitarnya.

Dengan selesainya hasil laporan ini diharapkan dapat menjangkau hal-hal baru yang selama ini belum terungkap mengenai segala sesuatu yang berkisar pada proses dan peristiwa sosial di Kotamadya Pontianak dalam kaitannya satu dengan lainnya secara dinamis, dan bahkan hanya sebagai peristiwa bersejarah yang pasif dan statis. Selain itu diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam usaha memanfaatkan potensi sejarah dan nilai tradisional yang dinamik bagi pembangunan nasional.

Berlangsungnya penelitian dan penulisan hasil penelitian ini dimungkinkan karena adanya DIP Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Tahun 1983/1984, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan telah selesainya laporan hasil penelitian ini, tidaklah berlebihan bila peneliti menyampaikan terima kasih kepada direktur jenderal kebudayaan, direktur sejarah dan nilai tradisional, pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN), rektor Universitas Tanjungpura, gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Barat, walikotamadya Pontianak, para camat di lingkungan Kotamadya Pontianak, para kepala kampung dalam lingkungan Kecamatan Pontianak Timur dan Pontianak Barat, para informan dan responden, serta kepada semua pihak yang telah membantu berlangsungnya penelitian ini. Semoga bantuan tersebut bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara ini.

Selanjutnya penulis sungguh-sungguh menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna; karena itu masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan di sana-sini. Sehubungan dengan itu segala saran, kritik, pendapat dan sumbangan

pemikiran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaannya.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, Maret 1984

Tim Penulis



## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang Permasalahan

Berbicara tentang sejarah sosial Kotamadya Pontianak tidak terlepas dari sejarah Kesultanan Pontianak, karena Kotamadya Pontianak lahir dan berkembang dari wilayah Kesultanan/Kerajaan Pontianak. Keduanya merupakan satu kesatuan yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Pada setiap tanggal 23 Oktober masyarakat memperingati hari jadi Kotamadya Pontianak sekaligus memperingati hari jadi Kesultanan Pontianak; tepatnya tanggal 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 H.<sup>1)</sup> Tanggal tersebut merupakan awal berdirinya suatu tempat pemukiman baru bagi kelompok pendatang Penembahan Mempawah,<sup>2)</sup> yang ingin menyebarkan agama Islam dan sekaligus ingin memulai kehidupan baru. Pemukiman baru itu dikenal dengan wilayah Kesultanan Pontianak yang terletak tepat pada persimpangan antara Sungai Kapuas Kecil dengan Sungai Landak. Kelompok pendatang ini dipimpin oleh Syarif Abdurakhman Alkadrie, putra Syarif Alhabab Alkadrie yang berasal dari Hadralmaut.<sup>3)</sup>

- 1) Sayyid Hamid Husein Alk, *Sejarah Athabib Husin*, belum diterbitkan, (disunting dari bahasa Arab), Pontianak, 1970, hal. 15.
- 2) Belanda menetapkan tingkat-tingkat atau status Kerajaan di Kalimantan Barat sesuai dengan kesultanan, penembahan yang dipertuan.
- 3) J.U. Lontan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pemda TK.I Kal-Bar/Offset Bumi Restu, Pontianak/Jakarta, Th. 1975, hal. 228 - 229.

Berdirinya pemukiman baru itu ditandai dengan berdirinya surau di tepi Sungai Kapuas Kecil tidak jauh dari muara Sungai Landak.<sup>4)</sup> Surau kecil itu sekarang menjadi Mesjid Jami Sultan sesudah beberapa kali mengalami peningkatan. Selanjutnya di sekitar mesjid itu memanjang ke tepi Sungai Kapuas Kecil, Sungai Landak yang mengarah ke dalam dan kemudian menjadi kampung-kampung yang sangat penting dalam mendukung perkembangan kesultanan itu. Di tengah-tengah pemukiman baru tersebut berdirilah sebuah kraton sebagai pusat pemerintahan.

Dalam waktu yang relatif cepat pemukiman tersebut berkembang secara pesat jauh mendahului pemukiman-pemukiman lainnya di daerah Kalimantan Barat baik yang berbentuk kesultanan, penembahan maupun yang dipertuan yang telah lebih dahulu berdiri. Perkembangan yang pesat ini sungguh mengherankan banyak pengamat sejarah, karena hanya dalam jangka waktu lebih kurang 30 tahun sejak berdirinya pemukiman baru dengan Kraton Pontianak sebagai pusat pemerintahan telah mengalami kemajuan pesat dan menjadi pemimpin (tokoh) kesultanan atau kerajaan lainnya di daerah Kalimantan Barat.<sup>5)</sup>

Faktor pesatnya perkembangan dan kemajuan pemukiman baru itu diperkirakan antara lain:

(1) Faktor geografis yang strategis; (2) Faktor interaksi sosial yang harmonis antara pendiri dan keluarganya dengan pengikut dan dengan penduduk setempat secara timbal balik; dan (3) Faktor kepemimpinan yang positif.<sup>6)</sup> Kemajuan pesat yang dialami Kesultanan Pontianak bukan saja dapat dilihat dari kepeloporan kesultanan ini terhadap kerajaan lainnya di Kalimantan Barat, tetapi juga berkembangnya penduduk yang melindungi pusat pemerintahan kesultanan, yang sekarang menjadi pusat pemerintahan Kotamadya Pontianak.

---

4) *Ibid*, hal. 23.

5) Hasil interviu dengan Letnan (Pur.) Syarif Maswar Alhinduan dan Syarif Hasan Alkadrie, Pontianak, 1983.

6) Syarif Ibrahim Alqadrie, *Kepemimpinan Kesultanan Pontianak, suatu tinjauan Historis Sosiologis*, belum diterbitkan, Pontianak, Th. 1977, hal. 12.

Adalah mengherankan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan sejarah politik, kesultanan yang dominan dan pernah berhasil menjadi pemimpin kesultanan lainnya dalam jangka waktu yang relatif pendek tetapi kurang berhasil menjadikan wilayah pemukimannya sebagai pusat kota (urban) sehingga dapat dijadikan pusat pemerintahan Kotamadya Pontianak. Perkembangan dan kemajuan selanjutnya ternyata lebih banyak mengarah ke seberang dari wilayah pusat pemerintahan, baik ke arah barat maupun ke selatan. Hal yang mengherankan lagi ialah bahwa perkembangan dan kemajuan itu pun terjadi di wilayah sebelah utara wilayah Kotamadya Pontianak sekarang yaitu di seberang wilayah kraton/kesultanan dipisahkan oleh Sungai Landak.<sup>7)</sup>

Tampaknya persaingan antara dua wilayah yang saling berhadapan yang dipisahkan oleh Sungai Kapuas Kecil yaitu antara wilayah yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak dengan wilayah baru yang kemudian menjadi wilayah pusat pemerintahan Belanda, dan pemukiman pendatang baru telah terjadi jauh sebelumnya. Ternyata wilayah Pontianak Selatan/Barat walaupun lebih muda umurnya lebih maju dan lebih berkembang. Sebaliknya wilayah Pontianak Timur yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak sampai dengan tahun 1944 semakin terisolasi. Dari kenyataan yang diketemukan di atas, timbul beberapa masalah yang akan dicoba untuk dijawab dalam tinjauan sosial historis, yaitu antara lain : "faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan perkembangan dan kemajuan wilayah-wilayah tersebut serta isolasi yang melanda wilayah sebelah timur yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak, terutama sangat dirasakan setelah tahun 1940."

---

7) Kotamadya Pontianak yang lahir dari Kesultanan Pontianak terbagi atas empat wilayah, yaitu timur, utara, barat dan selatan. Wilayah Timur adalah wilayah di mana Kraton/Kesultanan Pontianak berada.

## 2. Tinjauan Kepustakaan

Masalah negara adalah masalah yang ditimbulkan oleh manusia. Manusia ini bukan hanya raja, pangeran atau keluarganya atau tokoh masyarakat, tetapi juga bahkan lebih menyangkut rakyat atau anggota masyarakat. Dengan demikian orang tidak akan memperoleh gambaran yang jelas dan manfaat dari politik yang terjadi di masa lampau yang mendasari politik sekarang dan yang akan datang jika hanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat inventarisasi data ataupun yang bersifat insidental saja. Hal-hal di atas mengharuskan kita menguasai masalah secermat mungkin. Maka dengan ini inventarisasi yang pasif dan studi besar yang melihat lapisan atas dari realitas, terang tidak memadai.

Sehubungan dengan hal itu studi sejarah sosial diperlukan dalam usaha melihat perkembangan wilayah Kotamadya Pontianak sebagai kota dagang dengan masyarakatnya yang majemuk dan dengan latar belakang kesultanan yang mampu merebut pengaruh atas wilayah sekitarnya dalam waktu yang relatif pendek.

Berpindahnya secara berangsur-angsur pusat pemerintahan kolonial dan nasional yang semula terletak di wilayah kesultanan (di seberang kota/kota lama) ke wilayah yang menjadi pusat pemerintahan sekarang ini antara lain karena wilayahnya terisolasi, terbatasnya prasarana transportasi khususnya jalan darat, dan tidak adanya jalan yang menghubungkan wilayah timur dengan wilayah lainnya. Keadaan ini sukar diatasi karena pusat pemerintahan kesultanan ini dipisahkan oleh dua sungai, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak dengan tiga wilayah lainnya dari bagian Kotamadya Pontianak. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa jalan merupakan faktor penting yang tidak saja dapat menembus isolasi geografis, tetapi juga

merupakan syarat utama untuk membangun suatu daerah.<sup>8)</sup> Begitu pentingnya jalan, dalam hal ini A T Masher menyatakan bilamana orang dapat melakukan sesuatu di suatu daerah untuk mempercepat pembangunan, maka orang akan membuat jalan. Bilamana ada kesempatan kedua, orang juga akan membuat jalan, demikian pula apabila ada kesempatan ketiga jalan pula yang akan dibuat.<sup>9)</sup>

Ternyata jaringan jalan yang terdapat di ketiga wilayah lainnya khususnya di wilayah barat dan selatan jauh lebih banyak dibanding dengan wilayah timur. Pembenahan dan pembinaan ke dalam serta situasi politik yang rawan dalam menghadapi pemerintahan kolonial merupakan salah satu penyebab terluputnya masalah itu dari perhatian. Akibatnya wilayah tersebut tidak dapat lagi menampung perkembangan penduduk yang tidak dapat pula menyesuaikan perkembangan zaman. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana transportasi terhadap usaha penduduk dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya perkembangan yang kompleks terhadap aktivitas sosial sebagaimana dikemukakan di atas mendapat penampungan di wilayah lain, khususnya kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi lebih berkembang. Akibatnya wilayah timur menjadi lebih terisolasi lagi.<sup>10)</sup> Dengan demikian dapatlah diketahui bagaimana pun megahnya suatu kota atau wilayah kesultanan yang pernah ada akan menjadi kota mati bilamana isolasi geografi tidak segera diatasi dengan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi transportasi serta pembangunan pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi.

- 
- 8) A.T. Masher, "Getting Agreeculture Moing", di dalam buku Mubiyarto, *Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Daerah dan Pembangunan Pertanian*, himpunan kertas kerja, 1965 - 1969, Biro Penelitian Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1969, hal. 95.
- 9) I b i d, "Getting Agreeculture Moving" di dalam buku S. Kresnadi *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, CV. Jasa Guna, Jakarta, 1965 hal. 29.
- 10) Syarif Ibrahim Alqadrie, "Sejarah Kerjaan Pontianak dan Perkembangan Kotanya (Bahan Seminar hasil Penelitian)" di dalam kumpulan makalah dihimpun oleh DP3M, *Seminar Hasil Penelitian, PT. Bagi Penelitti Muda*, Departemen P dan K Ditjen Pen. Tinggi, Jakarta, 1982, hal. 433.

Menyadari kondisi geografi wilayah ini, terutama dalam menghadapi perkembangan penduduk dan volume perdagangan yang selalu meningkat dan kompleksitasnya masalah yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman, diperlukan administrasi dan teknologi yang selalu berubah dan meningkat. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kolonial Belanda di bawah Gubernur J. Obermon dan Sekretaris J. Dzienga dan pemerintahan Kesultanan Pontianak yang pada masa itu diperintah oleh Sultan Syarif Muhammad Alkadrie (1895 – 1944)<sup>11)</sup> setuju untuk mengalihkan kegiatan ekonomi, pemerintahan dan sosial ke wilayah barat dan selatan Kotamadya Pontianak.

Tampaknya Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai kepentingan terhadap pemindahan kesultanan ke wilayah barat dan selatan. Hal tersebut antara lain karena telah disadari adanya politik yang mengucilkan dan memperlemah pengaruh kesultanan dan usaha menguasai kegiatan-kegiatan ekonomi perdagangan, sosial dan kontrol terhadap aktivitas kekuasaan kesultanan. Dengan demikian berkembanglah wilayah ini menjadi wilayah ekonomi dan perdagangan yang sangat penting di kawasan Kalimantan Barat (*West Borneo*), bahkan sejajar pula dengan kota-kota pesisir lainnya di Kalimantan.<sup>12)</sup> Dari segi ini Belanda dapat memanfaatkan peningkatan pemasukan pajak, bia cukai dan pungutan lain serta monopoli dalam perdagangan sejenis barang-barang tertentu, pengawasan terhadap pendidikan, dan perkumpulan sosial ekonomi.

Sebenarnya tidak banyak apa yang dilakukan oleh Belanda dalam memajukan dan mengembangkan daerah ini menjadi daerah yang sangat strategis dalam bidang militer atau perang (Hankam) dan sektor perdagangan.<sup>13)</sup>

- 
- 11) Syarif Ibrahim Alqadrie dan Tangdililing, *Sejarah Kerajaan Pontianak dan Perkembangan Kotanya*, Hasil Penelitian, DP3M Ditjen Pend. Tinggi Departemen P dan K, Jakarta/Untan Pontianak, 1980, hal. 49.
  - 12) Letkol Noerdin Dja'in, *Petunjuk Teritorial Daerah Kalimantan Barat*, Sudam, Kodam XII Tanjungpura, 1972, hal. 257 - 259.
  - 13) J.U. Lontan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pemda TK.I Kal-Bar dan Bumi Restu, Jakarta, 1975, hal. 233.

Penetapan dan pemilihan wilayah ini sebagai tempat pemukiman yang kemudian berkembang menjadi pusat pemerintahan daerah Kalimantan Barat dinilai sebagai perwujudan dari rasionalitas yang tinggi dan pertimbangan yang tepat dari pendirinya secara ekonomis dan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri kerajaan ini berorientasi pada maritim dan agraris.<sup>14)</sup> Demikianlah pada kenyataannya sebelum mendirikan Kota Pontianak, Abdurakhman memang sudah terkenal sebagai seorang yang berjiwa maritim dan ahli strategis.<sup>15)</sup>

Hasil pemikiran dan keputusan yang brilian itu menghasilkan suatu kota sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan yang sekarang menjadi ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Dalam waktu yang sangat singkat kota ini juga merupakan pusat imigrasi suku-suku bangsa Indonesia dan luar Indonesia dan juga merupakan pusat kebudayaan sebagai hasil proses akulturasi dengan unsur-unsur kebudayaan Melayu, Jawa, Bugis, Sunda, Banjar dan lain-lain yang kemudian berintegrasi pula dengan kebudayaan asli di daerah ini.<sup>16)</sup> Selain itu kesultanan dan kota yang terakhir muncul di Kalimantan Barat ini mendapatkan kehormatan untuk menerima dan memegang supremasi serta hegemoni dalam segala bidang atas kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat.<sup>17)</sup> Beberapa contoh dominasi tersebut ialah ketaatan dari kerajaan-kerajaan lain di daerah ini untuk mengirim utusan pribadi mengadakan perdagangan, mengirim upeti, meminta nasihat, dan meminta guru agama Islam kepada Kesultanan Pontianak; bahkan pada masa perlawanan terhadap Jepang, Pontianak dijadikan sebagai markas mereka. Sultan Pontianak memanggil semua penguasa kerajaan yang ada di Kalimantan Barat termasuk tokoh masyarakat lainnya untuk turut melawan Jepang.<sup>18)</sup> Penguasa-penguasa

15) J.U. Lontan, Op Cit. hal. 232.

16) *Ibid*, hal. 233.

17) Noerdin Dja'in, Op Cit. hal. 257.

18) M. Yanis, *Kapal Terbang Sembilan*, Yayasan Panca Bhakti, Pontianak, 1983, hal. 176.

kerajaan di Kalimantan Barat hanya mau mendengar kata-kata sultan Pontianak.

Supremasi serta hegemoni itu terasa pula di kalangan penduduk yang berada di wilayah yang dikuasai Belanda dan Jepang. Dari dokumen yang diterima pihak tentara Jepang yang berisi deretan orang-orang menentang Jepang, ternyata sejumlah besar  $\pm 75\%$  (35 dari 46 orang) berasal dari rakyat biasa atau pemuka masyarakat dari segala suku/golongan penduduk yang dengan sukarela bersatu dalam gerakan yang dipimpin oleh pihak Kesultanan Pontianak dalam menentang kekuasaan Jepang.<sup>19)</sup> Pada saat itu berhasil dibentuk pasukan penyerbu bersenjata dari rakyat pedalaman.<sup>20)</sup> Memang benar kerelaan mereka untuk berjuang melawan penjajahan bukan semata-mata karena kewibawaan sultan dan dengan supremasi kesultanan, tetapi karena didorong pula oleh penderitaan, kesengsaraan, dan keinginan mereka untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Pendekatan dan sikap yang luwes dari sementara keluarga Kesultanan Pontianak seperti Sultan Syarif Abdurakhman, Pangeran Adipati, Pangeran Agung, Pangeran Bendahara I, Pangeran Patitua dan lain-lain ternyata telah menciptakan partisipasi masyarakat yang sehat dan dinamis. Partisipasi seperti inilah yang dapat menghasilkan integrasi nasional dalam dimensi vertikal. Dalam hubungan ini hampir tidak ada jurang pemisah antara elit penguasa dengan rakyat.<sup>21)</sup>

Dari daftar panjang nama-nama yang melawan Jepang yang terdapat dalam dokumen tersebut, juga dari 10.000 lebih korban keganasan Jepang di Kalimantan Barat,<sup>22)</sup> dapat diketahui dimensi horizontal dan integrasi nasional yang positif dan harmonis antara sesama suku bangsa, sebagai perwujudan dari

---

19) *I b i d*, hal. 175 dan 176.

20) *I b i d*, hal. 179.

21) Alfin, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978, hal. 200.

22) Pembunuhan massal terhadap rakyat dan pemimpin mereka diperkirakan terjadi tanggal 26-6-1944. Lihat buku M. Yanis, *Op Cit*, hal. 182.

komunikasi yang harmonis antara mereka.<sup>23)</sup> Kalau penggerak rakyat menentang penjajahan di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya bersifat nasional tanpa memandang suku bangsa, maka di Pontianak pun menunjukkan hal yang serupa. Mereka yang menentang penjajahan terutama sekitar tahun 1942 sampai dengan 1945 dengan yang gugur sebagai korban Jepang terdiri atas seluruh suku dan golongan penduduk, yaitu keluarga kerajaan sebagai golongan penduduk Indonesia keturunan Melayu Arab, Melayu, Minangkabau, Batak/Tapanuli, Maluku, Cina, Bugis, Banjar, Jawa, Sunda, dan lain-lain.<sup>24)</sup>

Kebutuhan akan persatuan melawan penjajahan bukan satu-satunya motivasi bersatu, tetapi juga telah lama masyarakat Pontianak menyadari itu. Kadar potensi perdagangan dan potensi geografis menjadikan penduduk daerah ini bersifat multi etnik. Ketika mereka kehilangan satu generasi pemimpin yang termasuk di dalam jumlah 10.000 korban keganasan Jepang, sejak saat itu mereka seolah-olah hidup dan berjuang sendiri. Keadaan ini membentuk budaya politik baru yang tidak selalu bergantung pada pemimpin. Dalam keadaan demikian, tidak aneh bila mereka tidak berorientasi ke atas. Inilah yang dianggap oleh sementara orang sebagai sikap yang tidak "disiplin" dan merusak "disiplin nasional". Sejak saat itu sejarah mengenai Kalimantan Barat, khususnya Pontianak tidak hanya melihat lapisan atas dari realitas sosial khususnya lapisan atas yang timbul dari kalangan mereka sendiri, tetapi lebih menampilkan dari mereka sebagai pribadi yang pernah merasa terasing, dirasakan putusnya rantai dengan pusat tanpa saluran komunikasi dua arah dan intim serta tidak terasa asing di dalam lingkungan mereka.

---

23) Dokumen yang jatuh ke tangan Jepang, di dalam buku M. Yanis, *Ibid*, hal. 173 sampai 181.

24) *Ibid*, hal. 183.

25) Mengenai Kisah Kependudukan Jepang dan Kalimantan Barat, baca buku M. Yanis, *Kapal Terbang Sembilan*, Yayasan Pengurus Panca Bhakti, Penyalur tunggal PT. Gunung Agung, Pontianak - Jakarta, 1982, terutama dari hal. 71 s/d 228.

Zaman keemasan yang pernah dicapai daerah ini lewat masuknya misi damai Abdurakhman dengan tugas agama, budaya dan kemanusiaan menjadikan Pontianak sebagai pusat perdagangan di daerah Kalimantan Barat. Kemudian diubah oleh Belanda dengan segala macam perjanjian dan ketentuan pajak (*belasting*) yang menekan rakyat, ditambah lagi dengan masuknya tentara Jepang yang menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat sehingga rakyat dihadapkan pada tiga pilihan yaitu kelaparan, telanjang tanpa pakaian atau mati. Terakhir adalah terjadinya kevakuman yang hebat dalam segi pemerintahan yang dialami daerah ini sebagai transisi yang terlalu lama antara masa penyerahan Jepang tanggal 15 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.20/6/10 tanggal 8 September 1951<sup>26</sup>), sehingga roda pemerintahan Pontianak dan sekitarnya baru dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Empat periodisasi berdasarkan kekuasaan intern yang dialami daerah ini sebagaimana dikemukakan di atas menghasilkan pula kehidupan sosial, politik, budaya, dan ekonomi/perdagangan yang unik dan berbeda-beda satu sama lainnya. Pola sejarah itu memberikan pemasukan yang bervariasi dan khusus bagi sejarah sosial di daerah ini.

---

26) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 20/6/10 tanggal 8-9-1951, berisi pencabutan semua ketentuan tentang pembagian administratif daerah Kalimantan Barat yang dahulu dikenal dengan nama "Residentis Nesterrafdeling van Borneo" (STB, 1938 No. 332) dan membagi daerah Kalimantan Barat ke dalam enam daerah Kabupaten Administratif yakni, Sambas, Pontianak, Sanggau, Kapuas Hulu, Ketapang dan sebuah kota Administratif Pontianak (Kodya Pontianak).

## **BAB I**

### **TATA LINGKUNGAN**

#### **1. Letak dan batas**

Kota Pontianak didirikan pada tahun 1771 di simpang tiga sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dengan cabangnya Sungai Landak. Dari persimpangan ini terdapat tiga buah nama sungai yaitu Sungai Landak yang mengalir dari arah timur laut, Sungai Kapuas Kecil yang mengalir dari arah timur dan Sungai Kapuas Besar yang merupakan pertemuan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil. Sungai Kapuas Besar mengalir ke arah barat menuju laut lepas.

Kota Pontianak disebut sebagai pintu gerbang daerah Kalimantan Barat karena letaknya sangat strategis dilihat dari lalu lintas laut. Pantai Kalimantan Barat terletak di jalur lalu lintas laut internasional yang menghubungkan Nusantara dengan wilayah Asia melalui Selat Malaka. Dengan demikian sejak dulu daerah ini sering menjadi persinggahan kapal-kapal besar.

Letak Kota Pontianak agak menjorok ke daratan dari pantai. Disebut demikian oleh pendirinya mungkin demi kepentingan keamanannya. Kapal-kapal yang akan menyinggahi Pelabuhan Pontianak itu dengan demikian akan terawasi secara sempurna oleh pihak penguasa. Sungai Kapuas Besar nampak-

nya berfungsi sebagai filter/penyaring bagi bahaya yang mungkin dapat ditimbulkan oleh kapal yang datang itu. Istana Kadariah itu nampaknya terkandung suatu maksud sebagai spionase untuk mengawasi secara langsung kapal yang datang.

Pada masa itu bahaya memang selalu mengancam terutama dari para bajak laut yang ganas. Karena itu keamanan harus dijaga benar-benar. Pendiri kota ini seorang pelaut yang mahir dan pemberani sehingga pusat taktiknya diletakkan pada strategis maritim. Laut pada masa itu merupakan satu-satunya jalur lalu lintas internasional dan Sungai Kapuas mempunyai kedalaman yang memungkinkan untuk dilayari kapal-kapal besar, sehingga strategi maritim merupakan pertimbangan yang tepat.

Persimpangan dari Sungai Landak dan Sungai Kapuas membagi Kota Pontianak menjadi tiga bagian, yaitu bagian barat/selatan, bagian timur dan bagian utara. Bagian barat/selatan ini dibatasi oleh Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar dari dua bagian daerah lainnya. Bagian timur dibatasi oleh Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak, dan bagian utara dibatasi oleh Sungai Landak dan Sungai Kapuas Besar.

Suatu keistimewaan dari kota ini ialah karena letaknya berada di bawah garis katulistiwa, yaitu garis fantasi yang membelah bumi menjadi dua bagian yaitu belahan utara dan belahan selatan. Karena itu Pontianak juga digelari sebagai kota katulistiwa.

Kota ini sekarang menjadi sebuah kotamadya yang menjadi pusat pemerintahan ibu kota Propinsi Kalimantan Barat. Seluruh wilayah berada dalam daerah Kabupaten Pontianak. Dengan demikian maka seluruh wilayah kota ini berbatasan dengan daerah-daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pontianak, sehingga dapat digambarkan bahwa wilayah Kotamadya Pontianak seperti sebuah taman dari suatu kebun yang luas. Taman itu ialah Kotamadya Pontianak dan kebun yang luas itu ialah Kabupaten Pontianak.

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap perlu dikemukakan batas-batas dari keempat sisi Kotamadya Pontianak, yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Siantar;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kapak.

Semua kecamatan yang ada di luar batas Kotamadya Pontianak itu termasuk dalam wilayah Kabupaten Pontianak (Mempawah).

## 2. Keadaan Tanah

Bagian barat dan selatan kota ini terletak pada sebuah pulau yang dikenal dengan delta Sungai Kapuas. Pulau ini merupakan dataran rendah yang terjadi dari sedimentasi lumpur-lumpur yang dibawa hanyut oleh arus Sungai Kapuas dan Sungai Landak dari daerah hulu. Pada waktu dibuka, daerah ini juga merupakan hutan lebat dengan pohon-pohon kayu yang besar. Tunggul-tunggul dari bekas tebangan kayu itu sampai sekarang masih kita dapati di sana sini dan harus dibersihkan lebih dahulu bila di atasnya akan didirikan bangunan perumahan.

Sebagai tanah sedimentasi yang menghutan dan kemudian dijadikan perkotaan, kondisi tanah cukup labil. Permukaan tanahnya merupakan endapan bekas hutan yang dikenal dengan istilah tanah "sepu" dan di bagian bawah merupakan lapisan lumpur dengan "daya gandar" relatif rendah. Dari beberapa penggalian diketahui bawah lapisan lumpur ini berupa pasir dengan peninggalan bekas-bekas kehidupan laut. Permukaan tanahnya berada beberapa meter di atas permukaan laut sehingga pengaruh pasang surut sangat besar. Pada musim pasang perbani (bulan Desember dan Januari) sebagian daerah kota

tergenang air sehingga lalu lintas terhambat karenanya. Di lain pihak pada musim panas panjang (lebih dari 2 bulan), daerah kota ini kekurangan air bersih untuk keperluan rumah tangga. Pada musim panas seperti ini kadar garam air Sungai Kapuas meningkat dapat mencapai ketinggian 4000 meter sehingga air sungai tidak mungkin dipergunakan untuk keperluan rumah tangga sekalipun hanya untuk keperluan cuci-mencuci. Produksi air minum belum mencukupi keperluan penduduk, sehingga tidak jarang terjadi krisis yang membahayakan keselamatan penduduk terutama menjalarnya penyakit perut dan penyakit muntah-berak secara wabah.

Karena kondisi tanah itu maka untuk keperluan pembangunan Kota Pontianak sekarang ini memerlukan "tanah urug" yang didatangkan dari daerah Kabupaten Pontianak. Di daerah kabupaten ini terdapat pegunungan-pegunungan yang terdiri atas jenis tanah yang dikenal dengan istilah tanah merah dan berbatu-batu. Tanah merah ini diangkut ke Kota Pontianak untuk urug lokasi yang akan dibangun. Tidak jarang bahwa lokasi tempat bangunan itu justru digali lebih dahulu. Ke dalam lubang bekas galian itu diurug dengan tanah merah yang mempunyai "daya gandar" lebih tinggi.

Bagian timur dan bagian utara kota tidak jauh perbedaan sifat permukaan tanahnya dengan bagian barat/selatan. Bagian ini juga merupakan dataran rendah bahkan berawa-rawa, tetapi bukan sedimentasi. Tugu katulistiwa yang merupakan ciri khas daerah ini terdapat di bagian utara. Bagian wilayah ini merupakan daratan Pulau Kalimantan yang sebenarnya, sedangkan bagian barat/selatan merupakan delta Sungai Kapuas yang terpisah dari daratan Kalimantan Barat. Tinggi permukaan tanah hanya beberapa meter dari permukaan laut. Jalan dan gang di daerah ini banyak berupa jembatan kayu yang dikenal penduduk dengan istilah "gertak" terbuat dari kayu besi (kayu belian) yang mempunyai ketahanan tinggi terhadap rendaman dan genangan.

### 3. Cuaca

Sebagai daerah katulistiwa, suhu udara tinggi sepanjang tahun. Suhu tertinggi rata-rata  $21^{\circ}$  Celcius. Lembab nisbi rata-rata  $85^{\circ}$ , dengan curah hujan rata-rata 3.200 mm. Curah hujan tertinggi 4000 mm dan curah hujan terendah 2.500 mm. Boleh dikatakan tidak ada bulan dalam setiap tahun yang tidak mengandung hari hujan. Daerah Kotamadya Pontianak tidak mengenal perbedaan musim kemarau dan musim penghujan secara tegas.

Air hujan diperlukan oleh penduduk untuk keperluan makan dan minum. Dari cucuran atap air ini ditampung dalam tempayan atau drum bekas. Setiap rumah pasti memiliki alat penampung air ini. Karena pentingnya air hujan bagi rumah tangga, maka curah hujan yang cukup banyak ini menguntungkan penduduk. Yang paling sesuai ialah jika curah hujan itu selalu ada dalam setiap minggu.

Kemampuan daya tampung terhadap air hujan ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap ketentraman rumah tangga. Warga kota yang kaya mampu menampung air hujan dalam jumlah yang melebihi kebutuhan sendiri. Sisanya dapat juga dibagi-bagikan kepada warga masyarakat lain yang memerlukan. Sifat beri-memberi dalam hal memenuhi kebutuhan air hujan turut mewarnai sifat kegotongroyongan masyarakat.

Untuk keperluan mandi, cuci-mencuci dan lain-lain, penduduk Kota Pontianak mempergunakan air sungai. Orang mandi dan mencuci di sungai. Air sungai ini diangkut ke rumah-rumah untuk berbagai keperluan. Di lain pihak orang membuat jamban (*WC*) di atas sungai-sungai ini. Dengan demikian sungai di Kota Pontianak ini berfungsi ganda, yaitu sebagai sumber air untuk cuci-mencuci, tetapi juga sebagai tempat pembuangan kotoran. Fungsi lain dari sungai ialah sebagai prasarana lalu-lintas yang menghubungkan berbagai tempat dengan menggunakan alat angkut sampan dan motor.

Begitu pentingnya arti sungai bagi penghidupan penduduk, maka perkampungan Kota Pontianak dimulai dari bentuk perkampungan memanjang (*ribbon*) mengikuti alur sungai. Nama-nama kampung di kota itu juga banyak berorientasi dengan nama sungai seperti Kampung Sungai Jawi, Kampung Sungai Bangkong, Siantan Hulu, Siantan Hilir, Tanjung Hulu, Parit Tokaya, dan sebagainya. Nama-nama cabang sungai terkenal di kota itu antara lain: Sungai (Sei) Jawi, Sungai Selamat, Parit Besar, Parit Tokaya, Parit Bansir, Parit Haji Husin dan sebagainya. Sepanjang tepian kiri dan kanan sungai dan parit itu merupakan perkampungan penduduk. Penduduk yang tidak tinggal di tepi sungai dikatakan tinggal di darat dan selalu merisaukan kekurangan air.

#### 4. Transportasi

Sampai tahun 1950-an transportasi sungai masih meruakan satu-satunya prasarana transportasi dalam melakukan pemindahan orang dan barang. Di sepanjang Sungai Kapuas dan Sungai Landak dipergunakan kapal-kapal motor yang mengangkut orang dan barang-barang dari dan ke daerah hulu sungai. Kapal-kapal motor ini berkeliaran sepanjang siang dan malam hari dengan pangkalannya di bagian selatan kota.

Sampan-sampan tambang yang menyeberangkan orang-orang antara ketiga bagian kota jumlahnya cukup banyak. Sampan-sampan tambang ini merupakan pekerjaan pokok juga bagi sebagian penduduk Kota Pontianak sampai sekarang. Lebih menarik untuk lokasi pemukiman pada waktu itu ialah di sepanjang Parit Besar, karena fasilitas air dan transportasi yang mudah.

Jalan darat memerlukan banyak jembatan akibat banyaknya parit-parit yang harus dipotongnya. Fasilitas untuk pembuatan jembatan juga masih sangat terbatas sehingga perkembangan jalan darat ini tidak begitu lancar. Material untuk pengerasan jalan seperti batu, pasir dan krikil harus didatangkan jauh dari luar kota. Di lain pihak alat transportasi untuk

mengangkut material tersebut masih sangat sedikit di samping jalan yang dilalui juga masih dalam kondisi yang jelek.

Jalan darat yang boleh dikatakan baik sampai tahun 1950 itu ialah: Jalan Katulistiwa, Jalan Rahadi Usman, Jalan Garuda, Jalan Matahari, Jalan Pak Kasih dan Jalan Katulistiwa yang lain yang sudah dirintis, seperti Jalan Merdeka, Jalan Jeruju, Jalan Penjara, Jalan Asahan, Jalan Garuda dan Jalan Jawa. Perkembangan jalan darat seperti Jalan Penjara, Jalan Hasanudin, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Jeruju dan lain-lain terjadi sesudah tahun 1938. Pada tahun itu Pemerintah Belanda memberi subsidi kepada para petani karet untuk memperbesar produksinya. Dari uang subsidi (*kopon*) itu penduduk mempunyai kelebihan hasil dan keperluan prasarana transportasi meningkat. Sebelumnya jalan-jalan itu berupa jalan setapak yang diperkeras dengan sabut dan tempurung.

## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN DEMOGRAFIS**

#### **A. KEADAAN PENDUDUK**

##### **1. Pertumbuhan Penduduk**

Salah satu ciri kependudukan Kota Pontianak ialah heterogenitas etnisnya. Kota pelabuhan ini sejak awal berdirinya telah menarik suku bangsa-suku bangsa bahkan bangsa-bangsa lain di luar daerah Kalimantan Barat. Ada tiga fungsi utama yang menjadikan Kota Pontianak menarik migrasi. Ketiga fungsi itu ialah: Pontianak sebagai pusat pemerintahan di Kalimantan Barat, Pontianak sebagai kota dagang dan Pontianak sebagai pelabuhan.<sup>1)</sup>

Pada akhir abad ke-19 kerajaan besar di daerah Kalimantan Barat seperti Kerajaan Sambas, Kerajaan Sukadana, Kerajaan Kubu, Kerajaan Sintang dan lain-lain mengalami kemunduran akibat peperangan. Kemunduran kerajaan-kerajaan itu sangat menguntungkan bagi perkembangan Kota Pontianak. Mundurnya Kota Pelabuhan Sukadana telah mengalihkan pusat perdagangan ke Pontianak. Pontianak berkembang menjadi

---

1) Sumber: Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pontianak, 200 Tahun Kotamadya Pontianak, Pontianak, 1971, hal. 17.

pelabuhan terbesar dan sekaligus sebagai kota perdagangan terbesar di Kalimantan Barat.

Kapal-kapal Nusantara dan kapal-kapal asing datang mengunjungi pelabuhan pembawa barang-barang dagangan untuk dipasarkan di daerah Kalimantan Barat. Kembalinya kapal-kapal itu mengangkut barang-barang hasil bumi Kalimantan Barat untuk dipasarkan secara interen atau secara internasional. Tidak sedikit pada pendatang yang kemudian tertarik dan bertempat tinggal di Pontianak. Mereka mendirikan perkampungan setelah mendapat izin sultan. Nama-nama kampung baru itu berorientasi pada daerah atau nama negara dari nama pendiri kampung itu berasal. Kita kenal sekarang nama-nama kampung seperti Kampung Jawa Tengah, Kampung Banjar, Kampung Bugis, Kampung Bangka-Belitung, Kampung Kuantan, Kampung Kamboja, Kampung Saigon, Kampung Arab dan sebagainya.

Dari nama-nama kampung itu dapat diketahui bahwa besarnya pertumbuhan penduduk Pontianak adalah karena terjadinya migrasi. Para pendatang yang menetap di Pontianak secara berangsur-angsur menarik saudara-saudaranya atau teman-temannya yang ada di daerah asal untuk ikut pindah ke tempat pemukimannya yang baru. Kepadatan penduduk di Jawa terutama Jawa Tengah bagian barat seperti daerah Kebumen misalnya, mempunyai pengaruh yang cukup berarti bagi perkembangan penduduk Pontianak. Penduduk asal Kebumen ini umumnya mengumpul dan membangun perkampungan di bagian barat daya Kota Pontianak. Jalan dari arah kota menuju lokasi pemukiman migrasi asal Kebumen ini diberi nama jalan Jawa dan perkampungan mereka ini dikenal dengan Kampung Sumur Bur. Nama perkampungan ini tidak menunjukkan ciri kejawaan tetapi karena pada zaman Belanda dahulu di lokasi pemukiman itu dibuat sumur pompa (sumur bur). Tidak jauh dari Jalan Jawa ada jalan kecil yang diberi nama Jalan Podomoro. Nama ini menunjukkan bahwa pembuka perkampungan di sekitar jalan itu adalah para migran yang satu-persatu datang

dari Pulau Jawa. Migran dari Pulau Jawa rata-rata berorientasi mata pencaharian sebagai petani. Para migran yang mata pencahariannya berorientasi di bidang perdagangan rata-rata memilih pemukiman di sekitar Sungai Kapuas. Di sepanjang Sungai Kapuas Kecil terdapat Kampung Bugis, Kampung Arab, Kampung Saigon, Kampung Kamboja, Kampung Bangka-Belitung, di samping Kampung Melayu yang sekarang telah berkembang menjadi Kampung Cina. Kampung-kampung tersebut namanya berorientasi pada nama-nama daerah di luar Kalimantan Barat, yang menunjukkan daerah asal orang-orang yang dikenal sebagai pendiri kampung-kampung tersebut. Di kampung itu rata-rata berdomisili para migran yang berasal dari daerah sesuai dengan nama kampungnya.

Suku bangsa perantau dari daerah Sumatera Barat meskipun tidak mendirikan perkampungan sendiri, tetapi jumlahnya cukup berarti dalam perkembangan penduduk Kota Pontianak. Domisili penduduk asal Sumatera Barat tersebar di kampung-kampung yang tidak jauh dari pusat pasar. Profesi sebagai pedagang tidak dapat dipisahkan dari lokasi pemasaran. Umumnya pedagang-pedagang asal Sumatera Barat ini memperdagangkan bahan makanan dan minuman baik dalam ujud mentah maupun makanan atau minuman jadi. Kedai nasi, warung kopi, warung bahan mentah adalah dagangan utamanya dan jarang yang membuka toko kelontong atau toko lain. Demikianlah kota yang didirikan pada tahun 1771 ini berkembang menjadi kota yang berpenduduk berasal dari seluruh wilayah Indonesia.<sup>2)</sup>

Dari lingkungan Kalimantan Barat sendiri, pada awal abad ke-20 telah terjadi urbanisasi dari daerah sekitarnya. Pontianak sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan merupakan pusat federasi daerah-daerah swapraja dan neo-swapraja di seluruh Kalimantan Barat. Dengan demikian kota itu menarik penduduk daerah perhuluan untuk melakukan

---

2) Pemda Kotamadya Pontianak, Op Cit, hal. 23.

urbanisasi. Kaum urbanis ini terdiri atas suku bangsa Melayu dan orang-orang Cina yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai dan pelajar. Perkembangan penduduk Kota Pontianak dari tahun 1900 sampai 1950 dapat digambarkan sebagai berikut: tahun 1900 sebanyak 13.136 orang; tahun 1910 sebanyak 19.438; tahun 1920 sebanyak 29.730; tahun 1930 sebanyak 45.482; tahun 1940 sebanyak 60.500; dan tahun 1950 sebanyak 75.000.<sup>3)</sup>

## 2. Komposisi Etnis

Agak menarik perhatian kiranya, mengapa dari kalangan suku bangsa Daya yang merupakan penduduk asli daerah itu justru kurang tertarik untuk berurbanisasi ke Kota Pontianak, pada hal suku bangsa lain dari luar Kalimantan Barat secara terus-menerus bermigrasi ke kota itu. Jumlah penduduk suku bangsa Daya yang berdomisili di Kota Pontianak relatif kecil dibandingkan dengan suku bangsa lainnya yang berdomisili di kota itu. Hal ini disebabkan oleh karena suku bangsa Daya selalu mengikuti suatu filsafat bagi kehidupannya. Menurut pandangan suku bangsa itu bahwa hakikat hidupnya adalah sebagai petani padi. Pekerjaan sebagai petani dipandang paling mulia, karena padi merupakan rahmat bagi kehidupan mereka. Untuk menjadi petani tentu saja tidak tinggal di kota karena di kota tidak tersedia lahan pertanian yang cukup, apalagi jika harus menganut sistem peladangan berpindah. Kehidupan suku bangsa Daya tidak berorientasi pada dunia perdagangan.

Suku bangsa-suku bangsa yang mendiami Kota Pontianak pada pertengahan pertama abad ke-20 adalah suku bangsa Melayu, Banjar, Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Batak, Daya dan lain-lain.<sup>4)</sup> Dari suku-suku bangsa tersebut yang jumlahnya tergolong besar ialah suku-suku Melayu, Banjar,

---

3) Sumber: Kantor Statistik Kotamadya Pontianak.

4) Disarikan dari daftar isian dalam penelitian terhadap responden yang dihubungi.

Bugis dan Jawa. Suku bangsa Melayu tergolong sebagai penduduk asli daerah Kalimantan Barat di samping suku bangsa Daya. Urbanis Melayu yang mendiami kota itu lebih banyak berasal dari daerah utara, yaitu Mempawah dan Sambas.

Di samping suku-suku bangsa tersebut masih terdapat bangsa-bangsa asing (keturunan bangsa asing) yang tinggal menetap di kota itu. Di antaranya ialah orang-orang Tionghoa (Cina) yang terdiri atas Tionghoa Taiwan (Bintang 12) dan Tionghoa RRC (Bintang 5), kemudian bangsa Arab, India, Pakistan dan Belanda. Istilah "Bintang 12" dan "Bintang 5" dapat dilihat dari lambang bendera pusaka yang mereka miliki. Tionghoa Taiwan bendera pusakanya berwarna merah dengan bertabur 12 bintang, sedangkan Tionghoa RRC bendera pusakanya berwarna merah dengan bertabur 5 buah bintang. Sesuai dengan azas kebangsaan yang dianut oleh negaranya, orang-orang Tionghoa tetap mengakui RRC dan Taiwan sebagai negara leluhurnya, sehingga di daerah Pontianak mereka tergolong sebagai warga negara asing (WNA) sekalipun tempat lahirnya juga di Kalimantan Barat. Mereka menganut adat istiadat dan bahasa Cina dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga mengikuti pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan khusus ketionghoan.

Di antara bangsa-bangsa asing (keturunan asing), yang tinggal di Kota Pontianak, orang Cina termasuk paling besar jumlahnya. Mereka tergolong sebagai pedagang yang sukses dan disegani, tetapi juga sering menimbulkan iri hati bagi golongan suku bangsa asli. Pedagang-pedagang Tionghoa ini mendiami daerah pasaran, terutama di tepi sebelah selatan Sungai Kapuas. Tempat tinggalnya juga di daerah pasar. Bangunan pasar digunakan juga sebagai tempat tinggalnya. Biasanya ruang depan atau lantai satu (jika bangunan bertingkat) dipergunakan untuk tempat usaha dagang, sedangkan ruangnya lain-lainnya dijadikan sebagai tempat tinggal.

Kecuali bangsa Belanda, bangsa-bangsa asing yang tinggal di Kota Pontianak itu berusaha di bidang perdagangan. Bangsa Arab, India dan Pakistan lebih senang bertempat tinggal di kampung bersama-sama penduduk asli meskipun tempat usahanya tetap berada di daerah pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya kesamaan di bidang agama yaitu sama-sama menganut agama Islam. Di lain pihak orang asing itu juga berusaha untuk menyesuaikan dengan kehidupan penduduk asli dan berbahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari.

Di kalangan suku bangsa Indonesia yang tinggal di Kota Pontianak dan bergerak di bidang usaha dagang, ialah suku bangsa Bugis, Banjar dan Minangkabau. Suku bangsa Bugis dan sedikit dari suku bangsa Madura terkenal sebagai pelaut yang berani. Mereka "pulang-balik" antara Pontianak dan daerah asalnya mengarungi laut dengan mempergunakan perahu-perahu layar yang dikenal penduduk dengan istilah kapal layar atau perahu Bugis/Madura. Ke Pelabuhan Pontianak terutama diangkut bahan pangan dan bahan pakaian dan juga sapi-sapi Madura. Dari Pontianak diangkut hasil hutan dan hasil bumi Kalimantan Barat yang laku dipasarkan secara nasional.

Tergolong di bidang ekonomi (kaya-kaya) di antara penduduk Kota Pontianak ialah golongan pedagang yang terdiri atas orang-orang Cina, Banjar dan Suku Melayu; demikian menurut klasifikasi responden. Suku bangsa Bugis dan Minangkabau juga termasuk dalam klasifikasi ini. Suku-suku bangsa lain tergolong kuat di bidang ekonomi. Orang-orang yang bermatapencaharian sebagai petani juga tidak tergolong kuat perekonomiannya.

### 3. Mobilitas Geografis

Kegemaran merantau juga dimiliki oleh pemuda-pemuda Pontianak; lebih-lebih karena letak geografisnya sendiri sangat mendorong bagi pemenuhan akan kegemaran itu. Keadaan ini ditunjang dengan pengalaman yang ditularkan oleh para pen-

duduk pendatang yang telah mengalami suka-dukaanya dalam perjalanan dari daerah asal sampai di Kota Pontianak.

Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kegemaran merantau itu bukan merupakan jiwa dari suku bangsanya; lebih-lebih bagi suku bangsa Daya. Mereka lebih cenderung untuk tinggal di rumah menunggui kampung halaman sendiri karena beberapa sebab, antara lain:

- a. Rasa kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Rasa kasih sayang ini dapat ditelusuri dari cukup banyaknya nama-nama timangan orang tua terhadap anak seperti si Bujang, si Dare, si Anong, si Buntat, si Embun, si Intan dan sebagainya. Anak-anak itu calon tenaga yang sangat diperlukan untuk membantu orang tua mengelola harta pusaka yaitu kebun karet, kebun kelapa dan lain-lain.
- b. Di kota itu telah banyak pekerjaan dengan penghasilan yang cukup. Kebun karet, kebun kelapa, dan kebun lada dalam jumlah yang cukup. Pemilikan itu tidak hanya di dalam kota, tetapi juga terdapat di daerah-daerah di luar kota. Pada masa itu keadaan tanaman masih muda-muda dengan hasil yang cukup. Di lain pihak pasaran komoditi itu belum terasing oleh benda-benda sintetis.
- c. Bidang pendidikan telah mulai berkembang, sehingga pemuda-pemuda yang ingin menuntut ilmu telah tersedia sekolah-sekolah sekedarnya di daerah sendiri.

Pada masa permulaan abad ke-20 ini suatu keluarga cenderung membuat rumahnya dalam ukuran yang besar-besar dan kuat. Bangunan begitu dimaksudkan untuk menampung anak-cucu atau kemenakan-kemenakan untuk tinggal bersama, sehingga tidak perlu pergi jauh-jauh karena segala fasilitas telah disediakan. Rumah besar itu dipetak-petak menjadi banyak kamar dan setiap kamar ditempati oleh suatu keluarga anak atau cucu. Bentuk bangunan yang besar dan kokoh ini sekarang masih banyak kita jumpai di kampung-kampung yang terletak di sepanjang Sungai Kapuas.

Pemuda yang gemar merantau, menggantungkan cita-citanya untuk dapat mencapai kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan lain-lain. Tidak sedikit pemuda yang telah mencapai tujuan itu terutama dalam rangka menuntut ilmu yang tidak dapat dituntut di kota sendiri. Sekolah agama, sekolah lanjutan atas dan sekolah tinggi pada pertengahan awal abad itu masih harus dicari di kota lain. Arus pemuda yang menuntut ilmu ke kota-kota besar di Jawa semakin deras menjelang tahun empat puluhan. Pada masa pendudukan Jepang arusnya semakin deras lagi karena di samping terdorong untuk mencari ilmu, mereka juga terdorong oleh faktor politik dan faktor keamanan.<sup>5)</sup>

Pada zaman penjajahan Jepang, kesengsaraan lebih dirasakan di kota ini. Setelah pendaratan tentara Jepang pada tahun 1942, hubungan Pontianak dengan kota-kota lain di luar Kalimantan Barat satu-persatu mulai diputuskan. Rakyat dikerahkan untuk berswasembada pangan dengan menanam sayur-sayuran, ubi-ubian dan padi-padian. Sejak dulu kota ini memang tidak siap untuk memenuhi kebutuhan sendiri semacam itu. Keadaan tanah juga kurang cocok untuk padi-padian. Banyak keperluan yang juga belum mungkin dipenuhi sendiri seperti alat-alat pertanian, minyak bakar, garam, sabun, pakaian dan lain-lain. Sementara komoditi Kalimantan Barat tidak ada harganya di pasaran. Akibatnya rakyat sangat menderita. Di lain pihak ada indikasi bahwa tentara Jepang akan mengakhiri riwayat Pemimpin Kalimantan Barat pada masa itu. Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda, satu-persatu diculik dan dibunuh. "Peristiwa Mandor" merupakan peristiwa pembantaian lebih dari 10.000 orang tokoh masyarakat Kalimantan barat termasuk di antaranya Syarif Muhammad Alqadrie, sultan Pontianak sendiri, Pangeran

---

5) Hasil wawancara dengan Syarif Mazuar Alhinduan, di Kampung Luar Kecamatan Pontianak Timur.

Adipati, Ng Ngiap Sun (pengusaha), Rubini (dokter rumah sakit), dan lain-lain.

Tragedi Mandor itu mendorong para pemuda Kalimantan Barat, khususnya yang berasal dari Pontianak yang akan berjuang untuk daerahnya, terpaksa harus melarikan diri untuk mencari keselamatan. Mereka mempergunakan tongkang-tongkang, bahkan rakit-rakit untuk menyeberangi laut mencari daerah yang lebih aman. Tujuannya ke kota-kota di Jawa adalah untuk mencari penghidupan dan keselamatan. Di tempat yang baru ini mereka bergabung dengan pemuda-pemuda setempat dan berjuang untuk kemerdekaan seluruh tanah air.<sup>6)</sup> Untuk mendapatkan nafkah di pengungsian mereka antara lain mendirikan perkumpulan kesenian (sandiwara) yang diberi nama "Timur".

Selama dalam pendudukan Jepang hubungan Pontianak dengan daerah-daerah luar Kalimantan Barat boleh dikatakan terputus. Hanya sesekali saja kapal datang membawa bahan-bahan pangan dan persenjataan perang. Tetapi di lain pihak pemuda-pemuda mendapat pengalaman baru dalam merantau dan hidup di daerah lain, sehingga mobilitas geografis menjadi semakin besar. Apalagi sesudah masa perang kehidupan belum pulih dan kebun karet, kebun kelapa banyak mengalami kerusakan karena tidak terurus. Untuk menopang hidup, maka harus dicari bahan-bahan keperluannya dari daerah lain baik di lingkungan Kalimantan Barat sendiri atau dari luar lingkungan Kalimantan Barat.

Sejak zaman raja-raja dahulu, hubungan antara Pontianak dengan Serawak, Malaya, Berunai dan Singapura sudah sering terjadi. Penduduk dan pemuda Pontianak memandang negeri terakhir itu lebih moderen, lebih makmur dan lebih baik dari pada wilayah negaranya sendiri. Mobilitas dan saling selundup barang-barang dagangan terjadi antara penduduk kedua negara.

---

6) Hasil wawancara dengan Syarif Mazuar Alhinduan, di Kampung Luar Kecamatan Pontianak Timur.

Bahkan tidak jarang pemuda-pemuda Pontianak menetap dan kawin dengan pemudi-pemudi negara tetangga itu. Sampai sekarang hubungan famili antara Pontianak dengan Serawak, Brunai, Malaya dan Singapura masih terjalin erat.

Negeri idaman lain untuk melakukan mobilitas geografis penduduk Pontianak ialah negeri-negeri di Timur Tengah, khususnya Mekah dan Madinah. Mobilitas ke negeri ini dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Sejak dulu jemaah haji dari Pontianak setiap tahunnya cukup besar. Mobilitas ini lebih banyak dilakukan oleh generasi tua, karena salah satu syarat ialah ongkos naik haji (ONH) secara cukup. Pengumpulan ONH memerlukan waktu yang lama dan setelah berumur relatif tua tabungan untuk ONH baru cukup. Tetapi tidak jarang orang tua membawa anak-anaknya untuk menunaikan ibadah haji karena ongkosnya tersedia. Tidak jarang pula dari anggota suatu keluarga naik haji lebih dari satu kali, bahkan bermukim di tanah suci karena pada masa itu keadaan memungkinkan. Mungkin bukan hal yang aneh kalau tujuan naik haji justru untuk dapat menemui ajalnya di sana, karena mati dan dikuburkan di tanah suci dipandang sebagai akhir hidup yang lebih mulia, lebih banyak ampunan dan ganjaran.

## B. SISTEM SOSIAL

### 1. Pola Tempat Tinggal

Lingkungan alam mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pola pemukiman penduduk. Permukaan tanah yang relatif landai, pola aliran sungai yang tidak teratur, hutan yang lebat dan daya gandar tanah yang relatif rendah memberikan kecenderungan penduduk memanfaatkan sungai-sungai sebagai prasarana lalu lintas utama. Sungai Kapuas dan Sungai Landak merupakan *main road* yang menghubungkan daerah kota dengan daerah *hinterland* dan ke arah hilir sungai itu menghubungkan kota dengan daerah lain.

Jalan darat terlalu mahal harganya sehingga biaya pembuatannya tidak terpicul oleh rakyat dan pemerintah waktu itu. Sesuai dengan fungsi sungai sebagai prasarana lalu lintas utama, maka pemukiman penduduk berderet mengikuti alur sungai. Agak jauh dari alur sungai rata-rata belum didiami. Dengan demikian maka pemukiman penduduk berpola memanjang (*ribbon*). Arah sungai itu juga tidak menentu apakah ke barat, ke utara, ke selatan atau ke timur dan sebagainya. Sungai Kapuas sendiri arahnya agak ke arah barat laut. Umumnya rumah-rumah tempat tinggal dibuat tegak lurus menghadap ke arah sungai sehingga arah rumah itu kelihatannya tidak menentu.

Sungai-sungai besar sebagai *main road* mempunyai anak-anak sungai yang oleh penduduk dikenal dengan sebutan parit-parit. Parit-parit itu semua berfungsi sebagai lalu lintas sampansampans yang menghubungkan perumahan penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Fungsi parit-parit itu semakin besar sehingga penduduk mulai mengembangkan pemukimannya ke arah parit-parit ini. Semula bersifat memanjang dan mengelompok sesuai dengan kemudahan yang tersedia oleh alam; artinya, ialah bahwa pemilihan lokasi sebagai pemukiman itu tidak disertai dengan usaha penaklukan alam lebih dahulu. Areal untuk pemukiman dipilih yang baik-baik dan menghindari areal yang dipandang mutunya kurang baik bagi pemukiman. Dengan demikian perumahan itu berpola mengelompok padat dan memanjang mengikuti alur sungai.

Pola pemukiman seperti itu menguntungkan bagi sistem komunikasi baik antar sesama warga dalam kelompok maupun antar kelompok-kelompok. Hubungan antar warga dalam kelompok sangat menguntungkan karena mereka tinggal saling berdekatan secara fisik sehingga mudah mengadakan kontak. Komunikasi dengan kelompok lain juga mudah dilakukan karena di depan perumahan itu terbentang jalur lalu lintas

yang masih mudah dilalui. Namun dari segi negatif dapat mengurangi kebahagiaan hidup. Sebab bilamana terjadi wabah penyakit maka penjalaran penyakit itu akan sulit dicegah.

Dengan dibukanya daerah seberang selatan Sungai Kapuas oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1779, maka pembukaan lokasi baru ini akan membawa perubahan bagi pola pemukiman penduduk. Pada taraf pertama perjanjian antara Sultan Syarif Abdurrahman Alqadrie dengan Willem Ardi Polm, Belanda mendapatkan tanah untuk mendirikan perkantoran di daerah kedudukan walikotamadya Pontianak sekarang. Luas tanah itu disepakati 1 km<sup>2</sup> yang kemudian dikenal dengan "tanah seribu" (berasal dari 1000 x 1000 meter).

Pembukaan lokasi perkantoran baru itu diikuti dengan rintisan pembukaan jalan darat yang memanjang dari timur ke barat mengikuti alur Sungai Kapuas. Dengan demikian pemukiman penduduk juga berkembang, namun masih dalam bentuk mengelompok padat dan memanjang mengikuti alur jalan darat.

Pembukaan jalan darat mempunyai konsekuensi berkembangnya kendaraan-kendaraan darat karena gerakannya lebih cepat dari pada kendaraan air. Karena itu dituntut pula perkembangan prasarana lalu lintas darat yang lebih luas dan lebih panjang. Dengan demikian jalan-jalan darat itu akan diprioritaskan. Perkembangan lalu lintas darat itu memungkinkan perkembangan pola pemukiman dari bentuk *ribbon* ke bentuk seperti bintang (*star shaped*). Prasarana lalu lintas darat mudah berkembang dan potong-memotong satu sama lain. Di kiri kanan jalan itu segera tumbuh rumah-rumah pemukiman penduduk. Arah jalan darat umumnya sejajar atau tegak lurus dengan sungai.

Perkembangan pemukiman lebih pesat di daerah seberang selatan karena kondisi tanahnya lebih bagus dengan fasilitas pembangunan jalan-jalan darat oleh Belanda. Di samping itu di tepian selatan Sungai Kapuas tersebut dikembangkan oleh orang-orang Cina sebagai daerah perdagangan

yang dilengkapi dengan adanya kantor gubernemen. Pada awal abad ke-20 perkembangan kota telah mengarah pada bentuk *star shaped*.

Perumahan penduduk maupun kantor-kantor pemerintah berbentuk rumah panggung. Bentuk ini berkembang karena ketinggian permukaan tanah yang mudah tergenang air bila terjadi pasang besar. Bahan pembuat rumah semuanya dari kayu kecuali perumahan instansi dan kantor-kantor gubernemen yang telah dibangun dengan bahan kayu dan semen. Mesjid Jami' di istana sultan sendiri masih dibuat dari bahan kayu. Jenis kayu yang terkenal ialah kayu belian atau kayu ulin. Kayu ini tahan terhadap pelapukan dan kelembaban. Biasanya kayu jenis ini digunakan untuk pembuatan jembatan dan pondasi rumah-rumah. Orang yang tergolong mampu menggunakan jenis kayu ini untuk tiang, lantai, dinding bahkan atap rumah. Rumah dari bahan kayu ini dapat bertahan sampai empat atau lima generasi.

Penduduk yang tidak mampu mempergunakan kayu yang berkualitas lebih rendah yaitu kayu kelas dua atau kelas tiga untuk membuat rumah-rumah mereka. Atapnya dapat dibuat dari daun nipah atau daun sagu. Rumah yang lebih sederhana lagi dibuat dari kayu bulat (kayu kelas empat) yaitu jenis kayu yang tidak memerlukan "penggesekan" lebih dahulu untuk dijadikan bahan bangunan karena kecilnya. Rumah-rumah yang dekat kebun atau ladang, umumnya terbuat dari kayu kelas tiga atau kelas empat. Kekuatannya hanya sekitar 10 tahun saja, dan itu pun memerlukan perawatan dan perbaikan. Rumah-rumah yang terletak di tepi jalan darat atau sungai, umumnya terbuat dari kayu kelas satu atau kelas dua.

## 2. Sistem Pelapisan Sosial

Dipandang dari sudut suku bangsa, penduduk Kota Pontianak sangat heterogen. Demikian juga halnya jika pandangan

dialihkan pada sudut matapencaharian penduduk. Heterogenitas ini tidak menimbulkan masalah karena memang adanya kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga kota. Penduduk pendatang umumnya mendiami daerah seberang selatan Sungai Kapuas dan seberang timur umumnya didiami oleh penduduk asli terutama dari kalangan keluarga sultan.

Dari pemisahan lokasi tempat pemukiman ini secara garis besar dapat dikenali adanya pemisahan tentang ciri-ciri dasar pelapisan antara penduduk di seberang timur dan seberang selatan sungai. Dasar pelapisan penduduk di seberang timur ialah keturunan dan kesalehan di bidang agama. Golongan bangsawan bergelar "syarif" untuk laki-laki dan "syarifah" untuk perempuan. Ada tiga keluarga pokok yang keturunannya bergelar "syarif/syarifah" yaitu Alqadrie, Al Hinduan dan Alaydrus. Dalam hal stratifikasi sosial ketiga keturunan bangsawan itu satu sama lain tidak ada perbedaan kedudukan. Pendiri Kerajaan Pontianak sendiri berasal dari keluarga Alqadrie. Anak keturunannya masing-masing mengabadikan gelar itu di depan dan di belakang namanya sehingga menjadi syarif/syarifah Alqadrie. Di samping gelaran syarif, penduduk keturunan bangsawan juga bergelar raden, uray, gusti, ya', wan dan lain-lain. Gelar-gelar selain syarif atau syarifah itu bukan keturunan raja-raja Pontianak, jadi bukan penduduk asli Kota Pontianak. Mereka adalah pendatang dari luar. Raden dan uray adalah gelar penduduk yang berasal dari daerah Kabupaten Sambas. Gelar gusti, ya' (untuk laki-laki) dan utin, dayang, putri, galuh (untuk putri) berasal dari Kabupaten Sanggau dan Sintang. Kaum bangsawan dan para alim ulama menduduki lapisan atas dalam sistem stratifikasi. Rakyat biasa menduduki lapisan kedua atau lapisan bawah.

Masyarakat di seberang selatan sungai lebih memandang bahwa para penguasa menduduki strata teratas. Di pinggir selatan dan barat ini tinggal orang-orang kaya, alim ulama dan para pegawai pemerintah yang menduduki strata menengah.

Strata terbawah dalam sistem pelapisan sosial di tepi selatan kota diduduki oleh para petani, pedagang kecil, buruh, tukang, pegawai rendahan dan lain-lain.

Hubungan antar pelapisan memang sedikit kaku, apalagi dalam hal perkawinan. Perkawinan antar pelapisan ini agak sulit terjadi, lebih-lebih jika pihak perempuan berasal dari lapisan yang lebih tinggi. Jika hal ini terjadi maka akan menurunkan status pelapisan. Biasanya syarifah harus kawin dengan syarif atau keturunan ulama besar atau anak dari golongan pejabat tinggi. Pedagang kaya berbesan dengan pedagang kaya, lebih-lebih bagi orang-orang Cina.

Dalam pergaulan sehari-hari pun ada kesenjangan di antara warga dari pelapisan itu. Warga yang lebih tinggi merasa kurang sesuai bergaul bebas dengan warga dari pelapisan yang lebih rendah, sedangkan dari kalangan lapisan yang lebih rendah agak merasa segan dan malu bergaul dengan warga dari pelapisan yang lebih tinggi. Dari kalangan bawah umumnya memperoleh hak yang lebih sedikit dengan kewajiban yang lebih banyak.

Sejak zaman pendudukan Jepang sistem pelapisan itu mulai berubah. Pandangan masyarakat tidak lagi terpusat pada pangkat dan keturunan, tetapi lebih mengarah pada usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di lain pihak kebutuhan hidup sehari-hari semakin sulit terpenuhi karena Kota Pontianak terisolasi dari daerah lain. Tentara Jepang sendiri memperlakukan penduduk yang berasal dari berbagai lapisan itu secara sama rata. Dari mana pun asal pelapisannya kalau salah selalu diberi hadiah cap "kapak". Begitulah yang dipakai pada masa itu untuk menyebut buah tangan alias "tampar" atau "tempeleng".<sup>7)</sup>

Pada masa perang, khususnya, dalam masa Perang Asia Timur Raya, masyarakat itu tidak dapat dipisah-pisahkan

---

7) M. Yanis, *Kapal Terbang Sembilan*, opcit, hal. 33.

atas stratifikasinya, kecuali abang tua dari Negeri Sakura. Terhadap masyarakat Pontianak tanpa kecuali harus memberi hormat jika ketemu dengan mereka di mana saja. Dengan demikian maka struktur pelapisan pada waktu itu ada dua yaitu lapisan atas terdiri dari Jepang dengan aparat-aparat pemerintah dan rakyat jelata.

Hubungan antar pelapisan pada masa perang itu bersifat formal dan kaku karena adanya rasa takut dari lapisan bawah terhadap lapisan atas. Lapisan atas sifatnya korektif dalam arti selalu mencari-cari kesalahan tidak saja terhadap lapisan bawah tetapi juga terhadap sesama individu dalam lapisan atas.

Perubahan pelapisan terjadi sesudah Perang Asia Timur Raya selesai. Pemimpin-pemimpin rakyat punah karena lebih dari 10.000 orang diculik dan dibunuh Jepang.<sup>8)</sup> Pemimpin-pemimpin yang selamat, tinggal sedikit dan itu pun karena Perang Asia Timur Raya segera selesai. Pemimpin-pemimpin yang selamat itu kebanyakan tidak berada di daerah ini karena lari menyelamatkan diri dari incaran pembunuhan Jepang. Pada awal masa kemerdekaan itu didatangkanlah pemimpin-pemimpin dan guru-guru dari daerah lain terutama dari Jawa dan Sumatera. Struktur pelapisan sosial terdiri atas golongan pemimpin dan golongan yang dipimpin. Jika struktur pelapisan ini dihapuskan, maka golongan pemimpin masih dapat dikelompokkan atas dua golongan yaitu golongan penguasa dan pegawai rendahan baik sipil maupun ABRI. Dasar-dasar pelapisan yang lain masih belum begitu menonjol karena sedang semangat-semangatnya perasaan demokratisasi, kecuali pelapisan penduduk atas dasar senioritas.

### 3. Diferensiasi Kerja

Sebagai suatu kota, mata pencaharian penduduk Pontianak sudah cukup bervariasi. Tetapi sektor pemerintah masih me-

8) Wawancara dengan M. Ali As, SH. Kepala PSK Kal-Bar.

megang peranan penting. Dari sektor ini terutama dihasilkan karet, kemudian baru tanaman pangan berupa padi, ubi-ubian, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-lain.

Dalam masa pemerintahan raja-raja sampai pada tahun 1941 (awal pendudukan Jepang), klasifikasi mata pencaharian penduduk kota Pontianak itu dapat dikemukakan sebagai berikut: pertanian (20%), perkebunan (15%), pedagang/penguasa (5%), pegawai/guru (5%), pengrajin (5%), industri/jasa (2%), buruh (5%), penambang sampan (2%), nelayan/pencari ikan (5%), peramu/pencari hasil hutan (10%), dan lain-lain (20%).<sup>9)</sup>

Pada masa pendudukan Jepang Kalimantan Barat boleh dikatakan diisolasi dari daerah lain. Antara tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 perdagangan Kota Pontianak macet total. Toko-toko dan pasar-pasar sepi karena tidak ada barang dagangan. Penduduk kota diwajibkan bertani, membantu ekonomi perang. Kemudian pemerintah Jepang juga mendirikan pabrik-pabrik untuk mengimbangi agar kapal-kapal yang sekali-sekali datang membawa barang-barang konsumsi, kembali dari Pelabuhan Pontianak harus ada barang-barang yang diangkut.

Klasifikasi mata pencaharian penduduk Kota Pontianak pada masa itu dapat dikemukakan sebagai berikut: pertanian/perkebunan (45%), buruh (5%), pengrajin (3%), pegawai (5%), pedagang (10%), pencari ikan (7%), jasa/industri (10%), dan pencari hasil hutan (10%).<sup>10)</sup>

Sesudah masa pemerintahan Jepang, Kalimantan Barat kembali ke tangan pemerintahan sipil Belanda (NICA). Isolasi dengan daerah di luar Kalimantan Barat mulai terbuka, sehingga kapal-kapal dan perahu-perahu mulai berdatangan ke Pelabuhan Pontianak. Perdagangan mulai hidup kembali, tetapi masih dalam suasana perang, yaitu perang kemerdekaan.

---

9) Sumber: Diolah oleh penulis dari hasil wawancara dengan para responden.

10) Diolah oleh penulis dari hasil wawancara dengan Bapak Syarif Yusuf dengan pengisian matrik dalam bentuk perkiraan kasar.

Karena itu kegoncangan ekonomi masih cukup besar. Ekonomi perang masih dipertahankan. Dengan demikian sektor pertanian masih memegang peranan penting.

Klasifikasi kehidupan ekonomi Kota Pontianak dalam tahun 1946 sampai dengan tahun 1950 dapat digambarkan sebagai berikut: pertanian/perkebunan (20%), perdagangan (20%), pegawai/angkatan bersenjata (120%), pengrajin (5%), industri/jasa (10%), buruh (5%), nelayan (5%), lain-lain (15%).<sup>11)</sup>

#### 4. Hubungan Sosial

Hubungan antar kelompok etnis di Kota Pontianak boleh dikatakan baik. Suku bangsa Melayu yang dalam hal ini berlaku sebagai penduduk asli, menerima kehadiran para pendatang baru itu baik. Ini disebabkan karena toleransi yang telah berkembang sejak berabad-abad lamanya. Di lain pihak daerah Kalmantan Barat khususnya Kota Pontianak daerahnya cukup luas dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, sehingga kehadiran kelompok lain boleh dikatakan cukup menyenangkan.

Sultan Pontianak sendiri dengan keluarganya tergolong dari penduduk pendatang. Kemudian karena keperluan sumber daya manusia untuk pengembangan kota, dari mana pun datangnya tenaga manusia itu diterima dengan baik. Bukan hanya dari lingkungan suku-suku bangsa yang ada di tanah air kita, tetapi bangsa asing sekalipun diterima dengan baik-baik. Itulah sebabnya maka bangsa Cina, Belanda, Arab, India, Asia Tenggara dan lain-lain yang datang ke daerah ini diterima dengan baik-baik.

Zaman kesultanan mempunyai strategi maritim dan strategi dagang. Pedagang asing yang datang ke Pontianak diterima dengan baik. Mereka juga diberi kesempatan untuk menetap di kota itu, apalagi jika ingin turut membangun kota. Dengan

---

11) Diolah oleh penulis dari hasil wawancara dengan Bapak Syarif Yusuf dengan pengisian matrik dalam bentuk perkiraan kasar.

taktik ini maka bertumbuhanlah perkampungan-perkampungan baru seperti Kampung Arab, Kampung Saigon, Kampung Kamboja, kemudian juga Kampung Bugis, Kampung Banjar, Kampung Jawa, Kampung Bangka, Kampung Kuantan dan lain-lain. Semua kampung mempergunakan nama sesuai dengan identitas daerah/negeri asal para pendirinya. Di samping itu ada nama Kampung Melayu tersendiri. Ini menunjukkan hubungan yang baik antara kelompok-kelompok etnis yang mendiami Kota Pontianak.

Di antara kelompok-kelompok etnis itu yang dekat hubungannya dengan keluarga sultan ialah dari suku bangsa Bugis dan Arab di samping suku bangsa Melayu sendiri. Ini karena hubungan keagamaan dengan diri sultan. Pendiri Kota Pontianak adalah bangsawan keturunan Arab dan menantu Opu Daeng Manambun, Panembahan Mempawah yang berdarah Bugis dan ada hubungan erat dengan raja-raja Tanjungpura yang berdarah Melayu.

Hubungan dengan Cina memang agak terbatas, karena kehidupan Cina yang cenderung mengelompok sesama orang Cina. Bahasa, adat istiadat dan agama sangat berlainan dengan golongan etnis yang lain sehingga hubungan sesamanya tidak berjalan dengan akrab. Politik orang-orang Cina yang lebih berorientasi pada negeri leluhur menimbulkan sering terjadi konflik laten dengan kelompok-kelompok etnis yang lain yang ada di Pontianak.

Dalam zaman pemerintahan Belanda, kualitas hubungan antar kelompok etnis masih tetap dapat dipertahankan. Kelompok etnis yang erat hubungannya dengan pihak penguasa pada masa itu ialah Cina, Jawa dan Melayu. Golongan Cina sangat diperlukan oleh Belanda karena kemampuan ekonominya untuk membantu pihak pemerintah. Orang-orang Cina ini menguasai sebagian besar perekonomian kota sehingga bantuannya sangat besar dan mudah bagi pemerintah. Pihak orang Cina sendiri memerlukan bantuan pemerintah pula untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dagang.

Etnis Jawa diperlukan tenaga dan pikirannya bagi penie-rintah. Tenaganya diperlukan untuk mengelola perkebunan dan pertanian terutama kebun karet dan kelapa baik di dalam maupun di luar kota. Pikirannya diperlukan karena pegawai-pegawai gubernemen rata-rata berasal dari Jawa. Orang Jawa sendiri memang diberi kesempatan oleh Pemerintah Belanda untuk berkolonisasi dari daerah padat ke daerah Kalimantan Barat yang kondisi fisiknya masih terbuka luas untuk pemukim-an dan usaha pertanian.

Bagi suku bangsa Melayu, kualitas hubungan dengan Pe-merintah Belanda sangat tergantung dari sikap para sultan. Hu-bungan sultan dan Belanda tidak selalu baik bahkan bahkan rata-rata hubungan itu kualitasnya jelek karena Belanda ingin menguasai kesultanan. Timbullah gerakan-gerakan anti Pe-merintah Belanda yang kemudian diikuti oleh hampir semua unsur kelompok etnis yang tinggal di kota. Tujuannya ingin mengusir penjajah seperti gerakan-gerakan kemerdekaan di Jawa. Selama periode 1900 sampai 1940 Pemerintah Belanda sibuk menghadapi perlawanan-perlawanan rakyat.

Dalam masa pendudukan Jepang hampir tidak ada pe-rbedaan di antara kelompok-kelompok etnis yang mendiami Kota Pontianak. Tentara pendudukan tidak membedakan pen-duduk apakah ia Cina, Melayu, Daya, Jawa dan lain-lain. Semua tertekan oleh kemiskinan dan semua mendapat hukuman yang sama bila dipandang melakukan pelanggaran. Situasi perang membentuk perlakuan yang jelek oleh pihak yang sedang menang terhadap pihak yang sedang kalah. Hubungan antar etnis dan antar warga masyarakat menjadi tidak menentu. Masing-masing mengejar penghidupan sendiri-sendiri. Pertentangan antar golongan etnis tidak pernah terjadi.

Ketika tekanan pihak penguasa telah demikian hebatnya, terbentuklah suatu kelompok untuk melakukan perlawanan. Dalam dokumen komplotan yang kemudian terbongkar itu ter-dapat daftar nama-nama yang terdiri atas unsur hampir semua etnis yang mendiami Kota Pontianak. Dari nama-namanya

yang terdapat dalam daftar itu dapat diketahui bahwa etnis yang mendirikan Kota Pontianak itu terdapat hubungan yang akrab dan erat. Namun demikian unsur penghianat selalu ada. Tetapi unsur ini harus dilepaskan dari kelompok etnisnya karena bersifat pribadi yang menginginkan keuntungan banyak.

## C. ORGANISASI SOSIAL

### 1. Organisasi Pendidikan

Sebagai pelaksanaan dari politik balas budi (*ethis politiek*) ciptaan Van Deventer, sejak tahun 1892 mulai dikembangkan lembaga-lembaga pendidikan formal yang didirikan dan dikelola oleh organisasi-organisasi pendidikan baik negeri maupun swasta. Sesuai dengan latar belakang dan tujuan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan itu maka organisasi-organisasi kependidikan di Kota Pontianak antara tahun 1900 – 1950 dapat dibedakan menjadi lembaga kependidikan negeri, lembaga pendidikan Kristen, lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan Cina, dan lembaga pendidikan nasional.

#### a. Organisasi pendidikan negeri

Didirikannya sekolah-sekolah negeri pada zaman pemerintahan Belanda dilatarbelakangi oleh politik balas budi dari kaum kolonialis Belanda terhadap rakyat bumiputra. Selama lebih kurang tiga setengah abad, Pemerintah Kolonial Belanda telah mengeruk keuntungan yang berlimpah-limpah dari Indonesia; karena itu Belanda mempunyai kewajiban moral untuk memajukan rakyat Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah yang dibiayai negara. Pelaksanaan dari *ethis politiek* ini bertepatan dengan adanya suatu fakta bahwa perkembangan perekonomian pada masa itu menuntut perluasan lapangan kerja dengan tenaga-tenaga berpendidikan. Untuk tenaga kelas rendah di negeri ini tidak diperkenankan untuk diduduki oleh tenaga-tenaga kerja asal Eropa. Bidang ini cukup dijabat oleh tenaga-tenaga bumi putera sendiri dengan tingkat pendidik-

an formal yang paling rendah, antara lain sebagai mandor, penjaga malam, juru tulis dan lain-lain.

Pada masa itu didirikanlah Sekolah Dasar (*Volkschool*), di Pontianak, Singkawang, Sambas, Mempawah dan lain-lain pada tahun 1892.<sup>12)</sup> Atas dasar pemikiran yang bersifat separtis bahwa masyarakat Indonesia terutama di kota-kota tersebut dapat digolongkan atas dua pelapisan yaitu kelas atasan (golongan raja-raja) dan kelas bawahan (rakyat jelata), maka *Volkschool* itu dibedakan atas dua tingkatan yaitu sekolah kelas satu yang lama pendidikannya enam tahun dan sekolah kelas dua yang lama pendidikannya tiga tahun. Sekolah kelas satu khusus menampung murid-murid asal keluarga bangsawan dan sekolah kelas dua menampung murid-murid dari keluarga rakyat jelata.

Sekolah-sekolah kelas satu antara lain *Hollands Indlansche School* (HIS) dan *Europese Lagere School* (ELS), *Schakelschool* dan lain-lain. Sekolah-sekolah kelas dua adalah *Vervolgschool*, dan *Volkschool*. Sampai pada akhir pemerintahan kolonial ini Pemerintah Belanda tidak mendirikan sekolah-sekolah lanjutan untuk menampung murid-murid lulusan HIS, ELS dan lain-lain. Sekolah Menengah Pertama seperti *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO), *Ambaschscool*, *Normaalschool*, *Handelschool* dan lain-lain justru banyak didirikan oleh pihak Misi.

Pada masa pendudukan Jepang tujuan pendidikan ialah untuk mencari dan melatih pemuda-pemuda untuk menjadi tentara. Jepang tidak membedakan penduduk dalam kelas-kelas, demikian juga dalam sekolah-sekolah yang didirikan. Sekolah-sekolah hanya ditangani oleh pemerintah. Sekolah-sekolah swasta ditutup kecuali beberapa sekolah tertentu. Berjen-sjenis sekolah dilebur menjadi satu dalam *Kokumin Gakko* atau sekolah rakyat. Pada masa itu di Pontianak ada Sekolah Indonesia I (Pertama) atau Sekolah Rakyat yang

---

12) Proyek IDKD, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K 1980/1981, *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Barat*, Opcit, hal. 90.

lama pendidikannya enam tahun. Sebagian besar pelajarannya ialah kerja sosial untuk kepentingan masyarakat (kerja sosial untuk kepentingan umum). Selain itu murid-murid diberi latihan kemiliteran, menyanyikan lagu-lagu Jepang, *taiso* dan setiap hari harus mengucapkan sumpah setia kepada *Dai Nippon*.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) rakyat Indonesia diberi kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan. Hanya sekolahnya yang sangat terbatas jumlahnya, karena kemampuan pemerintah sangat kecil dalam menyelenggarakan sekolah-sekolah terutama karena sangat kekurangan tenaga guru. Guru-guru zaman pemerintahan Belanda yang terdiri atas para pastur, bruder, suster dan lain-lain kemudian ditangkap dan ditawan.

Oleh Pemerintah Jepang, di Pontianak didirikan Sekolah Menengah yang pertama yaitu *Futra Curu Gakko*.<sup>13)</sup> Guru-gurunya adalah orang Jepang dan kepala sekolahnya bernama Prof. Murakawa.<sup>14)</sup> Menurut keterangan para informan, guru-guru sekolah pada masa itu memang terdiri atas para ahli pendidik yang berpangkat cukup tinggi. Guru-guru bukan orang Eropa diperbolehkan mengajar di sekolah mana pun, sehingga hilanglah perbedaan kelas-kelas sosial terutama di lingkungan persekolahan.

Pada zaman kemerdekaan (sesudah tahun 1945), politik non-separatisme Jepang itu dikembangkan oleh pemerintah. Rakyat mendapat kesempatan untuk menuntut pelajaran di sekolah-sekolah. Lembaga pendidikan formal ini juga diperluas baik jumlahnya, tingkatannya maupun persebarannya. Namun kemampuan pemerintah masih sangat kecil sehingga pihak swasta diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pendidikan.

---

13) Proyek IDKD, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K, *Sejarah Pendidikan di Daerah Kal-Bar*, 1980/1981, Pontianak 1981, hlm. 96.

14) *Ibid*, hlm. 96.

#### b. Organisasi pendidikan Kristen

Jumlah Zending di Pontianak tidak sebanyak Misi. Namun demikian pihak GKKB (Gereja Kristen Kalimantan Barat) juga tidak ingin ketinggalan dalam hal mendirikan sekolah-sekolah. Pada tahun 1938 Zending mendirikan Sekolah Dasar Lok Yue (senang atas pendidikan). Sekolah ini khusus disediakan untuk anak-anak keturunan Cina dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Cina. Lama pendidikan sekolah ini tiga tahun. Tujuan didirikannya sekolah ini ialah untuk membantu anak-anak keturunan Cina yang kesulitan mendapatkan sekolah. Di samping itu pihak gereja juga ingin mengembangkan pengaruh agama Kristen pada masyarakat Cina. GKKB sendiri berdirinya belum lama yaitu setelah masyarakat pedalaman banyak dibina oleh Misi; sementara itu masyarakat suku bangsa Melayu yang beragama Islam kecil kemungkinannya untuk dapat dipengaruhi oleh GKKB.

#### c. Organisasi pendidikan Islam

Latar belakang dari organisasi ini ialah penyiaran dan penyebaran agama Islam dengan dakwah, kotbah-kotbah, pengajian dan sebagainya terutama di kalangan suku bangsa Melayu. Dakwah dapat dilakukan di mana-mana; di rumah-rumah, di mesjid, di surau, di istana dan lain-lain. Dalam perkembangannya dakwah kemudian bersifat menetap dan akhirnya menjadi suatu organisasi pendidikan.

Dengan berkembangnya sistem pendidikan Barat sejak tahun 1892, maka organisasi-organisasi pendidikan Islam ini mempunyai latar belakang tujuan yang baru yaitu untuk mengimbangi materi pelajaran yang diterima oleh murid-murid dari sekolahnya. Materi pelajaran di sekolah-sekolah Eropa dipandang membahayakan dan dapat merusak kepribadian bangsa. Pandangan pada waktu itu dikatakan bahwa ajaran-ajaran Barat mendekati anak pada kekafiran, karena diajarkan oleh orang-orang Barat yang tidak beragama Islam. Karena itu semakin berkembangnya sekolah-sekolah Eropa semakin

berkembang pula sekolah-sekolah yang didirikan dan dibina oleh organisasi-organisasi pendidikan Islam.

Organisasi pendidikan Islam yang paling tua ialah pendidikan As Sulthaniah yang didirikan di Sambas oleh Sultan Muhammad Sjaifuddin VI pada tahun 1868. Pada tahun 1936, Perguruan As Sulthaniah diganti namanya menjadi Tarbiyatul Islam dengan melakukan penyesuaian terhadap sistem pendidikan Eropa. Organisasi pengelolaannya juga dikembangkan dari tangan sultan saja kepada suatu organisasi yang pengurusnya telah berpengalaman pendidikan luar negeri (Kairo dan Mekkah) seperti Achmad Fauzi, Haji Muhammad Basuni Imran, Haji Achmad Sood, Haji Abdurrachman yang masing-masing telah mengenyam pendidikan di Kairo.

Di Pontianak didirikan Perguruan Alqadriah pada tahun 1914. Nama itu diambil dari nama dinasti pendiri Kerajaan Pontianak yang bergelar Alqadrie. Sesuai dengan namanya, perguruan ini khusus disediakan untuk keluarga raja-raja. Letaknya pun berada di kompleks istana sehingga agak sulit dijangkau oleh keturunan bukan bangsawan, lebih-lebih dengan transportasi yang hanya dapat ditempuh melalui sungai. Pandangan diferensiasi sosial pada masa itu juga berkembang di kalangan kaum bangsawan. Kemudian tumbuh dan berkembanglah pandangan pada masa itu bahwa keturunan kaum bangsawan harus mempunyai kelebihan-kelebihan dari keturunan rakyat jelata, baik kelebihan fisik maupun kelebihan ilmiah sebagai calon-calon penguasa. Guru-guru untuk sekolah tersebut umumnya didatangkan dari Aceh, Palembang dan Sumatera Barat. Guru-guru itu terutama keturunan Arab yang fasih berbahasa Arab dan pandai dipilih di antara mereka yang mahir berbahasa Arab dan pandai di bidang ilmu agama. Sebagaimana sekolah As sulthaniah, sekolah Alqadriah ini pada mulanya juga menitikberatkan kurikulumnya pada bidang agama dan bahasa Arab, hapal Alqur'an dan sebagainya. Murid-murid yang pandai dikirim ke Mekah atau Kairo untuk melanjutkan pelajarannya di sana selama beberapa tahun. Di Mekkah

sudah ada tempat penampungan untuk mondok dan bermukim. Mereka berhasil menempuh pendidikan di Mekah dan Kairo antara lain Yusuf Madari (Mekkah) dan Yusuf bin Ali Azzawawi (Kairo). Yusuf bin Ali Azzawawi pernah menjabat sebagai "mufti" besar di Trenggano.

Lembaga pendidikan Alqadriah tidak mengajarkan pengetahuan umum karena ilmu sekuler dipandang kafir. Apalagi bahasa Belanda sama sekali tidak diajarkannya, karena pendidikan yang diberikan justru untuk mengimbangi pendidikan model Barat yang didirikan oleh pemerintah maupun Misi.<sup>15)</sup>

Untuk kepentingan dakwah dan penyiaran agama Islam perlu dididik calon "da'i" untuk ditugaskan dan disebarakan ke kampung-kampung sebagai guru mengaji atau sebagai khatib di mesjid-mesjid. Para calon "da'i" harus berasal dari keturunan rakyat kebanyakan juga. Untuk keperluan tersebut sultan memandang perlu memperluas perguruan Alqadriah menjadi perguruan yang tidak saja mendidik putra-putri keluarga bangsawan tetapi juga mendidik putra-putri rakyat biasa yang dipandang mampu untuk menjadi "da'i."

Di luar lingkungan kraton juga bermunculan organisasi-organisasi pendidikan yang berazas keislaman. Organisasi ini juga mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah untuk mendidik anak-anak Melayu khusus dalam bidang agama. Semula lembaga-lembaga ini bersifat perseorangan. Setelah mengalami kemajuan, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi organisasi-organisasi yang lengkap. Lembaga-lembaga pendidikan ini tumbuh sehubungan dengan semakin meningkatnya perekonomian rakyat karena munculnya komoditi karet yang sangat laku di pasaran dunia.

Lembaga pendidikan yang muncul pada waktu itu antara lain ialah Perguruan Saigoniah di Kampung Saigon yang didirikan oleh Haji Muhammad Yusuf Saigon, seorang pedagang Pontianak yang memperkenalkan tanaman karet ke negeri ini.

---

15) Hasil wawancara dengan Syarif Yusuf Alqadrie.

Nama Saigoniah berasal dari kata Saigon, yaitu ibu kota Negeri Vietnam yang sering dikunjunginya. Dari negeri ini pula isterinya berasal. Nama tersebut diambil untuk memberi identitas khusus dan sebagai penghormatan terhadap isterinya. Perguruan itu terbuka untuk umum dan diutamakan bagi mereka yang berasal dari lingkungan Kampung Saigon sendiri. Mungkin karena letak perguruan ini tidak pada lokasi yang strategis, maka kurang berkembang dan hanya menampung murid-murid di sekitar kampungnya saja.<sup>16)</sup>

Berbeda halnya dengan Perguruan Al Islamiyah yang didirikan oleh seorang hartawan dan dermawan bernama Haji Arief bin Haji Ismail pada tahun 1926. Perguruan ini semula hanya merupakan perkumpulan pengajian untuk orang-orang tua yang secara tetap diselenggarakan di rumah kediamannya. Perkembangan jumlah jemaahnya mendorong dermawan ini untuk mendirikan bangunan khusus untuk para jemaah. Bangunan ini dilengkapi dengan ruang belajar, mesjid dan perumahan guru karena perguruan ini berkembang menjadi sekolah yang mendidik anak-anak orang kebanyakan. Organisasi pengelola yang diketuai sendiri juga disempurnakan menjadi suatu pengurus lengkap, dan biaya operasional yang dikeluarkan lebih banyak berasal dari kantongnya sendiri.<sup>17)</sup>

Di samping pelajaran agama, perguruan ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat umum sesuai dengan sistem persekolahan Barat. Perguruan ini letaknya lebih strategis yaitu di seberang selatan Sungai Kapuas. Seperti telah dikemukakan terdahulu, daerah seberang Sungai Kapuas ini berkembang lebih baik dan lebih pesat karena di daerah seberang terletak pusat perkantoran gubernemen, pusat pemasaran dan pelabuhan. Dengan demikian maka Perguruan

- 
- 16) Hasil wawancara dengan Muhammad Abuhanifah dan Haji Muhammad Yusuf Saigon.
- 17) Proyek IDKD. Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K. 1980/1981, Opcit, hal. 70.

Islamiyah yang terletak di seberang ini lebih berkembang dan lebih survival dari pada Perguruan Alqadriah dan Saigoniah.

Dari kalangan pedagang-pedagang keturunan Arab, didirikan pula suatu perguruan Islam bernama Raudhatul Islamiyah di kampung Mariana (sekarang Jalan Merdeka). Perguruan ini juga berkembang terus sampai sekarang karena letaknya strategis. Perguruan Islam lainnya yang ada sampai pada masa pendudukan Jepang ialah Madrasah Abdurrahmaniah dan Sekolah Muhammadiyah (1926). Perguruan Muhammadiyah ini didirikan oleh para muballigh dari Minangkabau yang merantau ke Kalimantan Barat.

Semua sekolah swasta baik yang didirikan oleh organisasi pendidikan Barat maupun organisasi pendidikan Islam, pada masa pendudukan Jepang ditutup karena pengurus dan gurugurunya ditangkap dan dipenjarakan oleh Jepang. Bahkan banyak dihukum mati dengan jalan "disungkup" kepalanya (ditutup dengan karung).

#### d. Organisasi pendidikan nasional

Kaum pergerakan di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak tidak banyak mendirikan sekolah-sekolah, karena jumlah penduduk tidak begitu besar, sedangkan sekolah-sekolah dirasa sudah cukup banyak. Pertambahan penduduk sendiri tergolong lambat sehingga penambahan jumlah sekolah hanya akan membuat kemunduran sekolah-sekolah yang sudah ada. Hal ini kurang dikehendaki oleh kaum pergerakan.

Organisasi pergerakan nasional yang dapat mendirikan sekolah di Pontianak ialah Taman Siswa (1935). Tetapi pengaruhnya tidak begitu besar. Muridnya hanya sedikit dan biaya yang harus dipikul terlalu besar. Karena itu sekolah ini kemudian ditutup.<sup>18)</sup> Sekolah pergerakan yang termasuk mendapat pengaruh cukup besar dari masyarakat ialah Sekolah

---

18) Proyek IDKD, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K. 1980/1981, Opcit, hal. 93.

Muhammadiyah karena sifatnya lebih moderat. Sekolah ini agak berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang berdasarkan Islam, karena sistem dan kurikulum yang dipergunakan lebih mirip dengan sistem dan kurikulum sekolah-sekolah barat.

## 2. Organisasi Pendidikan Sesudah 1945

Setelah Jepang menyerah pada sekutu (1945), Kalimantan Barat kembali ke tangan pemerintahan Belanda. Sekolah-sekolah Belanda yang masih ada kembali dikelola seperti pada zaman sebelum perang. Sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah Misi atau zending dan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam yang masih ada dihidupkan kembali. Saat ini tugas organisasi-organisasi pendidikan semakin berat, karena di Kalimantan Barat umumnya mengalami krisis pemimpin. Selama masa pendudukan Jepang, pemimpin-pemimpin rakyat baik Belanda, bumiputra, Cina dan lain-lain, nyaris habis dibunuh Jepang. Guru-guru sekolah pun mengalami nasib yang sama.

Sekolah-sekolah yang dibuka kembali sesudah masa pendudukan itu tidak mempunyai tenaga guru yang cukup; demikian pula pengurus-pengurus organisasi pendidikan hampir musnah semuanya. Di lain pihak sekolah-sekolah mempunyai tugas yang berat yaitu mencukupi kekurangan tenaga-tenaga terdidik untuk memimpin daerah ini. Untuk mengatasi krisis kepemimpinan ini terpaksa didatangkan tenaga-tenaga dari luar khususnya dari Jawa dan Sumatra.

Sekolah-sekolah Belanda masih tetap berdiri. Yang ada di Pontianak pada masa itu antara lain: *Volkschool* (sekolah rakyat) berlokasi di Gang Nurali. Sekolah Dasar jenis lain yaitu *Hollands Inlandsche School* (HIS) berlokasi di Jalan Tamar, *Europesche Lagere School* (ELS) berlokasi di Jalan Rahadi Usman (Pangkalan Ferry), kemudian *Schakelschool* yaitu sekolah penghubung antara *Volkschool* dengan MULO, dan *Hollands Chinese School* (HCS) berlokasi di Kampung Bali.

Lembaga pendidikan Islam yang masih menjalankan kegiatannya antara lain: Perguruan Islamiyah di Kampung Bangka dan Raudhatul Islamiyah di Jalan Merdeka Barat dan di Kampung Mariana. Sekolah-sekolah itu harus mengubah kurikulumnya sesuai dengan kurikulum sekolah-sekolah umum dengan perbandingan 70% pendidikan umum dan 30% pendidikan keagamaan.<sup>19)</sup> Penyesuaian kurikulum itu dilakukan agar sekolah-sekolah Islam juga mampu memberikan sumbangan bagi pengisian tenaga-tenaga pemimpin yang sangat diperlukan di daerah ini.

Sekolah lanjutan pertama yang masih ada di Pontianak pada akhir tahun 1945 adalah *Rooms Katholik* (RK) MULO yang dikelola oleh Misi. Pada tahun 1950/1951 barulah pemerintah mendirikan sebuah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang sekarang dikenal dengan nama SMP Negeri I. Dengan demikian bertambahnya jumlah tenaga guru yang didatangkan dari Jawa, Sumatra serta kembalinya putra-putra Kalimantan Barat dari pengasingan, pertambahan jumlah sekolah di Pontianak semakin pesat, apalagi sesudah Kalimantan Barat bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3. Organisasi Sosial dan Keagamaan

Selain organisasi pengelola pendidikan seperti yang telah disebutkan di atas, masih ada beberapa organisasi sosial dan keagamaan lain yang perlu disebutkan dalam laporan ini. Kekacauan selama masa pendudukan Jepang sangat menyulitkan para informan untuk memberikan informasi secara lengkap. Di lain pihak memang cukup sulit untuk mendapatkan dokumen yang lengkap, apalagi dalam waktu yang relatif singkat. Dari beberapa hasil wawancara dapat dikemukakan beberapa organisasi sosial dan keagamaan sebagai berikut:

---

19) Proyek IDKD Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K. 1980/1981. *Op cit*, hal. 104.

a. Persatuan Anak Borneo (PAB)

Organisasi ini terbentuk sebagai resonansi dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Timbulnya Budi Utomo dan organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain dan yang lebih jauh kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, menjiwai timbulnya PAB itu di Pontianak. Organisasi PAB didirikan tahun 1936 yang dipelopori oleh R. Muslimun Nalaprana dan Gusti Sulung Lelanang. Tujuannya ialah menuntut Indonesia merdeka sebagaimana tuntutan kaum pergerakan di Jawa. Anggota dari organisasi ini meluas di kalangan pemuda, baik pemuda keturunan bangsawan yang telah mendapatkan pengalaman di Jawa atau Sumatera maupun dari keturunan rakyat biasa. Yang jelas bahwa anggota-anggota PAB adalah para pemuda-pelajar sebagai hasil dari *Etische Politiek*.<sup>20)</sup>

b. Hisbul Wathon (HW)

Organisasi ini juga dijiwai oleh pergerakan nasional. Hisbul Wathon mempunyai organisasi kependuan yang bernaung di dalam lingkungan keluarga besar Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah sendiri terbentuk di Kota Pontianak pada tahun 1935 dan dipelopori oleh Mohammad Rasyid. Tidak lama dari tahun terbentuknya Muhammadiyah itu, terbentuk pula Kependuan Hisbul Wathon dalam tahun 1935 itu juga. Tujuan dari organisasi ini membina dan mewakili kegiatan para Pemuda Islam sambil berda'wah Islamiyah. Anggota dari organisasi ini terutama pemuda-pemuda perantauan asal dari Sumatera Barat. Pemuda-pemuda daerah belum tertarik pada organisasi ini.

c. Badan Wakaf Raudhatul Islamiyah

Organisasi bertujuan menghimpun dana dan sumbangan umat Islam bagi keperluan pembangunan Islam. Dana umat Islam terkumpul melalui kegiatan-kegiatan zakat fitrah, zakat

---

20) Data primer, hasil wawancara (dalam bentuk daftar) isian, dengan responden.

harta, dan infaq sedekah berupa uang, bahan makanan, tanah, bangunan rumah dan benda-benda lainnya. Kekayaan dari sumbangan-sumbangan itu diterima, dikelola dan disalurkan pada kepentingan-kepentingan pembangunan terutama pembangunan dari obyek-obyek yang dikelola oleh Raudhatul Islamiyah sendiri.

#### d. Misi Katholik dan Protestan

Misi mulai memasuki daerah Kalimantan Barat pada tahun 1816 dengan tujuan menjajagi kemungkinan didirikannya Misi. Tahun 1885 Misi baru berhasil didirikan di Kalimantan Barat. Sasaran dari penggarapan Misi ini ialah penduduk yang masih berpaham animisme. Dengan kepercayaan animisme, masyarakat akan sukar menerima teknologi dan unsur-unsur kehidupan modern. Karena itu tugas pokok para misionaris di daerah pedalaman itu ialah "mengagamakan" masyarakat suku bangsa Daya. Di daerah perkotaan masyarakat suku bangsa Melayu telah menganut agama Islam sehingga tidak mungkin digarap oleh Misi. Tetapi masyarakat Cina yang menganut kepercayaan Buda (Kong Hu Cu) berangsur-angsur digarap untuk menjadi warga umat Katholik. Tugas para misionaris di kota-kota juga untuk membina kehidupan keagamaan masyarakat Belanda yang telah berdomisili tetap di daerah ini. Pembinaan umat Katholik dilakukan dengan jalan mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah untuk mendidik putra-putrinya, serta jemaat-jemaat bagi organisasi seluruh umatnya.

Sejak tahun 1905 antara lain berdiri jemaat Kapusin yang merupakan cabang dari Franciskan, kemudian jemaat Paroki, jemaat Gereja Kristen Kalimantan Barat (BKKB), jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB), jemaat Gereja Siliom dan lain-lain.<sup>21)</sup>

---

21) Proyek IDKD Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K, *Opctt*, hal. 84-85.

#### 4. Organisasi Sosial Pada Masa Pendudukan Jepang

Dalam masa pendudukan Jepang hampir-hampir tidak ada kesempatan bagi masyarakat untuk berorganisasi, apalagi untuk membentuk organisasi yang baru. Sedangkan organisasi yang sudah ada pun harus dibubarkan. Pengawasan militer sangat ketat. Para pastur, bruder, suster, pendeta, imam dan lain-lain ditangkap, lalu dipenjarakan atau dibuang. Semua organisasi Misi dan gereja ditutup. Rakyat dilarang mengadakan perkumpulan-perkumpulan. Umat Islam yang selesai melakukan sholat pun harus bubar dan dilarang berkumpul. Mereka tidak berani melanggar larangan itu karena hukumannya sangat berat yaitu ditembak atau dipancung lehernya. Lebih-lebih setelah terbongkar adanya indikasi gerakan menentang Jepang, maka siapa pun yang dicurigai "disungkup" (diculik dan dibunuh). Dengan demikian maka kaum pergerakan, pemimpin-pemimpin masyarakat, tokoh-tokoh agama dan lain-lain satu-persatu disungkup sehingga nyaris habis kecuali yang diperlukan tenaganya untuk rodi. Semua dokumen dan arsip-arsip diobrak-abrik, disita dan dimusnahkan.

Jepang berusaha menjepangkan rakyat Kalimantan Barat dengan membina generasi anak-anak sesuai dengan nilai kepercayaan. Generasi di atas anak-anak harus dihabiskan karena dianggap akan menghalangi tercapainya tujuan itu. Janda dan perawan-perawan dijadikan gundik-gundik tentara. Di mana pun diberlakukan hukum perang; sementara itu hukum agama tidak laku sama sekali.

Tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin serta pemuda-pemuda yang ingin selamat harus melarikan diri ke Jawa atau ke Sumatra dengan mempergunakan perahu-perahu dan rakit-rakit seadanya. Sudah tentu keselamatannya di laut juga rawan. Jepang di Jawa dan Sumatra tidak sekejap Jepang di Kalimantan, karena angkatan perang yang berbeda. Kalimantan dikuasai oleh Angkatan Laut (*Kaigun*) sedangkan Jawa dan Sumatra dikuasai oleh Angkatan Darat (*Rikugun*).

Bentuk organisasi yang boleh ada hanyalah organisasi kesenian dan olah raga. Di Pontianak ada sebuah perkumpulan kesenian bernama "Timur"; suatu nama yang cukup disenangi Jepang. Tokoh-tokohnya dari kalangan putra-putra bangsawan, tetapi kemudian juga harus berantakan karena ditinggalkan lari oleh para pembinanya. Para pembina organisasi kesenian "Timur" itu menyingkir ke Jawa dan mengembara dari satu kota ke kota lain sambil tetap memelihara organisasi dan kegiatannya. Bom di Hiroshima dan Nagasakilah yang mengakhiri petualangan Jepang di Kalimantan Barat.

#### f. Organisasi sosial sesudah pendudukan Jepang

Pada masa ini organisasi-organisasi sosial di Pontianak boleh dikatakan kehilangan mesinnya. Tenaga penggerak yang masih ada berusaha untuk merehabilitasi organisasinya untuk bergerak kembali, terutama dalam bidang pendidikan. Sekolah-sekolah sangat perlu digerakkan kembali untuk melahirkan tenaga-tenaga terdidik yang sangat diperlukan untuk membenahi kembali daerah ini. Dengan kembalinya putra-putra Kalimantan Barat dari pengungsian, organisasi-organisasi ini berkembang kembali meskipun masih harus tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh kaum penjajah *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA).

Organisasi-organisasi yang masih ada selain yang dipelopori oleh pemerintah, antara lain Misi, jemaat-jemaat gereja, badan wakaf Raudhatul Islamiyah, dari Perguruan Islamiyah. Lembaga-lembaga ini diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dan melakukan kegiatannya kembali.

## D. KEHIDUPAN EKONOMI

### 1. Mata Pencarian

Sampai tahun 1912, Pontianak masih merupakan kompleks perkampungan dengan titik pusat simpang tiga Sungai Kapuas. Bentuk kehidupan kota baru merupakan embrionya saja, yaitu

dengan adanya sebuah pelabuhan sungai sebagai tempat keluar-masuknya barang dari dan ke luar Kalimantan Barat. Luas wilayah kesultanan pada masa itu sampai ke Kecamatan-kecamatan Jungkat, Sungai Ambawang, Sungai Raya, dan Sungai Kakap yang sekarang kita kenal sebagai kecamatan-kecamatan yang berdiri sendiri. Wilayahnya sangat luas dengan jumlah penduduk yang relatif kecil. Karena itu areal untuk melakukan usaha tani masih cukup luas. Sementara sebagian besar wilayah itu justru masih berhutan lebat.

#### a. Pertanian

Pertanian merupakan mata pencaharian pokok penduduk. Bidang pertanian meliputi pertanian pangan, antara lain: padi-padian, ubi-ubian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Pertanian pangan berupa sawah tadah hujan dengan sekali musim tanam dalam satu tahun. Pertanian padi rata-rata dilakukan di antara kebun-kebun kelapa. Hasilnya memang tidak begitu memuaskan karena pengolahan tanahnya dilakukan secara sederhana.

Semak-semak di antara pohon-pohon kelapa itu dibersihkan. Tujuannya untuk menyiangi atau merumput kebun kelapa. Tetapi setelah nampak terbuka, penduduk memanfaatkannya sebagai lahan usaha pertanian padi. Dengan cara ini kebun kelapa menjadi bersih sehingga hasilnya menjadi lebih baik, mudah dalam memungut buah-buahan kelapa dan petani mendapat tambahan berupa hasil padi.

Kemampuan bertani ini sangat tergantung pada besar kecilnya jumlah tenaga dalam setiap keluarga karena pengolahan tanah semata-mata hanya dilakukan oleh tenaga manusia. Sistem upah belum dikenal karena daerah itu sangat kekurangan tenaga. Karena itu kedatangan tenaga kerja dari luar daerah selalu diterima dengan baik dan diberi wilayah hutan untuk dibuka menjadi perkampungan dan persawahan.

Pertanian padi diusahakan di sepanjang daerah pantai seperti daerah Jungkat, Sungai Raya, Sungai Kubu dan sekitarnya. Daerah yang lebih ke pedalaman belum cocok untuk tanaman kelapa dan tanaman padi. Daerah yang lebih ke pedalaman umumnya ditanami ubi-ubian, bahkan juga sagu, pisang dan lain-lain.

Tanaman sagu selain dapat menghasilkan tepung sagu sebagai makanan selingan, juga untuk makanan hewan seperti ayam, itik dan babi. Kulit batang sagu dapat dipergunakan untuk dinding rumah setelah dikeringkan lebih dahulu. Daun sagu dipergunakan untuk membuat atap rumah yang dikenal dengan atap daun.

Persawahan secara khusus boleh dikatakan belum ada karena pertanian yang hanya sekali musim tanam dalam satu tahun itu dipandang terlalu merugikan. Selama musim bera, rumput akan cepat pertumbuhannya sehingga memerlukan banyak tenaga untuk menebasnya. Di lain pihak jumlah tenaga kerja pada masa itu sangat kurang, sehingga persawahan terbuka itu dipandang kurang efisien. Perladangan di antara kebun kelapa dianggap lebih menguntungkan karena pembabatan rumput untuk perladangan berfungsi pula sebagai penyiangan kebun kelapa.

Padi hasil panen kemudian diirig menjadi gabah dan disimpan ke dalam lumbung setelah dikeringkan lebih dahulu. Untuk menjadikan beras, padi itu digiling dengan penggilingan yang diputar dengan tangan. Penduduk setempat menamakan pekerjaan ini dengan istilah "kisar", mengisar atau dikisar. Beras yang dihasilkan tidak dapat berwarna putih bersih karena tidak dapat terlepas dari dedak atau bekatulnya. Beras ini tidak diperdagangkan; hanya untuk keperluan keluarga saja. Beras yang ada di pasar didatangkan dari luar daerah yaitu dari Jawa atau Sulawesi. Pada masa pendudukan Jepang bentuk persawahan itu baru mulai dirintis untuk memperluas areal tanaman padi.

Areal persawahan ini dicetak dengan menebangi kebun-kebun kelapa, terutama kebun yang telah tua dan kurang produktif lagi.

Pada masa perang produksi tanaman keras itu kurang mendapat pemasaran sehingga harganya sangat rendah. Di lain pihak kebun yang telah tua harus diremajakan dengan menebang lebih dahulu. Sambil menunggu sampai dapat ditanami kelapa kembali, penduduk memanfaatkannya untuk persawahan padi. Bentuk persawahan masih bersifat tadah hujan atau pasang surut.

Pemerintah pendudukan Jepang mengharuskan penduduk Kota Pontianak untuk bertani, menanam apa saja yang hasilnya dapat dikonsumsi. Dengan demikian ekonomi daerah perang itu dapat survival.

#### b. Hortikultura

Tanaman sejenis buah-buahan cukup banyak jenisnya. Rambutan, durian, duku, langsung, rambai, cempedak, nangka, berbagai jenis jambu dan lain-lain tumbuh dengan subur di mana-mana. Pada musim buah-buahan hasilnya cukup melimpah. Hasil buah-buahan itu hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dibagikan kepada sanak famili. Tetapi setiap rumah-tangga boleh dikatakan memiliki tanaman-tanaman hortikultura itu.

Sistem transportasi dan pemasaran pada masa itu tidak memungkinkan untuk memasarkan buah-buahan. Usaha pengawetannya juga belum dapat dilaksanakan. Karena itu sebagian dari buah-buahan yang masak dibiarkan begitu saja menjadi mangsa binatang-binatang.

Pada masa pendudukan Jepang, tanaman hortikultura itu juga tidak dapat dikembangkan. Pemasaran hasil buah-buahan tidak dapat dilakukan karena belum dikenal sistem pengawetannya.

### c. Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang tergolong tua di daerah Pontianak dan sekitarnya ialah kelapa dan lada. Tanaman kelapa diperkebunkan di daerah tepi pantai, sedangkan kebun lada diusahakan orang di daerah agak ke hulu. Kota Pontianak sendiri tidak banyak menghasilkan kelapa, apalagi lada. Tanaman ekspor itu banyak diperkebunan di daerah luar kota, sedangkan Pontianak merupakan pelabuhan ekspornya.

Jarak tanaman pohon kelapa sekurang-kurangnya 5 meter sehingga di antara pohon-pohon itu ada jarak yang cukup luas. Antara tanaman-tanaman itu ditumbuhi rerumputan dan semak-semak. Semak-semak itu harus dibersihkan secara rutin agar produksinya lebih baik. Di samping itu semak-semak juga tidak menjadi sarang binatang buas terutama ular. Dengan dibersihkannya kebun kelapa dari rerumputan dan semak-semak, nampaklah areal yang lapang yang dimanfaatkan oleh penduduk sebagai lahan perladangan.

Hasil kelapa diambil setiap dua atau tiga bulan sekali. Pemilik kebun biasanya menyerahkan pemeliharaan kebunnya kepada orang tertentu. Hasil kelapa atau hasil padi dibagi antara pemilik dan pemelihara. Pemelihara biasanya mendirikan pondoknya dalam kebun itu pula. Pemilik kebun mungkin tidak bertempat tinggal di situ.

Sesudah dipanen, kelapa dibuat kopra dengan jalan menjemur atau mengasapinya. Sesudah menjadi kopra barulah dijual kepada pedagang kopra untuk diekspor atau dikilang secara lokal. Uang hasil penjualan ini dibagi antara pemilik dan pemeliharanya.

Petani yang hanya memiliki kebun sedikit dan tidak mungkin untuk memproses sendiri menjadi kopra dapat menjual kelapanya kepada pedagang pengumpul atau pada tengkulak. Pedagang pengumpul itulah yang memproses kelapa menjadi kopra.

Untuk mengangkut kelapa dari kebun ke tempat pengupasan dilakukan dengan jalan merakit. Kelapa diuntai satu sama lain dengan sobekan-sobekan kulitnya, kemudian dihanyutkan ke parit atau sungai. Pengangkutan tinggal menunggu saja di tempat yang mungkin menjadi pemberhentian kelapa-kelapa itu. Karena itu setiap kebun kelapa dibatasi dengan parit-parit yang memungkinkan untuk merakit kelapa.

Pedagang kopra belum pasti memiliki uang kontan yang cukup sehingga para petani seringkali harus menjualnya secara kredit. Apalagi pada waktu pasaran kopra menurun, petani mengalami kesulitan dalam penjualan kopranya. Petani seringkali harus menunggu berbulan-bulan untuk menunggu melunaskan penjualan kopranya. Pedagang pengumpul kopra rata-rata orang Cina yang biasanya mempunyai hubungan dagang dengan Singapura atau Hongkong.

Pada masa pendudukan Jepang, kopra sulit dipasarkan. Harga kopra menjadi rendah. Sementara kebun kelapa sudah mulai menua dan produksinya berkurang. Di lain pihak pemerintah pendudukan membentuk ekonomi perang di mana setiap daerah harus dapat survival dengan produksi lokal. Karena keadaan demikian para petani kelapa mengubah kebun kelapanya menjadi areal persawahan. Pohon-pohon kelapa itu ditebang, batangnya dibusukkan, dibakar atau untuk menimbun jalan becek, membuat jembatan darurat dan lain-lain. Ada pula petani yang menebangi kebun kelapanya dengan tujuan untuk peremajaan. Sementara menunggu waktu dapat ditanami kembali, dipergunakanlah lahan itu untuk persawahan. Sawah-sawah bersifat tadah hujan atau pasang surut.

Tanaman karet baru dikenal oleh penduduk Pontianak dan sekitarnya pada tahun 1920. Tanaman ini berasal dari Singapura. Seorang pedagang asal Banjarmasin bernama Muhammad Yusuf dikenal oleh penduduk Pontianak sebagai orang yang berjasa memperkenalkan jenis tanaman perkebunan ini kepada masyarakat. Muhammad Yusuf diperkenankan oleh sultan

Pontianak mendirikan perkampungan baru di daerah hulu kompleks Kraton Pontianak. Pekerjaan sehari-hari Muhammad Yusuf ialah berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Pelayarannya sampai di Malaya, Singapura, dan Vietnam.

Dari pelayarannya itu selain berhasil membawa bibit karet ke Pontianak, juga berhasil mempersunting putri untuk dijadikan istrinya. Dari keberhasilan ini ia dikenal penduduk dengan nama Muhammad Yusuf Saigon dan kampung yang ia dirikan kemudian dikenal dengan nama Kampung Saigon.<sup>22)</sup>

Tanaman karet hidup subur di daerah Kalimantan Barat. Tanaman itu cepat berkembang dan menghasilkan getah yang cukup baik. Karena itu tanaman karet cepat berkembang menjadi tanaman perkebunan. Dari hasil karet ini perekonomian penduduk berkembang sangat pesat. Pertumbuhan kota juga berlangsung lebih cepat dari masa sebelumnya. Atas jasa-jasanya itu Haji Muhammad Yusuf Saigon mendapat bintang jasa dari Ratu Wilhelmina dari Kerajaan Belanda. Bintang jasa ini diterimanya pada tahun 1928.

Untuk dapat melipatgandakan hasil tanaman ekspor tersebut Pemerintah Belanda pada tahun 1935 memberi subsidi kepada setiap petani karet. Subsidi diterima petani setiap bulan. Dari subsidi ini petani karet mendapat dua keuntungan yaitu penjualan karet dan uang subsidi. Penduduk Kalimantan Barat umumnya mengenal subsidi tersebut dengan istilah "kopon" atau kupon. Produksi karet menjadi semakin besar, dan perdagangan melalui Pontianak bertambah ramai karena kapal-kapal datang yang keluar masuk. Dampak positifnya ialah pembangunan dan perkembangan Kota Pontianak menjadi sangat pesat.

Pada zaman pendudukan Jepang, perekonomian kota dikatakan macet total. Kota Pontianak diduduki Jepang sejak tanggal 19 Desember 1941 sampai bulan September 1945<sup>23)</sup> Dalam kurun waktu itu daerah Kalimantan Barat di-

22) Hasil wawancara dengan Haji Hasan Basri.

23) M. Yanis, *Kapal Terbang Sembilan*, Opcit. hal . . .

isolasi dari daerah lain. Pasaran Pontianak menjadi sepi. Barang-barang konsumsi bahkan pakaian, minyak bakar, gula dan lain-lain datangnya sangat langka. Toko-toko Cina boleh dikatakan kosong; tidak ada barang dagangan. Barang-barang dagangan yang sekali-kali datang dari Jawa dijual dengan sistem jatah. Para pembeli harus antri untuk memperoleh barang-barang belanja yang diperlukan. Seringkali pembeli yang antri di belakang dikecewakan karena habisnya barang yang akan dibelinya sebelum sampai gilirannya.

Penghidupan rakyat menjadi resah karena sulitnya mendapatkan barang-barang yang diperlukan. Jepang sendiri merasa sangat khawatir akan keselamatan rakyat dari bahaya kelaparan. Jepang membentuk ekonomi perang untuk mengatasi kemelut ini. Penduduk dikerahkan untuk bertani menanam tanam-tanaman yang hasilnya dapat dikonsumsi. Buruh, petani, pedagang, dan petani sendiri harus menanam kebun halaman rumahnya dengan tanaman konsumsi. Hasilnya memang cukup lumayan walaupun belum mampu menyehatkan kembali perekonomian kota. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang masih relatif kecil. Ubi-ubian, padi-padian, dan sayur-sayuran yang dihasilkan dapat memenuhi keperluan sendiri, tetapi barang-barang yang tidak diproduksi secara lokal, sangat sulit diharapkan.

Sesudah Jepang menyerah, perekonomian Kota Pontianak pulih kembali karena lalu lintas laut menjadi aman kembali. Kapal-kapal dagang dari Jawa, Sumatera, Singapura mulai berdatangan kembali walaupun relatif masih langka. Di daerah lain barang-barang konsumsi itu tersedianya juga masih cukup langka karena mengalami bumi hangus. Pada awal zaman kemerdekaan, pusat pemerintahan berada di Banjarmasin. Pontianak menjadi ibukota daerah istimewa dan berfungsi sebagai kordinator daerah-daerah swapraja dan neo-swapraja. Hubungan dengan daerah luar banyak tergantung pada Banjarmasin. Ke Pelabuhan Pontianak diharapkan dapat dimasukkan barang-barang konsumsi, sandang, dan bahan bakar. Sebaliknya

dari Pontianak dapat diekspor karet, kopra, lada, kayu, hasil hutan dan lain-lain. Sampai pada tahun 1950, ekonomi perang masih cukup dirasakan di Pontianak.

Menurut para informan, secara garis besar korelasi antara golongan penduduk dengan mata pencaharian di Kota Pontianak dari tahun 1900 sampai tahun 1950 dapat digambarkan seperti pasangan di bawah ini (perubahan kekuasaan tidak banyak mempengaruhi korelasi).<sup>24)</sup>

No. Mata Pencaharian	Suku Bangsa
1. Pertanian/Perkebunan	Jawa, Madura, Melayu, Cina
2. Perdagangan/Perusahaan	Cina, Arab, Bugis, Melayu, India, Padang
3. Pegawai Negeri	Jawa, Melayu, Sunda
4. Angkatan Bersenjata	Jawa, Ambon, Batak, Manado
5. Pengrajin	Cina, Melayu, Bugis
6. Guru	Padang, Melayu
7. Tukang	Melayu, Cina
8. Jasa	Cina, Jawa
9. Buruh	Melayu, Cina

Cina hampir menduduki semua sektor penghidupan kecuali sektor pegawai negeri dan Angkatan Bersenjata. Sifat Cina tidak mau banyak terikat. Keterikatan dikatakan ibarat kerbau dicocok hidung. Mereka ingin bekerja secara bebas dan tidak ingin terikat sebagai pegawai negeri/ABRI.

## 2. Perdagangan

Pantai Kalimantan Barat terletak di jalur lalu-lintas pelayaran internasional yang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan pusat-pusat perdagangan dunia seperti Malaya, Singapura dan Hongkong. Sejak abad ke-13 pantai ini telah didatangi oleh pelaut-pelaut asing yang di antaranya kemudian menetap

24) Disarikan dari daftar isian oleh para responden.

di Kalimantan Barat. Mereka yang menetap itu ialah dari tentara Tar-Tar, anak buah Laksamana Cheng Ho dari Cina, Syech Husin dari tanah Arab, Opu Daeng Manambun dari Kerajaan Bugis dan lain-lain.

Kerajaan-kerajaan di pantai Kalimantan Barat sendiri memang sudah sejak dahulu membuka hubungan internasional dengan negara-negara tetangga seperti Kerajaan Tanjungpura yang pada pertengahan abad ke-16 mengundang tamu-tamu dari Kerajaan Banjar, Brunai, Malaka, Majapahit, Inggeris, Portugis, Kamboja, Johor, Riau, Palembang, Makasar dan lain-lain untuk menghadiri upacara penobatan Sultan Syarif Hassan.<sup>25)</sup> Sedangkan Kerajaan Mempawah dan Sambas sudah membuka hubungan dengan Cina dan Brunai. Dengan demikian maka perkembangan Kota Pontianak sebagai kota kerajaan terakhir di Kalimantan Barat menjadi kota perdagangan telah dirintis sejak lama.

Para pelaut asing yang kemudian menetap di Kalimantan Barat mempunyai orientasi dengan negeri asalnya. Ini untuk menunjukkan hubungan yang mudah dalam perdagangan internasional. Hasil bumi Kalimantan Barat memang cukup laris di pasaran internasional seperti lada, kopra, karet, hasil hutan, dan lain-lain. Emas juga diperdagangkan. Di lain pihak daerah Kalimantan Barat sendiri tidak menghasilkan barang-barang konsumsi yang cukup untuk keperluan penduduknya. Beras, gula, minyak bakar, tekstil dan lain-lain harus didatangkan dari daerah lain untuk keperluan penduduk. Hal ini merupakan peluang bagi para pedagang dari dalam maupun dari luar daerah sehingga perkembangan Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan di daerah Kalimantan Barat akan berlangsung dengan pesat.

Karet, kopra, lada, dan hasil hutan diekspor ke Singapura, Hongkong, Belanda, Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain

---

25) Yu Lontaan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumi Restu, Jakarta, 1975. hal. 84.

melalui Pelabuhan Pontianak. Sebaliknya kapal-kapal dagang datang membawa barang-barang konsumsi, pakaian, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Pada masa itu dianut sistem perdagangan bebas. Penduduk bebas menjual barang-barang produksinya ke mana saja. Malaya, Singapura dan Hongkong jaraknya lebih dekat dan di pasaran negara-negara itu harga produksi Kalimantan Barat lebih baik dari pada harga di wilayah Nusantara sendiri. Alat-alat pembayarannya tidak mengikat, apakah dengan uang Inggris, uang Belanda, uang Singapura dan lain-lain dapat dan boleh beredar di Kalimantan Barat, sehingga memudahkan bagi perdagangan internasional.

Tumbuhnya Pontianak menjadi kota dagang sudah mulai sejak dibukanya daerah sebelah selatan Sungai Kapuas oleh Asisten Residen Belanda Willem Ardi Polm pada tahun 1779. Daerah sebelah selatan Sungai Kapuas ini menjadi inti kedua dari perkembangan kota. Di daerah sebelah selatan Sungai Kapuas terdapat fasilitas perkantoran gubernemen yang kondisi fisiknya lebih baik dari pada daerah sebelah utara (timur). Daerah selatan kemudian juga dikembangkan oleh orang-orang Cina menjadi daerah perdagangan.

Orang-orang Cina mula-mula mendiami daerah pertambangan emas di Mandor, Montrado dan Budog yang berada dalam wilayah Kerajaan Sambas dan Mempawah. Tambang emas telah mengering dan orang-orang Cina mengalihkan usahanya di bidang lain seperti pertanian dan perdagangan. Kota Pontianak yang baru didirikan dipandang oleh orang-orang Cina akan menguntungkan bidang usaha dagangnya sehingga secara bertahap mereka pindah ke kota yang baru ini.

Orang-orang Cina mempunyai banyak pengalaman dan banyak hubungan dengan pedagang-pedagang di Asia seperti Malaya, Singapura, Hongkong, Makau dan lain-lain yang merupakan kota-kota datang internasional. Orang-orang Cina juga menarik orang-orang Cina yang ada di Singapura, Hongkong, Taiwan dan lain-lain untuk berdagang atau pindah ke

Pontianak. Di lain pihak, Opu Daeng Manambun, dan Panembahan Mempawah asal Bugis merupakan penunjuk jalan bagi pelaut dan pedagang bangsa Bugis untuk berdagang antara Makasar dan Pontianak. Demikian juga pedagang-pedagang dari Negeri Arab dan Belanda telah mempunyai pioner yang menjadi penguasa di Pontianak sehingga mereka juga akan mempergunakan kesempatan itu untuk keperluan perdagangan. Kondisi fisik dan sosial seperti ini membawa banyak kemajuan bagi perkembangan Kota Pontianak menjadi kota datang dan kota pelabuhan yang ramai. Dari kondisi sosial tersebut dapat dipahami mengapa bidang perdagangan kota ini lebih banyak dikendalikan oleh penduduk pendatang terutama orang-orang Cina, karena golongan ini semula lebih menguasai pasaran internasional. Sistem perdagangan bebas yang dianut pada waktu itu lebih memberi kesempatan bagi orang-orang Cina untuk mendominasi bidang perniagaan kota ini.

Perkembangan yang lebih pesat bagi perdagangan Kota Pontianak terjadi sesudah tahun 1930, karena bertambahnya komoditi Kalimantan Barat yang sangat laku di pasaran internasional. Tanaman karet yang diintroduksi oleh Haji Muhammad Yusup Saigon itu tumbuh dan memproduksi secara memuaskan. Bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perkaretan di Kalimantan Barat, dunia teknologi dan transportasi sedang memerlukan bahan-bahan yang terbuat dari karet. Sementara bahan pengganti untuk karet belum didapatkan. Karet alam masih merupakan satu-satunya bahan mentah yang sangat diperlukan untuk memproduksi bahan-bahan yang diperlukan untuk teknologi dan transportasi tersebut. Pada tahun 1938 Pemerintah Belanda memberi subsidi kepada rakyat Kalimantan Barat untuk melipatgandakan tanaman dan produksi karet karena sangat pentingnya komoditi itu bagi pasaran dunia. Dengan subsidi itu maka bidang perdagangan kota ini maju dengan pesatnya karena semakin meningkatnya barang-barang ekspor maupun impor melalui Pelabuhan Pontianak.

Perdagangan antar pulau juga cukup maju. Pelayaran antar Pelabuhan Pontianak dengan Jakarta, Ketapang, Semarang, Banjarmasin dan Makasar cukup ramai. Kopra, lada dan hasil-hasil hutan diangkut oleh pelayaran Nusantara. Sebaliknya dimasukkan pula barang-barang konsumsi ke Pelabuhan Pontianak. Kehidupan masyarakat cukup makmur sehingga menarik imigrasi untuk pindah ke Kalimantan Barat. Di lain pihak, daerah ini memang memerlukan banyak tenaga pengelola kekayaan alam. Penguasa daerah ini (sultan) membiarkan penduduk luar daerah pindah ke daerah ini dan diberi izin untuk membuka hutan dan mendirikan perkampungan. Terjadilah heterogenitas penduduk seperti apa yang kita lihat sekarang ini.

Pada masa pendudukan Jepang dari (tahun 1941 sampai tahun 1945), keadaannya sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Sejak bulan Desember 1941 pelayaran menjadi sepi. Kapal dan perahu tidak berani berlayar karena keamanan laut sangat terganggu. Pontianak diisolasi dari luar. Barang-barang konsumsi seperti garam, gula, minyak bakar, pakaian dan lain-lain tidak masuk ke Pelabuhan Pontianak. Sebaliknya produksi lokal tidak dapat dikapalkan. Kapal-kapal asing tidak berani datang dan kapal Jepang sendiri juga terancam keselamatan pelayarannya. Ekonomi rakyat sangat sulit. Karet dan kopra tidak lagi memberi jaminan bagi kemajuan. Di lain pihak jenis tanaman itu juga sudah mulai tua dan produksinya sudah menurun.

Jepang sendiri sudah mulai khawatir akan keselamatan penduduk dari bahaya kelaparan. Maka dibentuklah ekonomi perang. Pertanian pangan digalakkan. Penduduk dikerahkan untuk bertani menanam tumbuh-tumbuhan yang hasilnya dapat dikonsumsi. Pedagang, buruh, pengrajin dan petani sendiri harus bertani. Jepang juga mengajarkan cara-cara membudidayakan potensi lokal seperti cara-cara membuat garam, membuat sabun, membuat pakaian dari kulit kayu, mempergunakan minyak kelapa untuk bahan bakar dan lain-lain.

Perkembangan ekonomi perang itu membawa akibat rusaknya potensi alam yang pada zaman sebelumnya telah memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kebun karet, kebun kelapa, hutan ditebang karena hasilnya hampir tidak laku dijual. Bekas kebun ini dijadikan areal pertanian untuk menanam barang-barang konsumsi. Kayunya dipergunakan sebagai bahan bakar dalam pembuatan garam dan sabun dan sebagian dipergunakan menembok pembuatan jalan.

Dalam hal bahan pangan tidak ada kesulitan. Produksi pangan cukup dan kehidupan rakyat boleh dikatakan makmur. Tetapi dalam hal mencukupi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, rakyat sangat menderita. Keperluan akan gula, garam, bumbu, minyak bakar, pakaian dan lain-lain masih harus didatangkan dari luar daerah. Untuk memenuhi kebutuhan ini sangat tergantung pada pelayaran antar pulau yang banyak dilakukan oleh suku Bugis, suku Madura, Banjar juga suku Melayu sendiri.

Pelayaran lokal dilindungi oleh aturan perang. Tetapi para pelaut juga tidak dapat berlayar secara bebas. Selain izin yang terbatas, keberanian mereka di lautan juga sangat kecil. Pesawat dan kapal pengintai selalu siap membinasakannya di tengah lautan. Bahaya dapat saja datang sewaktu-waktu. Karena itu datangnya kapal-kapal ke Pelabuhan Pontianak sangat tidak menentu. Pelaut-pelaut berani berlayar jika kapal dan perahunya tidak sendirian di tengah laut. Maka datangnya ke Pelabuhan Pontianak juga terjadi secara sporadis.<sup>26)</sup>

Lalu lintas laut paling ramai ialah antara Pelabuhan Ketapang dan Tanjungperak, Semarang dan Pangkalan Bun di Kalimantan Selatan. Dari Ketapang pelayaran dilanjutkan ke Pontianak. Rute ini merupakan jalur-jalur pendek sehingga rasanya lebih aman. Pada saat perahu-perahu datang, barang-

---

26) Hasil wawancara dengan Syarif Yusuf Alqadrie.

barang konsumsi cukup tersedia. Tetapi kapasitas angkut perahu-perahu sangat terbatas sehingga barang-barang tersebut perlu dihemat untuk dikonsumsi. Azas sama rata sama rasa mulai dikenal penduduk. Punya uang banyak pun tidak diperbolehkan membeli barang melebihi keperluan hari ini. Barang-barang diperoleh dengan jalan antri sekalipun membeli. Antri beras, antri gula, antri minyak, antri garam, antri ubi, antri sayur, antri ikan, antri pakaian dan lain-lain. Kehidupan antri harus sama rasa. Jika ada yang berani menerobos mendapat buah tangan atau tampar dari pengawas. Suasana begini mengajari penduduk untuk rajin bekerja dan bertindak. Selesai sembahyang subuh segera mereka menuju ke pasar untuk antri membeli barang-barang bagi keperluan hari ini.

Dalam masa perang bidang perdagangan boleh dikatakan macet dan barang-barang dagangan tidak tersedia secara tetap. Bila ada barang dagangan distribusinya kepada konsumen tidak dilakukan oleh pedagang, tetapi dilakukan oleh satuan-satuan tugas yang dibentuk oleh penguasa. Ini dimaksudkan untuk lebih pemeratakan distribusi secara intensif karena terbatasnya jumlah barang yang diperlukan. Sementara itu pihak jumlah konsumen relatif tetap.

Pelayaran internasional oleh kapal-kapal asing tidak mudah memasuki Pelabuhan Pontianak karena keamanan laut yang sangat rawan. Kapal-kapal dagang yang dapat lebih bebas memasuki Pelabuhan Pontianak ialah perahu-perahu pelayaran Nusantara terutama perahu-perahu Bugis dan Madura. Rute yang ditempuh ialah melalui Pelabuhan Ketapang lebih dahulu dari atau ke Semarang, Banjar, Surabaya, Makasar dan lain-lain. Pelayaran merupakan armada untuk menghilangkan rasa takut jika mereka berada di laut lepas. Karena itu sekali masuk Pelabuhan Pontianak jumlahnya cukup banyak, tetapi pada waktu kapal tidak masuk, barang-barang di pasaran Pontianak juga cukup langka.

Sesudah masa pendudukan Jepang, perdagangan kembali normal. Kapal-kapal luar negeri telah mulai keluar masuk Pe-

labuhan Pontianak. Demikian juga kapal Nusantara telah dapat berlayar bebas. Orang-orang Cina kembali berfungsi sebagai pedagang perantara. Hubungan perdagangan dengan Malaya, Singapura, Hongkong, Makau dan lain-lain mulai normal, tetapi barang-barang ekspor Kalimantan Barat belum mendapat pasaran yang normal karena produksi internasional belum pulih. Di lain pihak tanaman kelapa dan karet mengalami banyak kerusakan karena perang dan karena dimakan umur. Dengan demikian kehidupan ekonomi rakyat Pontianak khususnya mengalami penurunan.

### 3. Jaringan Pasar

Antara tahun 1900 sampai dengan tahun 1941 di Pontianak terdapat dua kekuasaan pemerintahan, yaitu pemerintahan raja-raja dan pemerintahan kolonial Belanda. Kedua pemerintahan ini menjalin satu hubungan kerjasama untuk mengatur pemerintahan bersama dalam bentuk perjanjian yang dikenal dengan *Corte Verclaring* pada tahun 1914<sup>27)</sup>

Pada tahun 1779 sultan pertama dari Kerajaan Pontianak telah membuat suatu perjanjian dengan VOC. Isinya yang menyangkut bidang perdagangan antara lain:

1. Sultan Pontianak mengakui berlakunya uang Belanda di wilayah Kerajaan Pontianak. Dalam surat perjanjian disebutkan bahwa semua uang yang berlaku di Betawi berlaku pula di wilayah Kerajaan Pontianak dengan nilai sama.
2. Intan, merica dan hasil hutan dimonopoli oleh VOC. Sebaliknya OVC menjual beras dan garam kepada sultan dengan harga yang patut.
3. Kapal-kapal asing yang tidak mendapat izin VOC dilarang memasuki perairan Kalimantan Barat, antara lain kapal-kapal dari Eropa, Cina dan Johor.<sup>28)</sup>

---

27) Hasil wawancara dengan Syarif Yusuf Alqadrie.

28) Foto kopi naskah asli perjanjian tertulis antara Sultan Pontianak dengan VOC. Naskah asli tertulis dengan huruf Arab Melayu dan Huruf Latin.

Perdagangan untuk barang-barang tertentu dimonopoli oleh VOC. Tidak disebutkan dalam perjanjian monopoli itu perdagangan kopra yang menjadi hasil utama daerah Kalimantan Barat. Tentu saja hasil karet yang baru diproduksi sesudah tahun 1900 belum atau tidak disebutkan dalam perjanjian monopoli itu. Karena itu komoditi ini diperdagangkan secara bebas.

Jaringan perdagangan bebas adalah ke Singapura, Johor dan Hongkong, walaupun harus mempergunakan kapal-kapal Belanda. Orang-orang Cina menjadi pedagang perantara baik terhadap barang-barang perdagangan bebas atau barang-barang yang dimonopoli VOC. Pasar Pontianak menjadi pusat pemasaran barang-barang untuk diekspor maupun barang-barang dari luar daerah yang diperlukan penduduk baik untuk daerah dalam kota maupun untuk daerah-daerah perhuluan.

Dengan sistem monopoli dan setengah monopoli ini jaringan pemasaran menjadi lebih pendek. Sultan dan keluarganya dapat langsung menjual dan membeli kepada Kompeni. Tetapi para pedagang perantara ini masih memiliki kebebasan dalam memperdagangkan barang-barang yang tidak dimonopoli oleh VOC. Sistem pemasaran juga tidak disentralisasi oleh VOC di Batavia, tetapi dapat langsung berhubungan dengan negara-negara ekspor atau impor baik yang ada di Asia atau Eropa.

Alat pembayaran juga berlaku secara bebas. Dalam perjanjian hanya disebutkan bahwa VOC meminta agar uang yang berlaku di Batavia juga berlaku di wilayah Kerajaan Pontianak. Ini berarti bahwa alat pembayaran lain seperti ringgit, dolar dapat diterima di wilayah Kerajaan Pontianak. Dengan alat-alat pembayaran ini maka sistem perdagangan internasional dapat lebih mudah berkembang.

Dalam zaman pendudukan Jepang, perdagangan hampir mengalami kemacetan total. Jaringan pemasaran tidak dikuasai oleh para pedagang perantara, tetapi dipegang oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan.

Dengan demikian jaringan pemasaran berlangsung lebih pendek dan keluar masuknya barang dari dan ke Pelabuhan Pontianak dilakukan oleh armada dalam negeri, terutama oleh perahu-perahu Banjar dan Bugis. Dengan demikian jaringan pemasaran di Kota Pontianak dikuasai oleh pedagang pribumi. Komoditi ekspor kurang mendapat pasaran dan tanaman yang menghasilkan komoditi ini kurang terpelihara oleh petani.

Sesudah perang, Kalimantan Barat dikuasai oleh Pemerintah NICA. Perdagangan kembali normal. Kapal-kapal dagang boleh memasuki Pelabuhan Pontianak dan di lain pihak sistem monopoli tidak dilaksanakan lagi. Pedagang-pedagang Cina kembali berfungsi sebagai pedagang perantara yang menguasai pasaran. Namun demikian keadaan yang belum menentu itu tidak mampu mengembalikan ekonomi dan pemasaran seperti keadaan sebelum perang.

### BAB III

## ORANG-ORANG CINA DI KALIMANTAN BARAT

Bagi Kota Pontianak, jumlah penduduk golongan Cina dan peranannya cukup besar dalam masyarakat. Sebelum didirikannya kota ini imigran-imigran Cina telah memiliki peranan yang cukup besar yaitu sebagai pekerja pada tambang-tambang emas di daerah Montrado, Mandor dan Budok milik sultan Sambas dan Panembahan Mempawah. Di lokasi tambang-tambang tersebut imigran-imigran Cina membentuk perkongsian untuk memperkuat kedudukan mereka. Pada tahun 1745 telah terdapat perkongsian seperti Tai Kong, Samto Kiaw, Few Sjun (gabungan dari Tai Kong dan Samto Kiaw). Dalam kongsi-kongsi itu imigran-imigran Cina tidak sekedar menjadi buruh-buruh tambang tetapi sebaliknya bahkan menguasai.

Di Pontianak sendiri pada tahun 1772 telah ada kongsi Tszu Sjin yang mendapat *support* dari seorang bernama Lo Pong yang baru datang sebagai imigran dari Negeri Cina dengan 100 orang keluarganya. Tetapi kemudian Lo Pong pergi ke Mandor melalui Sungai Peniti. Lo Pong membangun Mandor menjadi pusat pemukiman dan perdagangan dan kemudian ia mengangkat dirinya sebagai *tai po* (pemimpin besar). Mandor bertambah maju dan menjadi pusat perdagangan yang di-

kunjungi dari berbagai daerah yang menyatakan diri tunduk kepadanya.<sup>1)</sup>

Peraturan kewarganegaraan negeri Cina yang dikeluarkan pada tahun 1896 menyatakan bahwa orang-orang Cina di mana pun berada tetap diakui sebagai warga negara Cina. Ini menyebabkan orang-orang Cina di daerah Kalimantan (Kalimantan Barat) juga menganggap bahwa diri mereka sebagai berada dalam suatu *Small Chine* dalam arti republik tersendiri.<sup>2)</sup> Anggapan ini memperkuat kedudukan mereka semula yaitu sebagai masyarakat yang berdiri sendiri karena hak otonomi yang diperoleh dari sultan Sambas (1770) berupa kekuasaan pemerintahan, pengadilan dan kepolisian.<sup>3)</sup>

Sejak itu berdiri republik kecil di Mandor dan Montrado yang bernaung di bawah kekuasaan kaisar Cina yang bertahta di dalam lingkungan tembok besar negaranya. Kewajiban republik-republik kecil ini ialah memberikan upeti setiap tahun kepada kaisar Cina sebagai hasil usaha kerjanya di daerah perantauan.<sup>4)</sup>

Sebenarnya orang-orang Cina di daerah Kalimantan Barat pada abad ke-19 sebagian besar adalah Cina peranakan karena terjadinya perkawinan campuran antara imigran-imigran Cina dengan penduduk asli. Secara historis imigran-imigran Cina umumnya adalah laki-laki pencari kerja atau pelarian. Di daerah Kalimantan Barat imigran-imigran Cina ini melakukan perkawinan campuran dengan putri-putri Daya yang keturunan mereka mengaku dirinya sebagai orang Cina. Ini disebabkan karena azas kewarganegaraannya yaitu *ius sanguinis*. Dengan demikian maka Cina-cina peranakan itu mengakui dirinya sebagai orang Cina dan mengaku sebagai warga negara Cina.

- 
- 1) Angkatan Darat Kodam XII Tanjungpura, *Petunjuk Teritorial Daerah Kalimantan Barat*, SUDAM XII Tanjungpura, Pontianak, 1972, hal. 316-317.
  - 2) Drs. Sumadi, *Peranan Kalimantan-Barat dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*, Yayasan Tanjungpura, Pontianak, 1973, hal. 50-51.
  - 3) Angkatan Darat Kodam XII Tanjungpura, *Op cit*, hal. 315.
  - 4) Letkol Kadarusman, *Masalah Cina*, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, Pontianak, 1969, hal. 31.

Dengan adanya hak otonomi maka penduduk asli yang berdomisili di daerah pemukimannya berada di bawah pemerintahannya. Penduduk asli itu kemudian dimusuhi dan diusir agar mereka dapat berbuat lebih leluasa dalam mengeksploitasi kekayaan alam daerah yang dikuasainya. Setelah merasa kuat perkongsian (republik kecil) itu bahkan berani melawan sultan Sambas (1850) yang memberi segala-galanya sampai orang-orang Cina itu dapat berusaha dan memperoleh kehidupan yang layak. Belanda yang mempunyai kekuatan militer besar juga diserangnya. Pemberontakan terhadap Belanda dilakukan secara sporadis pada tahun-tahun 1877, 1819, 1823, dan 1914.<sup>5)</sup> Pemberontakan terakhir berkobar sampai tahun 1916 yang oleh penduduk setempat dikenal dengan istilah Perang Kenceng.

Tujuan pembontakan adalah untuk merebut Kota Pontianak dari tangan Belanda dan dengan demikian dapat menguasai seluruh Kalimantan Barat. Tetapi terhadap sultan Pontianak kongsi-kongsi Cina itu selalu menunjukkan kesetiiaannya. Seperti yang terjadi pada tahun 1819 ketika serangan kongsi-kongsi Cina terhadap Belanda dapat dihancurkan, Kapitan Cina Tjap dari Mandor datang kepada sultan Pontianak untuk meminta maaf dan menyatakan sumpah setianya, padahal kongsi-kongsi itu tidak menyerang sultan tetapi menyerang Belanda.

Pembrontakan demi pembontakan pun terjadi untuk menaklukkannya secara total, maka Pemerintah Belanda melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membubarkan seluruh bentuk perkongsian Cina di seluruh Borneo Barat dan menempatkan semua wilayah yang dianggap dikuasai oleh perkongsian Cina ke bawah kekuasaan Belanda.

---

5) Angkatan Darat Kodam XII Tanjungpura, *Op cit*, hal. 31.

2. Mengambil kekuasaan atas orang-orang Cina dari sultan Sambas dan Panembahan Mempawah ke dalam kekuasaan Belanda.

Dengan dikuasainya daerah-daerah tambang dan pusat-pusat pemukiman imigran-imigran Cina oleh Pemerintah Belanda, maka mata pencaharian orang-orang Cina di daerah pemukimannya menjadi tidak menentu. Karena itu Cina-Cina dagang yang mula-mula membuka usaha di pusat perdagangan Mandor dan Montrado mulai mengalihkan perhatiannya ke Kota Pontianak. Di lain pihak Kota Pontianak sendiri telah berkembang dengan pesat karena pelabuhannya mendapat kunjungan kapal-kapal dari berbagai negara. Pada masa itu komoditi karet sudah merupakan penghasilan yang besar dan menjadi bahan ekspor.

Republik Mandor dan Montrado telah berakhir setelah berdiri masing-masing tidak kurang dari 100 tahun. Penduduknya sebagian pindah ke kota-kota di daerah pantai terutama Pontianak.

Sementara itu pada tahun 1921 gelombang evakuasi orang-orang Cina mengalir dalam jumlah besar ke daerah Borneo Barat dan Semenanjung Malaya. Latar belakang evakuasi adalah terjadinya perpecahan antara pemimpin-pemimpin Cina di negerinya dan terjadinya perang saudara antara Tjiang Kai Sjek dan Mao Tse Tung. Sebagian orang-orang Cina terdesak ke selatan yaitu ke daerah Kwan Tung yang padat penduduknya dan tandus. Karena itu mereka melakukan evakuasi untuk mencari penghidupan.

Sebenarnya motif perpindahan imigran-imigran Cina ke Asia Tenggara termasuk ke Borneo Barat ini terutama juga disebabkan karena kerusuhan yang terus-menerus terjadi di negerinya. Kehidupan di negerinya tidak aman dan jiwanya merasa selalu terancam. Maka gelombang perpindahan ke

daerah Borneo Barat itu selalu besar dan tidak henti-hentinya.<sup>6)</sup>

Karena keadaan negerinya yang demikian itu maka daerah Kalimantan Barat yang sedikit penduduknya dan relatif subur tanahnya itu merupakan lokasi yang ideal bagi mereka. Pengetahuan kenegaraan yang rendah dan karena politik raja-raja di daerah Kalimantan Barat pada masa itu di mana setiap pendatang diizinkan saja untuk membuka tanah, maka imigran-imigran Cina itu bersikap menjadikan daerah Kalimantan Barat seperti bagian dari negerinya sendiri. Mereka merasa memiliki tanah di daerah baru ini yang sebelumnya belum pernah ada orang asing memiliki tanah.<sup>7)</sup>

Walaupun kepindahan orang-orang Cina dari negerinya itu terjadi karena ancaman, karena penderitaan dan karena keadaan yang sangat tidak menguntungkan, namun imigran-imigran Cina tetap mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap negeri asal dan para pemimpin negaranya. Kesetiannya yang tinggi itu sering kali sampai melupakan keharusan kesetiaan terhadap negeri yang didatangi. Karena itu di daerah baru ini mereka seringkali menimbulkan berbagai kerusuhan baik terhadap pemerintah maupun terhadap sesama warga masyarakat.

Dalam tulisannya berjudul Masalah Cina, Letnan Kolonel Kadarusmo memerincikan adanya beberapa motif yang menyebabkan kesetiaan imigran-imigran Cina ini terhadap negeri asalnya. Motif-motif itu ialah: pertama karena sistem kewarganegaraan yang dianut oleh Negeri Cina yaitu azas *ius sanguinis* (azas keturunan). Dengan azas ini maka bagaimana pun dan di mana pun Cina-cina dan keturunannya tetap diakui sebagai warga negara Cina. Karena itu anak-anak Cina di daerah Borneo Barat ini ditanamkan oleh orang tua dan guru-guru mereka untuk tetap pandai berbahasa Cina dan mencintai kebudayaan Cina.

6) <sup>1</sup>Let. Kol. Kadarusman, *Op Cit.*, hal. 32

7) <sup>2</sup>Lok Cit.

Motif kedua karena adanya intimidasi dari gerakan-gerakan subversi dan keamanannya tidak akan dilindungi jika mereka tidak loyal, tidak membantu dan tidak mengirimkan dananya ke RRC untuk membangun negaranya. Intimidasi itu dikabarkan melalui gerakan-gerakan subversi yang sekaligus mengevaluasi loyalitas dari setiap warganya.

Motif ketiga karena falsafah yang dikemukakan oleh pemimpin mereka Dr. Sun Yat Sen (1913) bahwa nasionalisme Tiongkok di atas segala-galanya. Karena program itu maka imigran-imigran Cina senantiasa mengirimkan bantuan-bantuan ke negeri leluhurnya. Bantuan itu besar sekali artinya. Sebagai imbangannya, Pemerintah RRC berusaha untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri melalui konsulat-konsulatnya.

Karena ketiga hal tersebut Kadarusno mensinyalir bahwa di daerah Borneo Barat ini terdapat tiga golongan penduduk Cina. Sinyalemen ini juga sesuai dengan pendapat para informan dalam penelitian ini yaitu golongan Cina yang taat pada RRC. Golongan ini jumlahnya paling banyak. Kemudian golongan Cina pro-Taiwan dan golongan Cina yang menyesuaikan diri pada kondisi-kondisi setempat meskipun negeri itu memusuhi RRC.

Di daerah Borneo Barat golongan Cina yang pro-RRC dikenal dengan Cina Bintang 5 dan yang pro-Taiwan dikenal dengan Cina Bintang 12. Sebutan ini didasarkan atas bendera pusaka yang dimiliki oleh golongan-golongan itu yaitu masing-masing dengan tabur bintang 5 atau 12.

Menurut Kadarusno, Cina-Cina perantaraan ini mempunyai tiga peranan penting bagi kehidupan masyarakat Borneo Barat. Peranan pertama sebagai penyalur bahan kebutuhan pokok rakyat atau sebagai pedagang. Peranan kedua ialah sebagai pembeli hasil-hasil produksi, hasil-hasil bumi dan hasil-hasil lain dari rakyat atau sebagai pedagang perantara. Dan peranan ketiga ialah sebagai kreditur baik kreditur uang atau kreditur barang-barang keperluan penduduk.

Patut ditambahkan bahwa di samping peranan tersebut ada satu peranan lagi yang cukup berarti yaitu sebagai petani penghasil. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya konsesi peninggalan orang-orang Cina berupa perkebunan karet, perkebunan kelapa dan lain-lain yang ditinggalkan oleh orang-orang Cina setelah mereka itu terkena berbagai peraturan pemerintahan.

Sebagai pedagang, umumnya mereka berdomisili di kota-kota besar seperti Pontianak, Singkawang dan lain-lain. Dan sebagai penghasil pertanian mereka berdomisili di daerah pedesaan. Sejak didirikannya Kota Pontianak sudah mulai ikut dikembangkan oleh orang-orang Cina. Bahkan pada tahun 1772 di Kota Pontianak sudah berdiri kongsi *Tszu Sjin* yang ikut dikembangkan oleh *Taiko Lo Pong*.

Peranan orang-orang Cina dalam bidang perekonomian ini cukup besar. Cina-Cina kaya hidup dengan mewah di kota-kota. Kehidupan mereka bersifat mengelompok di pusat-pusat perdagangan kota, sehingga nampak lebih menonjol. Cina-Cina kaya ini disebut "tauke" dan isteri-isteri mereka disebut "nyonyah". Sementara Cina-cina petani di desa-desa menguasai lahan usaha yang luas dengan pengolahan secara intensif sehingga hasil usaha taninya relatif lebih baik daripada hasil usaha petani penduduk bukan Cina. Meskipun orang-orang Cina miskin yang kehidupannya pas-pasan jumlahnya cukup banyak, namun kehidupan Cina-cina kaya itu telah menimbulkan irihati bagi penduduk lainnya. Perasaan irihati itu juga dibaca pada isi informasi dari para informan penelitian ini.

Pada umumnya Kota Pontianak merupakan pusat perdagangan bagi seluruh daerah Kalimantan Barat. Tetapi sampai dengan tahun 1945 Kota Pontianak belum merupakan pusat pemerintahan di daerah ini. Hubungan transportasi antara Kota Pontianak dengan kota-kota lain di daerah Kalimantan Barat juga belum lancar karena belum ada prasarana jalan darat yang representatif. Hubungan transportasi terutama dalam hal angkut-mengangkut barang dagangan terutama dilakukan melalui jalan air baik berupa pelayaran pantai seperti Mempa-

wah, Sambas, Sukadana dan Ketapang masing-masing masih berdiri sendiri. Baru pada tahun 1946 Kota Pontianak berstatus sebagai pusat pemerintahan sebagai ibu kota daerah istimewa yang mengkoordinasi daerah-daerah swapraja.

Dengan statusnya yang baru itu maka daerah-daerah swapraja lainnya mulai menaruh perhatian yang besar akan status Kota Pontianak sebagai pelabuhan yang potensial. Pelabuhan Pontianak menjadi sangat penting bagi daerah sekitarnya setelah dikalahkannya Kerajaan Sukadana oleh Pontianak (Sultan Achmad Kamaluddin 1876). Sebelum itu Sukadana merupakan pelabuhan besar di daerah Kalimantan Barat yang menjadi pangkalan bagi pedagang-pedagang Islam, terutama setelah jatuhnya Kota Makasar ke tangan Belanda. Pontianak kemudian menggantikan kedudukan Sukadana setelah pelabuhan besar itu ditutup oleh sultan Pontianak. Namun demikian wilayah kerajaan di Ketapang itu masih tetap mempunyai strategi yang penting bagi perdagangan daerah Kalimantan Barat karena letaknya yang relatif dekat dengan Semarang. Pada zaman pendudukan Jepang, arti pentingnya Pelabuhan Ketapang itu menjadi lebih nyata bagi daerah Kalimantan Barat sebagai tempat persinggahan kapal-kapal pelayaran internasional karena keamanan lebih terjamin.

Hubungan antara Pontianak dengan Mempawah relatif kurang baik karena prinsip anti penjajahan yang dipegang teguh oleh Panembahan Adiwijaya dari Mempawah. Di lain pihak sultan-sultan Pontianak, sejak sultan yang pertama pada umumnya pro-Belanda. Sultan Kasim dari Pontianak bahkan pernah membantu Belanda menyerang Mempawah. Karena serangan itu, maka Panembahan Adiwijaya bertekad mundur dan memperkuat kedudukannya di daerah pedalaman untuk menghimpun semangat patriotisme masyarakat Daya. Karena letaknya di daerah pedalaman, maka peranan Mempawah bagi perdagangan menjadi kurang berarti. Hubungan dagang antara Mempawah dan Pontianak menjadi meningkat setelah dibuka hubungan darat pada zaman pendudukan Jepang.

Kota-kota pedalaman lainnya seperti Mandor, Landak, Ngabang, Sanggau dan Sintang kehidupannya perdagangan menjadi sangat tergantung pada Pontianak. Kota-kota itu karena letaknya tidak dapat menjalin hubungan dagang langsung dengan kota-kota dagang di luar Kalimantan Barat. Keluar masuknya barang-barang dagangan harus melalui Pelabuhan Pontianak. Komoditi lokal harus dipasarkan ke Pontianak dan barang-barang dari luar daerah diangkut dari Pontianak oleh pelayaran pedalaman. Lalu-lintas satu-satunya hanya berupa jalan air yaitu melalui Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak. Karenanya peranan Pontianak menjadi sangat penting bagi kota-kota pedalaman itu. Kerajaan Pontianak sendiri sebenarnya tidak memiliki ambisi besar untuk memerangi dan menaklukkan daerah sekitarnya. Politik yang dianut ialah persaudaraan dan kekeluargaan melalui jalur perkawinan.

Kota-kota di Kerajaan Sambas seperti Singkawang, Pemangkat dan Sambas sendiri merupakan kota-kota pelabuhan yang dapat disinggahi oleh pelayaran interinsuler dan kapal-kapal samudera. Dalam hal memasarkan komoditi ekspor, pedagang-pedagang dari kota tersebut umumnya berhubungan langsung dengan pasaran internasional. Hubungan koordinasi oleh Pelabuhan Pontianak dalam hal ekspor dan impor mungkin hanya dalam hal volume ruangan kapal terutama jika kargo barang-barang itu tidak hanya untuk satu kota saja. Dengan demikian fungsi pelabuhan yang satu bagi pelabuhan yang lain saling melengkapi muatan kapal. Sejak dibukanya hubungan darat, fungsi kota Pontianak menjadi sangat penting bagi kota-kota pantai utara karena barang-barang dagangan diantarkotakan dengan mempergunakan jasa angkutan darat.

## BAB IV

### ADMINISTRASI DAN PEMERINTAHAN

#### 1. Perkembangan Daerah Administrasi

Ketika didirikannya, wilayah Kerajaan Pontianak terbentang dari batas wilayah Kecamatan Kubu (sekarang) sebelah timur mencakup daerah Sungai Ambawang sebelah utara, Jungkat, sebelah Barat dan Laut Cina Selatan sebelah selatan. Kota Pontianak sendiri masih terbatas; hanya meliputi perkampungan kerajaan yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Dalam Bugis.

Perkembangan pertama dimulai dengan adanya pengakuan oleh Pemerintah Kompeni Belanda pada tahun 1773, disusul dengan pengiriman wakil pemerintahan Kompeni yang pertama kali di bawah pimpinan Willem Ardi Polm yang semula menjabat sebagai asisten residen.<sup>1)</sup> Willem Ardi Polm diberi tempat oleh sultan Pontianak untuk membangun perkantoran dan pemukimannya di seberang selatan Sungai Kapuas (1779). Hadiah sultan kepada wakil Pemerintah Kompeni Belanda dikenal dengan nama Tanah Seribu karena meliputi areal seluas 1000 x 1000 meter persegi (satu kilo meter persegi).

---

1) Pemda Kotamadya Pontianak, 200 Tahun Kotamadya Pontianak, *Op. Cit.*, hal.

Daerah Tanah Seribu ini merupakan inti perkembangan daerah administrasi kota di seberang selatan Sungai Kapuas. Sekarang daerah ini dikenal dengan wilayah Pontianak Barat dan menjadi daerah pusat pemerintahan kota di mana Kantor Kotamadya, Kodam XII Tanjungpura dan Polda V sekarang berada. Inti kota sebelah selatan (Wilayah Pontianak Selatan) dikembangkan oleh orang-orang Cina yang tertarik karena telah terbukanya pusat pemukiman dan perkantoran yang didirikan Belanda itu. Tidak didapat keterangan yang jelas mengenai asal-usul datangnya Cina-cina yang mula-mula membuka daerah perdagangan itu. Kemungkinan besar mereka berasal dari daerah Mandor.

Wilayah barat dan selatan yang dalam riwayat-riwayat perkembangan Kota Pontianak disebut inti kedua (inti pertama wilayah timur), mengalami perkembangan yang lebih pesat daripada perkembangan inti pertama (daerah pusat kerajaan) karena adanya fasilitas-fasilitas pelayanan penduduk lebih banyak seperti perkantoran, sekolah, pasar dan lain-lain. Perkembangan yang lebih pesat itu juga disebabkan oleh kondisi fisik tanah di sebelah selatan yang jauh lebih baik daripada kondisi fisik tanah di sebelah timur. Justru karena keistimewaan daerah inti kedua itu maka fungsi Kota Pontianak menjadi residensi dan ibukota Propinsi Kalimantan Barat.<sup>2)</sup>

Inti ketiga yaitu wilayah sebelah utara Sungai Kapuas yang dikembangkan oleh orang-orang Cina. Pada tahun 1772 datang seorang Cina bernama Lo Fong bersama dengan 100 orang pengikutnya. Rombongan imigran ini berasal dari Propinsi Kanton, mendarat di Kampung Siantan.<sup>3)</sup> Agaknya Cina-Cina inilah yang mengembangkan daerah inti ketiga. Walaupun Lo Fong kemudian meninggalkan Pontianak menuju ke Mandor, namun pengaruhnya telah tertanam dan menjadi anutan bagi Cina-cina yang bermukim di Pontianak. Sebagai-

---

2) *Ibid*, hal. 24.

3) Angkatan Darat Kodam XII Tanjungpura, *Op. Cit*, hal. 316.

mana telah dikemukakan bahwa Lo Fong ini kemudian menjadi *taiko* (pemimpin besar) yang hampir menguasai semua perkongsian Cina di daerah Kalimantan Barat ini.

Dengan perkembangan ketiga inti kota tersebut, bentuk kota menjadi *star shaped* karena interaksi penduduk dengan pemusatan-pemusatan pemukiman di daerah sekitarnya. Cabang tiga Sungai Kapuas yang masa itu menjadi *main road* lebih mempertegas bentuk bintang itu. Setelah komoditi ekspor seperti lada, kopra, dan hasil hutan dicari pasarannya dan barang-barang dari luar daerah dimasukkan, Pontianak berkembang menjadi pelabuhan utama daerah Kalimantan Barat.

Pedagang-pedagang (pelaut-pelaut) dari berbagai daerah berdatangan mengunjungi Pelabuhan Pontianak. Sebagian dari para pelaut itu menetap dan mendirikan pemukiman setelah mendapat izin dari sultan untuk membuka hutan. Di antaranya ialah Haji Abdul Kahfi, seorang pedagang dan pelaut dari Banjarmasin, pada tahun 1846 mendirikan Kampung Banjar Serasan. Kampung baru ini terletak paralel dengan pusat kerajaan (dalam daerah inti pertama). Kemudian seorang pedagang dan pelaut dari Banjarmasin lain bernama Muhammad Yusuf pada tahun 1884 mendirikan Kampung Saigon.<sup>4)</sup> Kampung ini juga terletak pada daerah inti perkembangan pertama. Nama Saigon diambil dari nama negeri asal atau negeri kelahiran isterinya yaitu Kota Saigon (Vietnam).

Demikianlah pedagang demi pedagang datang dan menetap serta mendirikan perkampungan di Pontianak sehingga kota ini berkembang dengan pesat. Nama-nama perkampungan baru yang didirikan oleh para pendatang itu disesuaikan dengan nama-nama kampung yang berorientasi dengan nama-nama daerah luar Kalimantan Barat itu antara lain Kampung Jawa Tengah, Kampung Kamboja, Kampung Bangka-Belitung, Kampung Bansir, Kampung Tembelan Sampit, Kampung Arab, Kampung Bugis dan lain-lain.

4) Hasil wawancara dengan responden.

*Master plan* Kotamadya Pontianak mencatat empat fase perkembangan Kota Pontianak. Fase pertama ketika Syarif Abdurrachman dengan pengikut-pengikutnya pindah dari Mempawah dengan 14 buah perahu, mendirikan perkampungan yang pertama sampai dibukanya bagian tepi Sungai Kapuas sebelah selatan pada tahun 1779. Fase kedua dari tahun 1779 sampai dengan tahun 1940 dan fase ketiga tahun 1940 sampai tahun 1950. Kemudian fase keempat ialah sesudah tahun 1950. Perkembangan pesat terjadi antara 1937 sampai tahun 1940.

Perkembangan pesat terjadi karena dihasilkannya komoditi ekspor yang baru yaitu karet. Tanaman karet diperkenalkan oleh Haji Yusuf Saigon, pendiri Kampung Saigon yang berhasil memboyong putri Saigon dan benih tanaman karet dari Singapura karena pelayarannya dalam kegiatan perdagangan. Benih tanaman karet itu tumbuh dengan suburnya di daerah Kalimantan Barat dan menghasilkan komoditi penting. Karena komoditi itu penghasilan rakyat bertambah banyak bahkan pemerintah sampai memberikan subsidi kepada para petani karet sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Karena penghasilan yang melimpah-limpah ini maka perkembangan kota meningkat dengan pesat. Pada masa itu jalan-jalan darat yang menghubungkan Kota Pontianak dengan daerah sekitarnya mulai dibangun.<sup>5)</sup>

Bentuk kota pada masa itu sudah mulai melebar. Di bagian selatan daerah yang sudah terbangun (*built up area*) sudah meliputi daerah yang dibatasi oleh Jalan Penjara, Jalan Gaharu, dan Jalan Kinibalu. Sedang bagian sebelah utara sudah terbuka Kampung Siantan Hilir dan Siantan Tengah. Pola kota terlihat di peta seperti bentuk ring (melingkar) dengan daerah pusat. Jalan-jalan dalam yaitu Jalan Matahari dan Jalan Merdeka (sekarang) sedang lingkaran kedua ialah Jalan Gaharu dan Jalan Kinibalu.<sup>6)</sup>

---

5) Hasil wawancara dengan Syarif Yusuf.

6) Pemda Kotamadya Pontianak, 200 Tahun Kota Pontianak, *Op. Cit.*, hal. 25.

Masa pendudukan Jepang merupakan masa suram bagi Kota Pontianak karena ditandai dengan tragedi sangat hebat yaitu pembunuhan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal dengan "Peristiwa Mandor". Hal yang positif yang perlu dicatat, walaupun di atas lembaran hitam, ialah pembuatan jalan antara Kota Pontianak – Mempawah yang dilakukan dengan *romusha* (kerja bakti). Di lain pihak industri-industri masih berjalan terus yaitu pembuatan kapal (perahu) dan penyulingan arah untuk konsumsi tentara Jepang. Pembuatan lapangan terbang Sungai Durian juga dilakukan pada zaman Jepang dengan jalan yang menghubungkan antara Kota Pontianak dengan Sungai Durian itu. Walaupun pembangunan itu dilakukan di atas penderitaan rakyat namun secara fisik sangat penting artinya bagi perkembangan kota pada masa-masa selanjutnya. Kekejaman Jepang yang amat sangat itu sendiri memang tidak pernah terlupakan oleh penduduk Kalimantan Barat.

Perkembangan pembangunan pada masa pendudukan Jepang itu diarahkan ke satu titik pusat perhatian, yaitu untuk menunjang suksesnya Perang Asia Timur Raya. Manfaat yang dapat dicapai ialah perkembangan jalan darat secara radial (melebar) ke arah luar kota terutama ke arah Mempawah dan Mandor serta ke arah Sungai Durian. Perkembangan komoditi sebaliknya malah menurun karena pengrusakan tanaman ekspor untuk memproduksi bahan pangan.

Tanaman kelapa dan karet yang memang sudah mulai menua dibebangi untuk mendapatkan tanah subur bagi tanaman pangan. Peremajaan kembali tanaman ekspor itu sangat sedikit dilakukan karena memang pasarannya sangat lesu. Di lain pihak barang-barang kebutuhan pokok harus diproduksi itu dari daerah lain sangat langka. Perdagangan pun menjadi sepi sehingga Kota Pontianak hanya menjadi pusat pemerintahan militer dan bukan pusat perdagangan.

Sesudah Perang Asia Timur Raya selesai, daerah Kalimantan Barat beralih dari tangan pemerintahan Nippon ke tangan Belanda. Pada masa itu kekuasaan berada dalam pemerintahan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) dan daerah Kalimantan Barat dijadikan daerah istimewa gabungan dari daerah-daerah swapraja dan neo-swapraja dengan Pontianak sebagai ibukotanya. Dengan demikian seolah-olah terasa bahwa wilayah administrasi Pontianak berkembang dari daerah swapraja Pontianak menjadi seluruh daerah Kalimantan Barat. Kota Pontianak kembali menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan seluruh Kalimantan Barat.

## 2. Sistem Birokrasi

### a. Alam raja-raja

Tidak seberapa lama setelah didirikannya Kerajaan Pontianak, Pemerintah Belanda segera memberikan pengakuannya (1773). Raja-raja Pontianak umumnya mengikat perjanjian dengan pihak Belanda dalam mengatur sistem pemerintahannya. Kerjasama dalam mengatur sistem pemerintahan diatur dalam *lange contract* maupun *corte verklaring*.<sup>7)</sup> Sultan Syarif Abdurrachman sendiri pada tahun 1779 telah mengadakan kontrak dengan Kompeni untuk mengatur dan mempertahankan negeri ini secara bersama-sama. Perjanjian itu mengikat semua sultan yang menduduki tahta Kerajaan Pontianak. Semua sultan harus bersumpah setia kepada Kompeni karena Kompenilah yang berhak mengangkat para sultan Pontianak jika sultan pendahulunya mangkat (pasal III surat perjanjian antara Sultan Abdurrachman Alqadrie dengan Gubernur Jenderal W.G. Polm 1779).

Dengan perjanjian tersebut maka semua sultan yang memerintah Kerajaan Pontianak merasa terikat kepada Kompeni.

---

7) Syarif Ibrahim Alqadrie dan A.B. Tangdililing, *Sejarah Kerajaan Pontianak dan Perkembangan Kota Pontianak*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1980, hal. 48.

Namun demikian dalam perkembangan kekeluargaan tidak sedikit di antara kerabat-kerabat yang tidak setuju dengan kesetiaan itu, lebih-lebih setelah semakin santernya angin "pergerakan nasional". Semua kerabat sultan antara lain Sultan Kasim sendiri yang tidak menyetujui keterikatan dengan perjanjian itu kemudian meninggalkan kraton dan membangun perkampungan sendiri yang disebut dengan istilah Kampung Luar. Nama ini menunjukkan ciri perbedaan pendirian dengan para kerabat sultan lainnya yang tinggal di dalam lingkungan kraton.

Masa pemerintahan para sultan itu adalah sebagai berikut:

1. Sultan Syarif Abdurrachman Alqadrie ibnu Habib Husin Alqadrie 1771-1808
2. Sultan Syarif Kasim Alqadrie bin Syarif Abdurrachman Alqadrie 1808-1819
3. Sultan Syarif Oesman Alqadrie bin Syarif Abdurrachman Alqadrie 1819-1855
4. Sultan Syarif Hamid Alqadrie bin Syarif Oesman Alqadrie 1855-1872
5. Sultan Syarif Yoesoef Alqadrie bin Syarif Oesman Alqadrie 1872-1895
6. Sultan Syarif Muhammad Alqadrie bin Syarif Yoesoef Alqadrie 1895-1944
7. Sultan Syarif Thata Alqadrie bin Syarif Oesman Alqadrie 1944-1945
8. Sultan Hamid Alqadrie 1945-1950

Masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad (sultan ke-6) merupakan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah raja-raja Pontianak. Pada zaman pemerintahannya Kota Pontianak mengalami masa jayanya. Pada masa itu komoditi karet tercatat memberikan penghasilan yang paling besar bagi penduduk. Ini merupakan kejadian yang belum pernah dialami pada masa-masa sebelumnya. Perdagangan Kota Pontianak berkembang dengan pesat. Kapal-kapal asing dan interinsuler

datang ke Pelabuhan Pontianak membawa barang-barang dagangan dan untuk mengangkut komoditi daerah ini ke luar Kalimantan Barat.

Pembangunan kota berkembang dengan pesat karena penghidupan penduduk cukup makmur. Jalan-jalan di wilayah selatan yang dibangun ialah Jalan Penjara, Jalan Hasanudin, Jalan Jawa dan sebagainya. Di seberang utara dibangun pula jalan-jalan yang menghubungkan Pontianak dengan kota-kota sebelah utara menuju Mempawah. Jumlah penduduk Kota Pontianak juga berkembang dengan pesatnya karena imigrasi spontan terutama yang datang dari Jawa. Berdirilah Kampung Jawa Tengah di daerah Pontianak Barat yang lebih dikenal dengan nama Kampung Sumur Bur.<sup>8)</sup>

Sebagai raja yang dapat memakmurkan rakyatnya, Sultan Muhammad memiliki keistimewaan tersendiri yaitu kebal terhadap senjata. Sayang sekali bahwa sultan ini harus gugur di bawah penganiayaan tentara Jepang dalam Peristiwa Mandor. Kekebalan yang dimiliki sultan dikisahkan bahwa beliau sulit dibunuh Jepang. Tetapi karena ada pengkhianatan, rahasianya segera diketahui. Semua kuku tangan dan kaki beliau dicabuti semuanya sampai habis, barulah beliau dapat dibunuh. Mayat beliau yang dikuburkan secara sembarangan oleh tentara Jepang juga masih menunjukkan kebesarannya. Ketika mayat itu digali kembali setelah terkubur selama empat tahun ternyata tidak mengalami proses pembusukan. Mayat itu masih untuk dalam pakaian kebesarannya.<sup>9)</sup>

#### b. Alam penjajahan

Status pemerintahan Kota Pontianak secara nasional baru dimulai pada tahun 1922, yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang tentang reorganisasi pemerintahan yang dikenal dengan *Bestuur Shervorningswet*. Landasan dikeluarkannya undang-

8) Hasil wawancara dengan responden.

9) YU. Lontaan, *Op. Cit.*, hal. 238.

undang itu ialah *Decentralisatie Wet* dan *Decentralisatie Besluit* dari Pemerintah Belanda. Undang-undang tersebut memungkinkan dibentuknya daerah-daerah otonomi yang lebih besar dari *gewest* lama dengan nama *provincie*.<sup>10)</sup> Sebelum itu Kota Pontianak sekedar diberi otonomi yang sangat terbatas dengan pembentukan *Plaatselijke Fonds*. Otonomi itu sangat tidak menunjang bagi perkembangan kota yang makin pesat.

Perkembangan pemerintahan kota selanjutnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemerintahan daerah Kalimantan Barat pada umumnya karena Kota Pontianak merupakan tempat pemusatan pemerintahan di daerah Kalimantan Barat.

Dalam rangka *Bestuur shervorningswet* Stb. 1936 Nomor 68 menetapkan ordonansi tentang pembentukan *Gouvernementen Sumatera, Borneo dan Groote Oost* sebagai wilayah administratif yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Ordonansi itu mulai berlaku sejak 1 Juli 1938. *Governmenten Borneo* dengan ibukotanya Banjarmasin terdiri atas dua residensi yaitu *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo* dengan ibukota Banjarmasin dan *Residentie Westerafdeling van Borneo* dengan ibukota Pontianak.<sup>11)</sup> Struktur pemerintahan seperti ini masih tetap dipertahankan sampai pada zaman pendudukan Jepang, yaitu Kalimantan Barat masih berstatus sebagai *Residentie administratif* (Syuu) sebagai bagian dari Borneo *Menseibu Cokan*.

Setelah perang dunia kedua selesai, Kalimantan Barat kembali dikuasai oleh *Nederlands Indies Administration* (NICA). Dengan beslit nomor 8 Tahun 1948 Kalimantan Barat diakui sebagai Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) yang berpemerintahan sendiri dengan dilengkapi sebuah Dewan Kalimantan Barat.<sup>12)</sup> Daerah istimewa ini merupakan peng-

10) Pemda Kotamadya Pontianak, *Op. Cit.*, hal. 27.

11) Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, *Sejarah Singkat Perkembangan Prop. Dati I Kalimantan Barat 1957-1977*, Pontianak, 1964, hal. 1.

12) *Ibid.*, hal. 2.

gabungan (federasi) dari daerah-daerah swapraja dan daerah-daerah neo-swapraja dan Pontianak dijadikan sebuah *landschaps gemeente*.

Daerah-daerah swapraja dan neo-swapraja di seluruh Kalimantan Barat yang merupakan federasi dalam daerah istimewa itu ialah: Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang, Swapraja Meliau, Neo Swapraja Tanah Pinoh, dan Neo Swapraja Kapuas Hulu.<sup>13)</sup>

*Gemeente* yang baru itu dibentuk pada tahun 1946 dipimpin oleh R. Soepardan sebagai syahkota. Pada tahun 1948 Syahkota R. Soepardan digantikan oleh ADS Hidayat dengan kedudukan sebagai *burgemeester* sampai tahun 1950. Dalam masa jabatan *burgemeester* ini Pontianak diadopsikan oleh ibukota Negeri Belanda Nederland.<sup>14)</sup>

### c. Alam kemerdekaan

Menurut pasal 2 Konstitusi RIS, Kalimantan Barat berstatus sebagai "daerah bagian" yaitu satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri dan bukan sebagai negeri bagian. Namun daerah Kalimantan Barat tidak segera melebur diri ke dalam Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah dilakukan oleh daerah-daerah bagian lain di Pulau Kalimantan seperti Kalimantan Timur, Daerah Banjar, Daya Besar, Kalimantan Tenggara dan Kota Waringin. Kalimantan Barat tetap berdiri sendiri sebagai negara bagian sampai dileburnya RIS menjadi RI. Namun demikian karena pergolakan-pergolakan politik di mana sebagian besar partai politik dan warga masyarakat Kalimantan Barat menuntut dihapuskannya Daerah

13) Ibid, hal. 3.

14) Pemda Kodya Pontianak, *Op. Cit.*, hal. 27.

Istimewa Kalimantan Barat, secara *de facto* pemerintahan daerah istimewa itu tidak berjalan.<sup>15)</sup>

Masyarakat Kalimantan memandang bahwa Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) itu sebagai warisan Pemerintah Kolonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang telah dicapai oleh seluruh wilayah Nusantara ini. Di lain pihak alam raja-raja (daerah swapraja dan neo-swapraja) telah termakan infiltrasi agen-agen Pemerintah Belanda yang masih ingin tetap mempertahankan kekuasaannya di bumi Nusantara ini. Sesuai dengan aspirasi sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat tersebut maka pada tahun 1950 pemerintah harian DIKB diwakili oleh R. Budiardjo, residen Kalimantan Barat, menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintah RIS. Dengan keputusan tersebut maka Kalimantan Barat secara hirarkis berada di bawah Pemerintah RIS.

Pada tahun 1950 dikeluarkan peraturan Pemerintah RIS nomor 21/1950 yang menetapkan bahwa seluruh wilayah Kalimantan, kecuali Kalimantan Utara yang merupakan daerah jajahan Inggris menjadi satu daerah. Propinsi Kalimantan itu diperintah oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Banjarmasin.<sup>16)</sup>

Pada tahun 1951, daerah administrasi Kalimantan Barat yang dahulunya dikenal sebagai *Residentie Westerafdeling van Borneo* dibagi menjadi enam wilayah kabupaten administratif yaitu Sambas, Pontianak, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang dan sebuah kota administratif yaitu Pontianak. Dengan terbentuknya wilayah kabupaten administratif itu maka kota Pontianak mengemban dua fungsi sebagai ibukota Kabupaten Administratif Pontianak dan sebagai ibukota Kota Administratif Pontianak.

---

15) Pemda Tingkat I Kalimantan Barat Sejarah Singkat Perkembangan Pemerintah Propinsi, Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, 1957 - 1977, *Op Cit.* hal. 4.

16) Syarif Ibrahim Alqadrie. CS. *Op Cit.*, hal. 53.

Pada tahun 1956 Pemerintah RI membentuk daerah-daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1956. Undang-Undang itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957. Pada tanggal 10 Januari 1957 diselenggarakanlah serah terima jabatan Gubernur Kalimantan Milono kepada ketiga orang residen pejabat gubernur Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pejabat gubernur Kalimantan Barat pada saat itu ialah Adjie Pangeran Aflus.<sup>17)</sup>

Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat yang baru saja berdiri ini memilih Pontianak sebagai ibukota propinsi. Dengan demikian sejak tahun 1957 status Kota Pontianak mengemban tiga fungsi yaitu sebagai ibu kota Daerah Administratif Pontianak, ibukota Kabupaten Administratif Pontianak dan sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Barat. Fungsi yang kompleks ini dipegang sampai pada tahun 1963, karena pada bulan Pebruari 1963 ibu kota Kabupaten Pontianak dipindahkan ke Mempawah.

Perlu dicatat bahwa dalam perkembangan pemerintahan ini bahwa Daerah Administratif Pontianak pernah dipimpin oleh seorang walikota wanita yaitu Nyonya Rochana Muthalib yang memangku jabatannya dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1953.<sup>18)</sup>

Telah dikemukakan bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, daerah Kalimantan Barat tidak segera tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terjadi karena sulitnya hubungan komunikasi juga karena adanya faktor yang tidak menguntungkan bagi perjuangan rakyat Kalimantan Barat untuk mencapai kemerdekaannya.

17) 1Memori Kadarusno, Gubemur KDH Tingkat I Kal-Bar 1972-1977, judul Kalimantan Barat Membangun.

2Sejarah Singkat Perkembangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat 1957-1977.

18) 1Sumber: 200 tahun Kotamadya Pontianak.

Pemerintahan pendudukan Jepang selama 3½ tahun telah membuat kekejaman dan penderitaan luar biasa terhadap rakyat sehingga menimbulkan tekanan yang sangat berat bagi kaum pergerakan. Jepang telah menghancurkan satu generasi rakyat Kalimantan Barat dengan melakukan pembunuhan kejam dan secara besar-besaran. Kekejaman itu tidak akan terlupakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Barat apalagi karena peristiwa itu diabadikan dalam bentuk relief monumen "Makam Mandor."

Tentara Jepang yang telah melakukan penangkapan dan pembunuhan masal terhadap pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat Kalimantan Barat. Pemimpin yang ingin selamat harus meninggalkan kota atau mengungsi ke Pulau Jawa. Selain itu Jepang melarang perkumpulan politik, melarang berkumpul lebih dari dua orang, melarang baca koran, melarang mendengarkan radio dan lain-lain. Dengan demikian berita tentang Proklamasi diterima rakyat secara terlambat; itu pun secara sembunyi-sembunyi.

Walaupun demikian pemuda-pemuda yang telah yakin akan kemerdekaan tanah airu itu segera bergerak dan menuntut kepada pemerintah yang berkuasa waktu itu. Didirikanlah oleh pemuda-pemuda suatu panitia untuk menyambut kemerdekaan itu dengan nama Panitia Penyongsong Republik Indonesia (PPRI) walaupun pada mulanya secara diam-diam. Tetapi usaha-usaha itu kandas karena Asikin Noor, residen yang diangkat Jepang menghalang-halangi bahkan memecahbelahkan PPRI. Karena perbuatan dari Asikin Noor itu maka Kalimantan Barat tidak mencapai kemerdekaannya bahkan jatuh kembali ke dalam kekuasaan Belanda.<sup>19)</sup>

Kedatangan tentara NICA di Kalimantan Barat dimanfaatkan dengan baik oleh sultan Pontianak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang diperoleh dari Pemerintah Belanda. Bulan Oktober 1945 terjadi pergantian pemimpin kerajaan

---

19) 1Sumber: Ansar Rachman, Perjuangan Menegakkan Proklamasi Kemerdekaan di Kalimantan Barat, *Harian Kapuas*, tanggal 10 dan 11 Agustus 1983.

dari tangan Sultan Syarif Thata Alqadrie kepada Sultan Hamid II. Sultan yang baru banyak mengenyam pendidikan Belanda. Ia tamatan dari KMA (akademi militer) di Breda Negeri Belanda. Ia juga beristerikan putri Belanda, Didi van Dilden, dan dikaruniai seorang putra dan seorang putri.

Setelah menamatkan pendidikannya ia menduduki jabatan kemiliteran sampai mencapai pangkat *general majoor*. Sebagai sultan Pontianak ia diangkat oleh Pemerintah Belanda sebagai *ajudant in buitengewone Dientsbij H.N. Kooningin der Nederlanden*.<sup>20)</sup>

Dalam perjuangan federalisme yang diselenggarakan oleh Belanda sebagai imbalan kemerdekaan 100% bangsa Indonesia, Sultan Hamid II mendapatkan kedudukan yang amat baik yaitu sebagai wakil Negara Kalimantan Barat dan selalu turut serta dalam perundingan-perundingan Malino, Denpasar, BFO, BFC dan KMB. Walaupun dalam sejarah pemerintahan RI ia pernah menduduki jabatan sebagai menteri, namun lembaran hitam juga mencatat perjuangannya. Ia pernah menjalani hukuman selama sepuluh tahun karena memerintahkan Westerling (tentara APRAs) menyerbu Dewan Menteri.<sup>21)</sup>

Selama Sultan Hamid II menjalani hukumannya, terjadilah perubahan pemerintahan. Para keluarga sultan yang tidak menyetujui politiknya dan para pemimpin rakyat serta pemerintah harian DIKB menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pemerintah RIS pada tahun 1950. Namun demikian Sultan Hamid II masih juga tetap disayangi oleh rakyat dan keluarganya. Hal ini dapat diketahui dari sambutan yang hangat dari keluarga dan rakyat Kalimantan Barat ketika ia pulang dari menjalani hukumannya.

---

20) 2Y.H. Loutan, *Op Ct*, hal. 240.

21) Syarif Ibrahim Alqadrie, *Op Ct*, hal. 27.

## BAB V

### PERISTIWA MANDOR

#### 1. Posisi Pulau Kalimantan

Dalam rangkaian Negeri Timur Jauh, Pulau Kalimantan letaknya sangat strategis karena berada dalam satu gugusan yang sambung-menyambung dari utara ke selatan yaitu Kepulauan Jepang, Formosa, Kalimantan dan Sulawesi. Dalam perang Asia Timur Raya itu ada kecenderungan Negeri Matahari Terbit akan mempersatukan gugus pulau-pulau tersebut menjadi satu wilayah kekuasaan Jepang.

Rentetan kota-kota pantai di sepanjang Laut Cina Selatan seperti Pemangkat, Singkawang, Mempawah dan Pontianak dipandang sangat strategis dan amat menguntungkan bagi garis-garis pertahanan dalam Perang Asia Timur Raya. Karena itu Jepang memandang penting untuk memisahkan daerah Kalimantan Barat dari pulau-pulau di Indonesia lainnya. Kalimantan diperintah dan dikuasai oleh Angkatan Laut (*Kaigun*) sedangkan Pulau Jawa dikuasai oleh Angkatan Darat (*Rikugun*). Namun demikian meskipun penguasanya pada tangan yang berbeda tetapi masih berada dalam satu tampuk kekuasaan yang lebih tinggi yaitu *Saiko Shikikan*.

Jepang mengetahui bahwa daerah Indonesia yang paling lemah pertahanannya dan terbelakang kemajuannya adalah

Kalimantan Barat. Rencana Jepang untuk mencaplok dan menjepangkan daerah Kalimantan Barat semakin jelas setelah memasuki tahun 1943 di mana dengan segala keganasan dan keserakahan Jepang mulai menangkapi para pemimpin, para tokoh masyarakat dan kaum pergerakan. Kekosongan kepemimpinan itu tentu Jepanglah yang kemudian akan tampil untuk mengambil alihnya.

Secara potensial daerah Kalimantan Barat mempunyai harapan yang sangat menguntungkan bagi perkembangan Jepang di masa mendatang. Wilayahnya cukup besar, sementara pulau-pulau Jepang relatif kecil-kecil. Penduduk Kalimantan Barat yang relatif sangat tipis amat menguntungkan untuk perluasan wilayah pemukiman bagi penduduk Jepang yang sudah mulai memadat. Kekayaan alam berupa hasil hutan, karet, kopra, lada dan barang-barang tambang terutama emas yang sampai menarik incaran Cina dalam jumlah yang sangat besar sangat menimbulkan irihati bagi Jepang untuk menguasainya.

Jepang merasa sangat iri melihat kenyataan mengapa bangsa-bangsa asing (Belanda dan Cina) begitu mudah mendapat kepercayaan dari sultan dan panembahan untuk mengeksploitasi kekayaan Kalimantan Barat. Agaknya juga terkandung suatu kekecewaan bagi perasaan bangsa Jepang mengapa tidak bangsanya yang mendapat kesempatan untuk turut mengeksploitasi kekayaan alam Kalimantan Barat. Bukankah Bangsa Jepang keturunan dewa matahari, si raja dunia yang telah terbukti mampu mengalahkan bangsa besar Rusia? Karena superioritasnya itu maka dalam Perang Dunia II Jepang merupakan bangsa yang paling bernafsu untuk menguasai daerah lain.

Untuk melaksanakan maksudnya itu sejak Perang Dunia I tahun 1914-1918 sejumlah orang Jepang telah datang ke daerah Kalimantan Barat membuka beberapa perusahaan dan berdagang. Fukuyama terkenal dengan *Fuku Company* bergerak dalam bidang perkeleyuan dan perkaretan. *Nakahara Fuji Compa-*

ny berdagang kelontong dan pecah-belah. *Nomura Trading Co* bergerak dalam bidang *onderneming* karet dan perusahaan besar. *Honda* pengusaha toko potret dan potret-memotret. *Sumitomo Kabushiki Kaisyo* perusahaan terbesar *sawmill* di Kalimantan Barat dan lain-lain.<sup>1)</sup>

Pedagang dan pengusaha bertindak utama sebagai mata-mata. Raja-raja, Pemerintah Belanda, kongsi-kongsi Cina, kota-kota, desa-desa, daerah strategis maupun daerah terpencil semua dimata-matai. Semua informasi dan gambar-gambar yang dibuatnya dikirim ke Tokyo sebagai bahan yang dapat dipergunakan untuk kelak menguasai daerah ini bila telah sampai waktunya. Kelincahan dalam bergerak dan kocak serta supelnya dalam bergaul membuat perbuatan mata-matanya itu tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali dari pihak mana pun juga. Dengan demikian maka semua yang dikehendaki untuk menyusun bahan informasi bagi penyusunan strategi militernya selalu diperoleh dengan cukup.

Untuk mengorek rahasia-rahasia pemerintahan baik di kalangan Pemerintah Belanda maupun di kalangan raja-raja dan kongsi-kongsi, Jepang tidak segan-segan membuat umpan balik dengan mendatangkan gadis-gadis Jepang yang sengaja dijadikan sebagai pelacur. Pelacur-pelacur ini merupakan kaki tangan untuk memperoleh informasi rahasia yang sulit didapat. Di Pontianak pelacuran ini berlokasi di Kampung Bali. Tidak sedikit para pelacur mata-mata ini yang diambil oleh para pejabat, pedagang atau para bangsawan menjadi gundik-gundiknya.

Terhadap kaum pergerakan yang anti Belanda didekati juga dengan menyediakan sejumlah dana untuk penerbitan surat kabar yang bernama Borneo Barat Bergerak (B B B). Tokoh-tokoh yang dapat didekati antara lain Gusti Sulung Lalanang, Haji Abdul Rais, Rachman dan lain-lain.

---

1) Machrur Effendi, Latar Belakang Pembunuhan Besar-besaran Oleh Jepang Terhadap Rakyat Kalimantan Barat, *Harian Kapuas*, 21 Juli 1983.

## 2. Rasionalisasi

Di bawah pimpinan Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo, Jepang melancarkan peperangan yang diberi nama Perang Asia Timur Raya. Perang ini dilancarkan dalam usahanya untuk menguasai dunia. Di daerah Kalimantan Barat Hideki Tojo bermaksud menjepangkan generasi yang berumur 15 tahun ke bawah. Untuk itu dilakukanlah pembunuhan secara besar-besaran terhadap para pemimpin, tokoh masyarakat, pengusaha, penjajah, kaum pergerakan dan lain-lain. Pembunuhan dimulai dengan menculik, menangkap, kemudian membunuhnya secara kejam.

Di daerah Kalimantan Barat penculikan dikenal dengan "sungkup" yaitu menutup kepala korban kemudian dimasukkan ke dalam karung goni untuk memulai penyiksaannya. Sedangkan pembunuhan kejam dan massal dikenal penduduk dengan istilah "Peristiwa Mandor" karena sebagian besar terror itu dilakukan di Desa Mandor, 88 km dari Kota Pontianak.<sup>2)</sup> Rentetan peristiwa ini terjadi antara tanggal 23 April 1943 sampai tanggal 18 Juni 1944. Menurut catatan korban keganasan ini sebanyak 21.073 jiwa baik yang terkubur di Mandor maupun yang tidak diketahui rimbanya.

Rasionalisasi dari tindak kekejaman yang dilakukan di luar batas perikemanusiaan itu disiarkan secara resmi dalam surat kabar *Borneo Shimbun* tanggal 1 Juli 1944 (1 Sitigatu 2604), disertai dengan daftar nama-nama yang menjadi korbannya. Rasionalisasi itu menyebutkan bahwa tindak kekerasan itu terpaksa dilakukan karena adanya komplotan besar yang akan melawan *Dai Nippon*. Komplotan itu sudah diketahui sejak lama kemudian terbongkar sampai ke akar-akarnya. Dikemukakan bahwa tiga belas perkumpulan telah dipengaruhi oleh Parindra dan Partai Komunis untuk membrontak terhadap

---

2) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Kalimantan Barat*, Jabatu, 1983, hlm. 28.

Jepang. Di samping itu dua belas "dokoh" (sultan) telah menggabungkan diri pada kaum pembontak di bawah pimpinan dokoh Pontianak.

Suatu daftar panjang melengkapi siaran resmi itu memuat nama-nama tokoh yang mengotaki gerakan itu. Di antaranya ialah J.E. Patrasiana, Syarif Muhammad Alqadrie (sultan Pontianak), Pangeran Adipati (sekretaris Kerajaan Pontianak, Muhammad Ibrahim Tsafiudin (sultan Sambas), Gusti Saunan (sultan Pontianak), dr. R. Rubini (dokter rumah sakit), Ng Nyap Liang (pengusaha), Kei Liang Ki (pengusaha), Noto Soedjono (*Suito Kakarityo*), Mohammad Taupik (dokoh Mempawah).

### 3. Tindak Kekejaman

Pada tanggal 8 Desember 1941, saat tentara Jepang menyerang Pearl Harbour, orang Jepang yang berada di daerah Kalimantan Barat telah menghilang semuanya. toko-toko, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dengan segala isinya berupa harta benda mereka tinggalkan begitu saja. Mereka tidak ingin dengan harga yang sedikit itu walaupun telah dengan susah-payah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka menginginkan yang jauh lebih banyak, menginginkan harta seluruh Kalimantan Barat menjadi miliknya. Mungkin sekali juga bahwa bertahun-tahun itu telah dialirkan harta Kalimantan Barat ke Jepang dalam jumlah yang tidak sedikit.

Tanggal 19 Desember 1941 Kota Pontianak dibumihanguskan oleh sembilan kapal terbang (pesawat tempur) Jepang (hari Jum'at sekitar pukul 12.00)<sup>3</sup>), ketika orang sedang bersembahyang Jum'at. Sasaran pemboman bukan Kantor Gubernemen, bukan pos militer, gudang senjata atau sebangsanya yang jelas telah mereka kuasai satu-persatu secara detail, tetapi justru perumahan penduduk, rumah sekolah, tempat-tempat ibadah, rumah sakit, gedung pertemuan dan lain-lain. Tentara

---

3) M. Yanis, *Op Cit*, hal. 8

Belanda boleh dikatakan tidak mampu melawan sama sekali karena tidak memiliki alat penangkis serangan udara. Lagi pula serangan itu dilakukan begitu mendadak sehingga hanya kepanikan yang terjadi sekalipun terhadap tentara yang sudah terlatih.

Asap hitam mengepul di udara membuat cuaca menjadi gelap, diiringi dengan suara yang memekakkan telinga, suara pesawat-pesawat yang menukik dan menanjak diselingi dengan dentuman-dentuman bom. Korban beribu-ribu jumlahnya, mayat berceceran bertumpang-tindih, darah mengalir membasahi tanah. Sasaran utama mungkin juga tangsi tentara di sekitar Kampung Bali. Tetapi karena kecepatan terbang bom-bom itu menysar ke Sekolah MULO RK dan Kampung Bali di sekitar gereja Katholik, kemudian menyebar maut ke mana-mana.

Tanggal 22 dan 27 Desember serangan kedua dan ketiga terjadi. Saat ini sasarannya adalah pertahanan Belanda baik di kota maupun di luar kota, terutama Sanggau Ledo dan Singkawang. Walaupun Belanda mendatangkan bala bantuan dari Jawa, namun pertahanannya tidak mampu mempertahankan kedudukannya. Tanggal 21 Januari 1942 Jepang berhasil mendaratkan pasukannya dari arah utara dan menduduki Kota-kota Pemangkat, Sambas, Singkawang, Mempawah dan Pontianak tanpa mendapat perlawanan. Empat orang pembesar Belanda yang mencoba melawan digiring dan dipancang lehernya secara demonstratif.

Kaki tangan dan mata-mata Jepang berkeliaran ke mana-mana untuk menyebar *info* dan *issue* negatif yang sangat merugikan rakyat. Kekejaman dimulai dengan penangkapan para tokoh dan pemimpin masyarakat. Para pemimpin yang ditangkap dengan jalan diculik, dibujuk, ditipu, dibujuk atau dengan terang-terangan kemudian disekap dalam kelaparan dan kehausan. Beberapa tokoh masyarakat yang mula-mula mendapat perlakuan seperti itu antara lain: Achmad Maydin,

Mohammad Syarif, Burhanuddin, The Hay Sia, The Seng Nguang dan sebagainya.<sup>4)</sup> Setelah beberapa hari disekap Achmad Maydin kemudian diarak keliling kota dengan tangan diborgol ke belakang. Teman-teman lain yang sama-sama ditangkap akhirnya dilepaskan. Tetapi sesudah peristiwa itu akhirnya Achmad Maydin tidak pernah diketahui lagi nasibnya.

Kekejaman selanjutnya ialah seperti yang terjadi pada tanggal 23 April 1943 di mana pada waktu itu tentara Jepang melakukan penangkapan secara besar-besaran yaitu terhadap 60 orang terdiri atas Sultan Muhammad sendiri dan saudara-saudara sultan di komplek istana. Penangkapan dilakukan secara terang-terangan dengan menggerebek dan menggedor pada suatu dini hari yang gelap gulita. Semua yang ditangkap diborgol tangannya dan disungkup kepalanya dengan karung goni kemudian hilang tidak diketahui lagi ke mana rimbanya. Anak-istri ditinggalkan dengan segala kesedihan yang tak berkesudahan.

Sesudah itu penangkapan-penangkapan dilakukan dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Semua yang ditangkap tidak pernah ada yang kembali lagi dan tidak pernah pula diketahui rimbanya. Istri dan putri-putri yang ditinggalkan, yang dipandang "cakep", dijadikan alat pemuas nafsu seknya secara paksa. Yang menolak dapat dibunuh atau dizinahi beramai-ramai kemudian dibunuh. Apalagi terhadap "amoy-amoy" Cina dan isteri-isteri Belanda, tindakan Jepang ini serba main comot saja.

Terhadap kaum pergerakan (*nissinkhai*) tentara Jepang ini melakukan sikap berpretensi, berpura-pura untuk membantu dan bekerjasama. Karena *info* dan *issue* dari para mata-mata, pada akhir tahun 1943 Jepang mengundang semua kaum pergerakan untuk menghadiri suatu konperensi yang diselenggarakan di Gedung Landraadweg (Jalan Jenderal Urip sekarang). Konperensi itu dihadiri oleh 500 orang utusan kaum per-

---

4) Machrus Effendi, *Op Cit.*

gerakan terdiri atas para pemuda, alim ulama, kaum wanita, sultan Sambas, para pangeran dan para panembahan di seluruh Kalimantan Barat.

Dalam konperensi itu Jepang mempergunakan wanita-wanita kaum pergerakan untuk menyelenggarakan konsumsi. Suatu tindakan yang menimbulkan marah luar biasa dari pihak Jepang terhadap kaum pergerakan ialah dimasukkannya racun-racun ke dalam minuman para opsir Jepang dengan maksud untuk membunuhnya. Walaupun maksud jahat tentara Jepang itu telah direncanakan sebelumnya, tetapi perbuatan meracuni itu telah menimbulkan kemarahan yang semakin menjadi-jadi. Gedung konperensi itu tiba-tiba saja dikepung dan disekap tidak seorang pun dapat melepaskan diri. Tamu-tamu kemudian diangkut dengan truk dibawa ke suatu tempat dan tidak pernah diketahui lagi nasibnya. Dari peristiwa itu penangkapan dan pembunuhan semakin mengganaskan. Siapa yang dipanggil atau ditangkap oleh Jepang tidak pernah kembali lagi.

Pada tanggal 21 Desember 1943 sejumlah 23 orang pemimpin pergerakan ditangkap dan dihukum mati dengan jalan disembelih. Puluhan orang lainnya mati dalam tahanan karena kekejaman dan kelaparan. Sejumlah 750 orang lainnya kemudian dibantai habis. Gerakan illegal pimpinan BJ Haga, gubernur Kalimantan, merencanakan akan melakukan pembontakan pada bulan Juni 1943 setelah pemboman tentara sekutu. Tetapi rencana itu diketahui Jepang sehingga Jepang menangkap dan menawan 275 orang yang dicurigai kemudian dimusnahkan seluruhnya. Gubernur Haga sendiri mengalami nasib yang lebih buruk.

Tindakan kekejaman dan pembantaian besar-besaran itu sebagian besar dilakukan di Desa Mandor. Setiap hari truk-truk Jepang hilir mudik sarat penumpang yang bersungkup kepalanya. Teriakan dan pekik jerit yang histeris sangat memilukan karena mereka sadar bahwa akhir hayat yang mengerikan telah menghadangnya di ujung jalan, yaitu di Desa Mandor. Itulah

Mandor, tempat pembantaian pemimpin dan tokoh-tokoh rakyat yang ingin merdeka di negerinya sendiri, sehingga peristiwanya disebut Peristiwa Mandor. Untuk mengenangnya, pemerintah daerah Kalimantan Barat telah mendirikan monumen nasional dengan nama "Makam Mandor" dan peristiwanya diperingati setiap tanggal 28 Juni.

Rakyat yang dianggap tidak berdosa, dipekerjakan sebagai romusha untuk membikin jalan antar kota, membuat lapangan udara Sungai Durian, membikin sumur-sumur rahasia di berbagai tempat. Ada pula yang dipekerjakan di pabrik-pabrik tanpa mendapat upah. Mereka menderita kecapaian, kelaparan dan serangan penyakit sehingga sebagian besar mati kelaparan atau mati karena menderita penyakit yang tak terobati. Lubang-lubang besar kecil yang mereka gali itu untuk penguburan massal termasuk bagi pembuat lubang sendiri.

Keluarga mereka yang ditinggalkan tidak terurus nasibnya. Dalam keadaan ekonomi yang serba sulit itu isteri-isteri dengan anak-anaknya harus hidup tanpa nafkah suami. Perdagangan mengalami kemacetan total, produksi dalam wilayah Kalimantan Barat sendiri sangat tidak mencukupi untuk keperluan penduduk, garam, gula, tembakau dan juga beras sulit dicari apalagi bahan pakaian. Jika bahan-bahan itu kebetulan ada, penduduk harus antri untuk mendapatkannya sekalipun hanya untuk membeli ubi (singkong).

Dalam keadaan perekonomian yang sangat sulit itu rakyat masih dibebani dengan pungutan paksa akan barang-barang berharga. Emas permata yang dimiliki oleh ibu-ibu atau para remaja putri harus diserahkan kepada Pemerintah Bala Tentara Jepang. Kalau tidak, dapat memperoleh hukuman yang cukup berat.

Terhadap kaum remaja dan anak-anak, Jepang memberikan perhatian khusus. Remaja dan anak-anak disayangi, diajar dan disekolahkan. Mereka diajar menyanyi, *taiso*, baris berbaris, perang-perangan dan berbahasa Jepang. Latihan mem-

pergunakan senjata juga diajarkan terhadap remaja. Senjata bahkan boleh dibawa pulang ke rumah remaja. Mereka ini adalah calon-calon generasi nasionalisasi Jepang, calon tentara yang akan melanjutkan perang dan pertahanan.

#### 4. Sikap Jepang Terhadap Suku Daya

Setelah Jepang berhasil melumpuhkan semangat perjuangan masyarakat kota, tiba gilirannya masyarakat daerah pedalaman harus dihadapi. Daerah pedalaman dihuni oleh suku bangsa Daya. Suku ini telah memahami betapa kejamnya tentara Jepang yang telah menyiksa dan membuat kesengsaraan bagian dari masyarakat bangsanya. Para sultan dan panembahan yang merupakan sultan dan panembahan mereka telah banyak disiksa dan dibunuh secara kejam. Benih permusuhan itu telah tertanam kuat. Maka pada gilirannya jika haluan kekejaman Jepang diarahkan pada masyarakat suku bangsa Daya, suku bangsa ini telah mengatur siasat dengan jitu.

Jepang sendiri tidak begitu waspada karena suku bangsa Daya dipandang lebih terbelakang dari masyarakat daerah pantai sehingga tentu tidak akan ada kemampuan untuk melawan Jepang. Di lain pihak tentara Jepang tidak mendengar adanya laporan bahwa suku bangsa Daya akan melakukan perlawanan. Karena itu Jepang tidak bermaksud untuk memperlakukan kekejaman seperti dilakukan terhadap masyarakat daerah pantai. Masyarakat Daya tidak perlu diganggu karena dipandang tidak membahayakan. Namun demikian kewaspadaan perlu dijaga.

Untuk menjaga keamanan usaha secara preventif perlu dilakukan agar tidak menggantung dalam lipatan. Usaha preventif itu berupa pengumpulan alat-alat senjata seperti senapan lantak, mandau, sumpit, panah, tombak, parang dan lain-lain. Tetapi imbauan ini tidak mendapat sambutan dari masyarakat karena semua senjata itu merupakan alat produksi baik di

bidang pertanian maupun dalam perburuan. Di lain pihak bidang ekonomi dirasa semakin sulit

Tindakan Jepang mulai kasar yaitu akan menindak tegas siapa saja terutama para kepala-kepala adat. Ancaman ini disambut dengan tekad bulat dari semua kepala suku yaitu membunuh atau dibunuh. Jepang harus dilawan habis-habisan dengan fisik dan taktik. Sangat dipahami betapa rakusnya tentara Jepang terhadap wanita. Tidak peduli ada suaminya atau tidak, jika Jepang menghendaki dapat main comot saja. Kelemahan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat suku bangsa Daya.

Semua tentara Jepang yang datang di perkampungan Daya selalu disuguni arak dan tuak dan wanita-wanita yang terkenal cantik-cantik dengan dada terbuka. Wanita-wanita itu sendiri harus selalu waspada dengan tugasnya. Dengan demikian tidak sedikit pemimpin-pemimpin tentara yang terjebak dan mengalami ajalnya. Kepalanya dipenggal dan disimpan sebagai pusaka.

Dalam perang gerilya, Jepang tidak pernah memetik kemenangan melawan suku bangsa Daya. Para panglima perang ini sangat menguasai medan dan pada waktu siang tidak pernah berada di rumah. Patroli Jepang selalu habis disergapnya sehingga tentara Jepang harus mengundurkan diri dari kota-kota pedalaman yang telah didudukinya. Dalam gerilya melawan Jepang ini telah bersatupadu suku-suku bangsa yang terkenal seperti Iban, Sungkung, Seribas, Kantuk, Punan, Bukat dan lain-lain. Perlu dicatat pula beberapa orang panglima suku yang gagah berani yaitu Pang Dandan, Pang Solang dan Pang-suma.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dikemukakan berikut ini dibagi dalam empat bagian yaitu bagian yang meliputi masa Kesultanan Pontianak yang mencakup masa pemerintahan kolonial Belanda, bagian yang melingkupi masa pemerintahan bala-tentara Jepang dan bagian terakhir meliputi masa pemerintahan Republik Indonesia (masa setelah kemerdekaan).

#### **1. Masa Kesultanan Pontianak**

Wilayah Kesultanan Pontianak merupakan embrio dari Kota Pontianak dan tempat asal timbulnya Kota Pontianak (kesultanan) merupakan kerajaan yang paling muda atau paling belakangan berdiri dibanding dengan kerajaan lainnya di daerah Kalimantan Barat, bahkan merupakan kerajaan termuda di Nusantara. Akan tetapi di dalam waktu yang relatif singkat (kurang dari 30 tahun sejak berdiri) Kesultanan Pontianak telah mengalami kemajuan pesat mengatasi kerajaan-kerajaan lainnya di Kalimantan Barat dan menjadi pelopor atau pemimpin kerajaan-kerajaan lainnya (panembahan dan yang di-pertuan) di daerah Kalimantan Barat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesultanan ini maju dengan pesat dalam waktu yang relatif pendek antara lain letak geografis yang

tepat dan strategis, interaksi sosial yang harmonis antara fihak Kesultanan dengan penduduk secara timbal-balik, faktor kepemimpinan positif yang dimiliki para sultan.

Penetapan dan pemilihan wilayah kesultanan tersebut sebagai lokasi Kerajaan Pontianak yang kemudian berkembang menjadi ibukota Kalimantan Barat merupakan perwujudan dari pertimbangan yang rasional para pendirinya. Ternyata pendiri kesultanan ini seorang yang ahli dalam strategis dan berjiwa maritim.

Karena para pemegang tahta kesultanan ini berorientasi ke masa depan, maka mereka menerima para imigran dari mana pun datangnya dengan tangan terbuka untuk berdomisili dan membangun Pontianak. Luas wilayah Kesultanan Pontianak dibanding dengan tipisnya jumlah penduduk, mendorong para sultan di Pontianak menganut politik pintu terbuka terhadap pendatang baru. Dengan demikian menjadikan Pontianak sebagai kota dengan penduduk yang bersifat multi etnis. Namun demikian pengaturan yang efektif dan pendekatan sosial yang tepat terhadap para pendatang ternyata dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama golongan penduduk dan antara golongan penduduk dengan para sultan dan keluarga mereka. Dari sudut ini para sultan memperoleh dukungan ketaatan dan kepatuhan dari semua golongan penduduk baik yang berada di wilayah kesultanan maupun di luar kesultanan. Ketaatan itu tidak saja diperoleh dari penduduk setempat, dan penduduk bumiputra (suku lainnya) tetapi juga dari penduduk dan tokoh-tokoh golongan Cina. Sepanjang sejarah di wilayah kesultanan ini tidak pernah terjadi pertentangan yang berarti antara sesama golongan-golongan penduduk yang bermukim di wilayah kesultanan ini dan dengan para sultan dan keluarga mereka.

Dominasi dan hegemoni yang dimiliki kesultanan ini atas kerajaan lainnya di wilayah Kalimantan Barat tidak diperoleh melalui politik kekerasan dan tindak militer tetapi lebih diper-

oleh hubungan perkawinan, persahabatan, penyebaran agama Islam, dan kelebihan dalam rasionalitas dan keahlian dalam mengelola pemerintahan dan kenegaraan. Oleh karena itu, sejarah perjalanan dan perkembangan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat, khususnya Kesultanan Pontianak tidak diisi oleh pertentangan dan peperangan sehingga konsekuensinya kesultanan ini berkembang pesat, baik dalam segi politik, ekonomi, hankamnas, sosial maupun budaya.

Dalam perkembangannya, bidang budaya memang terdapat keunikan. Dalam jangka waktu  $\pm$  200 tahun sejak berdirinya, Kesultanan Pontianak belum berhasil menciptakan budaya politik yang khas. Terbatasnya waktu ditambah dengan sifat heteroginitas penduduk yang memiliki dan membawa masing-masing budaya lokal, ternyata telah ikut mempersulit terciptanya budaya politik khas Kesultanan Pontianak. Arab dengan fokus keislamannya dan Melayu mencakup dominasi dalam melahirkan indentitas Kesultanan Pontianak, tetapi keduanya masih memerlukan cukup waktu untuk mendasari terbentuknya budaya politik umum yang khas bagi kesultanan ini. Berbeda halnya dengan kerajaan-kerajaan di Palembang, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Yogyakarta dan Jawa Barat. Tidak lahirnya budaya politik khas seperti itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kesultanan ini kurang mampu menghadapi perubahan di dalam konstelasi politik selanjutnya. Pontianak dan penduduknya pada masa-masa setelah itu seakan-akan kehilangan identitas. Pada hal ia pernah menjadi pusat pemerintahan yang cukup dominan di kawasan Kalimantan Barat dan terkenal pula di Nusantara.

Dari delapan masa pemerintahan di kesultanan ini ternyata masa pemerintahan Sultan Muhammad (sultan keenam) merupakan masa pemerintahan yang terpanjang dalam sejarah Kesultanan Pontianak. Pada masa itu Kesultanan Pontianak mengalami masa keemasan baik dalam bidang ekonomi maupun bidang sosial politik. Di dalam bidang yang terakhir ini pen-

didikan berkembang pesat. Pendidikan yang dikelola oleh kesultanan telah bersifat nasional dan populatif, sebab di dalam lembaga pendidikan tersebut terdapat integrasi antara anak-anak bangsawan dengan rakyat biasa. Sifat nasionalis pada lembaga-lembaga pendidikan Kesultanan Pontianak dimungkinkan oleh sifat populatif yang ditunjukkan sultan pada masa itu. Rakyat lebih mengenalnya sebagai Syarif Muhammad dari pada sebagai sultan.

Pada masa itu Sultan Muhammad menjadi salah seorang pelopor gerakan menentang Pemerintah Jepang. Kematian sultan sebagai korban Jepang tidak menyebabkan runtuh dan mundurnya kesultanan, tetapi justru secara politis kesultanan ini menjadi lebih dikenal baik di Nusantara maupun di luar negeri. Jadi di sini ada hubungan yang erat antara peningkatan ekonomi suatu negara dengan popularitas negara tersebut baik ke dalam maupun ke luar.

## **2. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda**

Belanda memperkuat kedudukannya dengan bermacam-macam perjanjian dengan beberapa sultan Pontianak. Selain itu mereka juga melancarkan politik adu domba terhadap sesama sultan dan antara Kesultanan Pontianak dengan kerajaannya di daerah Kalimantan Barat. Tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> yang mereka terima dari Kesultanan Pontianak sebagai pusat perkantoran merupakan awal dari perluasan kekuasaan kolonial Belanda di daerah ini. Dari sini dapat diketahui bahwa keramahtamahan pihak kesultanan yang diwujudkan dengan pemberian sebidang tanah justru dibalas dengan tindakan yang memperluas kekuasaan mereka, memperlemah sendi kehidupan rakyat dan kekuasaan kesultanan. Ternyata pola umum penjajahan Belanda di Indonesia pada dasarnya sama yaitu memecah-belah dan menguasai. Persetujuan pihak kesultanan terhadap perjanjian yang disodorkan Pemerintah Kolonial Belanda bukanlah merupakan kelemahan tetapi justru suatu

politik bertahan dan mencari kelengahan lawan. Hal itu disebabkan tidak mungkin pihak kesultanan menolak dengan kekerasan terhadap apa yang disodorkan pihak kolonial tanpa memiliki persenjataan yang cukup.

Dalam keadaan terjepit seperti itu Kesultanan Pontianak tetap berhasil mendekati beberapa kerajaan di daerah Kalimantan Barat. Hubungan intim dengan golongan etnis tertentu, seperti kelompok suku Daya, Bugis, Banjar, Madura, Arab, Jawa, Sunda, Ambon, Minangkabau, dan Melayu tetap terselenggara dengan baik. Melihat kenyataan ini Pemerintah Kolonial Belanda merasa terancam. Mereka mendekati golongan Cina, khususnya pedagang dan pengusaha. Beberapa hak-hak istimewa dan fasilitas diberikan kepada golongan ini dengan harapan dapat dijadikan saingan golongan "bumiputra" lainnya. Dominasi golongan ini di dalam bidang ekonomi, khususnya sektor perdagangan, produksi dan pemasaran di daerah ini tidak terlepas dari politik kolonial Belanda terhadap usaha menguasai sebagian terbesar golongan masyarakat dan Kesultanan Pontianak.

Usaha Belanda ternyata tidak seluruhnya berhasil, karena hubungan Pemerintah Kolonial Belanda dengan golongan Cina tidak seluruhnya mulus, terutama dengan golongan Cina yang berada di luar Kota Pontianak. Pembontakan demi pembontakan yang dilakukan golongan tersebut terhadap Belanda membuktikan itu. Di lain pihak ketaatan dan kesetiaan golongan ini, khususnya mereka yang membrontak terhadap Belanda tetap tidak tergoyahkan. Rasa benci dan pembontakan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda semakin bertambah. Ternyata politik adu domba Belanda tidak seluruhnya berhasil. Bahkan untuk beberapa hal politik itu justru pada akhirnya menjadi bumerang bagi Belanda sendiri. Di lain pihak ketaatan dan kesetiaan beberapa kelompok golongan Cina tertentu terhadap kesultanan merupakan bukti kesultanan ini mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat. Kharismanya menyentuh tidak hanya terhadap golongan bumiputra tetapi juga terhadap golongan non-bumiputra.

Perjanjian yang berlanjut antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan pihak kesultanan yang telah terlaksana sejak tahun 1772 menimbulkan berbagai reaksi di kalangan kesultanan sendiri. Lahirnya Kampung Luar dengan kraton kecil secara populer disebut "balai" membuktikan bahwa reaksi tersebut tidak pernah padam. Ada dua hal yang dapat dipelajari dari adanya balai sebagai pemerintahan tandingan bagi Kesultanan Pontianak. Pertama ia merupakan perwujudan dari keberhasilan politik pecah belah Pemerintah Kolonial Belanda. Kedua, "balai" di Kampung Luar merupakan perwujudan dari sikap dan tindakan beberapa keluarga kesultanan yang anti penjajahan dalam segala bentuknya. Sikap dan tindakan itu dilaksanakan secara konsekuen sampai masa kemerdekaan. Lahirnya Kampung Luar sebagai tandingan pemerintahan pusat yang terletak di Kampung Dalam dapat juga dilihat dari segi politis dan sosiologis. Dari segi pertama lahirnya "balai" dan "Kampung Luar" merupakan suatu strategi menyusun kekuatan untuk menyerang kembali dan mengembalikan kekuasaan pusat yang independen seperti semula. Di lain pihak tindakan politis seperti ini akan menarik kembali simpati, dukungan dan kesetiaan seluruh rakyat terhadap kesultanan. Dari segi sosiologis, lahirnya "balai" dan "Kampung Luar" merupakan sebagian perwujudan dari sikap budaya Melayu lokal yang kurang memiliki ambisi, merasa terasing, senang "mengalah" cenderung "lari" dari setiap kompetisi sosial yang dianggap mengancam keutuhan hubungan sosial, dan menghindari dari setiap konflik yang menyangkut perebutan status sosial. Budaya lokal seperti ini merupakan makanan empuk bagi setiap unsur yang ingin menguasai.

Menghadapi rasa benci dan perlawanan rakyat di sana-sini, Pemerintah Kolonial Belanda mengubah taktiknya dengan pendekatan yang lebih bersahabat. Sejalan pula dengan politik etisnya di seluruh Nusantara Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan beberapa lembaga pendidikan dan mendorong perkembangan perdagangan, perhubungan dan pertanian. Walau-

pun pada kenyataannya politik tersebut menguntungkan pihak Belanda, tetapi meningkatnya pendidikan dan berkembangnya bidang ekonomi dirasakan pula oleh rakyat. Pada masa itu rakyat menyebutnya masa "normal" karena rakyat dapat merasakan kehidupan sebelum dan sesudahnya di dalam belenggu penjajahan. Dari segi ini, dapat dilihat bahwa rakyat banyak sebagai orang awam lebih mendambakan dan memikirkan kehidupan layak dan lebih baik dibanding memikirkan sistem politik yang mana yang lebih baik untuk dipakai keinginan yang sederhana ini ternyata memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kolonial Belanda. dan Belanda dapat memanfaatkan kesederhanaan cara berpikir orang awam dalam membentuk opini umum terhadap pemerintahannya di daerah ini.

### **3. Masa Pemerintahan Balatentara Jepang**

Zaman keemasan yang dicapai di daerah ini lewat masuknya misi damai Abdurakhman dan penerusnya dengan tugas agama, budaya, dan kemanusiaan, ditambah lagi dengan opini rakyat terhadap Belanda yang mampu menciptakan zaman "normal" ternyata telah dihancurkan oleh tentara pendudukan Jepang.

Dengan slogan "saudara tua" balatentara Jepang pada mulanya menimbulkan harapan bagi para pemimpin rakyat daerah itu untuk membebaskan daerah mereka dari segala penguasaan asing. Akan tetapi kenyataannya lain, Jepang justru menghancurkan segala sendi kehidupan sosial budaya daerah ini. Ekonomi perang yang diciptakan Jepang dalam mendukung gerakannya terhadap sekutu di satu pihak memang menciptakan semangat berswadaya, swakarya dan swasembada, di lain pihak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi penduduk menjadi hancur. Pada masa ini seluruh lapisan masyarakat mengalami penderitaan lahir batin.

Tindakan balatentara Jepang itu didasarkan rasa benci dan iri kepada pihak kesultanan yang telah dianggap memberi-

kan tempat yang cukup baik kepada Pemerintah Kolonial Belanda, golongan Cina dan golongan penduduk bumiputra lainnya untuk berusaha dengan berhasil di daerah ini. Ternyata keberhasilan kesultanan membina persatuan di daerah ini (oleh pihak kesultanan dan pemimpin masyarakat lainnya) dibayar mahal dengan puluhan ribu penduduk termasuk sejumlah anggota keluarga kesultanan dan pemimpin masyarakat. Akibat pembunuhan itu, rakyat di daerah ini kehilangan satu generasi pemimpin. Sejak saat itu daerah ini mengalami kemunduran total dan kehilangan pegangan dalam membangun daerah mereka. Balatentara Jepang berusaha menjepangkan daerah ini dalam usahanya mempertahankan supremasinya di dalam Perang Asia Timur Raya. Di lain pihak mereka telah pula berusaha menghilangkan identitas daerah ini sebagai daerah yang tidak terpisah dengan daerah Nusantara lainnya. Ketimpangan dan kevakuman akibat kehilangan satu generasi pemimpin dan kekaburan identitas masih dirasakan sampai sekarang ini di Kalimantan Barat pada umumnya dan Pontianak pada khususnya.

Sejak saat itu rakyat di daerah ini seolah-olah hidup sendiri dan berjuang sendiri. Keadaan ini justru membentuk budaya lokal yang baru yang tidak berorientasi ke atas dan tidak tergantung pada pemimpin tetapi sebaliknya cepat lari dan pasrah dengan cara dan teknik apa pun yang dijalankan oleh pemimpin di atas mereka. Keadaan seperti ini menimbulkan anggapan bahwa partisipasi masyarakat di Pontianak adalah partisipasi yang pasip. Mereka lebih menampilkan diri mereka sebagai pribadi yang pernah terasing di tempat mereka sendiri.

Sikap mereka seperti itu cenderung menimbulkan anggapan dari sementara orang sebagai sikap yang "tidak disiplin" dan "merusak disiplin nasional". Akan tetapi di lain pihak balatentara Jepang mengajarkan kepada mereka secara tidak langsung suatu sikap yang tidak mentolerir penderitaan dan tidak harus menyenangkan kesusahan hidup, karena Jepang

telah menciptakan "kehidupan neraka" bagi mereka hanya dalam jangka waktu lebih kurang 3 tahun. Dalam perkembangan berikutnya ada kesan bahwa budaya lokal yang dianut penduduk daerah ini adalah budaya yang tidak tahan menderita, tidak ulet dan berorientasi ke masa lampau. Akan tetapi dari segi lain pengalaman hidup bersama Jepang telah mengajar mereka untuk menghilangkan unsur feodalisme dan tidak mendewakan pemimpin.

#### 4. Masa Kemerdekaan

Keadaan yang lebih baik yang selalu didambakan di alam kemerdekaan tidak segera dapat dirasakan oleh rakyat di daerah ini, karena daerah ini mengalami kevakuman dalam sektor pemerintahan. Kekosongan itu terjadi sejak masa penyerahan Jepang tanggal 15 Agustus 1945 sampai dikeluarkannya keputusan menteri dalam negeri tanggal 8 September 1951. Jadi selama masa itu roda pemerintahan di Pontianak dan sekitarnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kevakuman dalam pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas disebabkan oleh masa transisi antara masa pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) sebagai wilayah yang berdiri sendiri dan masa peleburannya ke dalam pemerintahan RIS. Sebelum peleburannya ke dalam RIS tahun 1950, secara *de facto* Pemerintah DIKB itu tidak berfungsi sebagai ibukota Kalimantan Barat: Pontianak sangat merasakan adanya kekosongan itu.

Kekosongan dalam sektor pemerintahan menimbulkan pengaruh negatif terhdap sektor-sektor lain seperti sektor perdagangan, pendidikan, kepemimpinan, produksi, sosial budaya dan sektor-sektor lainnya. Dengan belum efektifnya pemerintahan pada periode tersebut, menyebabkan segala kegiatan pada sektor-sektor di atas tidak dapat diarahkan dan diorganisasi secara lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Tidak sebandingnya luas wilayah dengan jumlah penduduk membawa kesulitan pula bagi usaha-usaha pembangunan dalam periode ini. Sehubungan dengan itu usaha transmigrasi yang pernah dirintis oleh Pemerintah Kolonial Belanda digalakkan lagi oleh Pemerintah RI. Kebijakan penduduk ternyata merupakan satu dari beberapa kebijaksanaan pokok yang dilaksanakan dalam membangun daerah ini. Para pendatang baru yang datang ke daerah ini bukan hanya melalui kebijaksanaan transmigrasi tetapi juga melalui berbagai macam jalan seperti transmigrasi spontan, kedatangan melalui keluarga dan imigran dari Cina dan Taiwan juga masih tetap tertarik pada daerah ini. Kedatangan mereka sebagai tenaga kerja dapat dirasakan segi positifnya dalam pembangunan, tetapi di lain pihak penduduk daerah ini menjadi heterogen dan bersifat multi etnik. Belum berjalannya pemerintahan secara efektif ternyata menimbulkan berbagai macam kesulitan dalam segi interaksi sosial antara anggota kelompok penduduk yang satu dengan anggota kelompok yang lain. Konflik non-fisik dan fisik sering terjadi terutama antara sesama penduduk pendatang dan antara mereka dengan golongan Cina. Dalam keadaan demikian faktor keamanan tidak terjamin dan akhirnya menimbulkan kesulitan pula dalam sektor-sektor lain.

Kehilangan satu generasi pemimpin merupakan pula sebab lain dari kurang lancarnya pembangunan di daerah ini, khususnya dalam kurun waktu 1945 - 1950. Pemimpin pemerintahan dan pemimpin masyarakat lainnya setelah itu kebanyakan datang dari Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Jadi heterogenitas dalam kependudukan dan unsur kepemimpinan merupakan satu ciri khas daerah ini sebagai hasil dari proses sejarah. Dengan demikian pendekatan tertentu terhadap pembangunan yang dilaksanakan di daerah lain akan sulit diterapkan di daerah ini.

Hubungan dagang yang telah lancar antara daerah ini dengan negara tetangga yang telah dirintis sejak zaman keemasan Kesultanan Pontianak, ditambah dengan letak geografis yang

strategis, menjadikan daerah ini cukup maju dalam perdagangan impor dan ekspor terutama dengan Singapura, Semenanjung Malaka, Serawak, Kuching, Brunai, Vietnam dan Kamboja. Volume perdagangan dalam sektor ini terus meningkat. Peningkatan ini menyebabkan meningkatnya volume transportasi, khususnya melalui laut.

Namun demikian kemajuan dalam segi perdagangan impor interinsuler ini tidak diimbangi sektor pendidikan. Gambaran pendidikan di daerah ini sampai dengan tahun 1950 masih suram. Satu-satunya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah ini baru lahir pada tahun 1951. Gambaran yang suram ini menimbulkan dilemma dalam usaha regenerasi di masa mendatang. Pemimpin lokal yang berbobot sulit timbul dalam waktu yang relatif pendek untuk menggantikan pemimpin tua.

Begitu pula tenaga kerja lokal yang terdidik sukar dihasilkan karena kurangnya sarana pendidikan. Dalam keadaan seperti ini pelaksanaan pembangunan di daerah ini tidak lancar. Di lain pihak dampak negatif dari kurangnya sarana pendidikan akan menimbulkan hambatan pula bagi pembangunan itu sendiri, misalnya keterbelakangan, irrasionalita, tradisionalisme, pengangguran, proses kemiskinan yang laten, dan hambatan sosial lainnya yang bersifat struktural dan mental.

## DAFTAR BACAAN

- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978.
- Ansar Rachman, "Perjuangan Menegakkan Proklamasi Kemerdekaan Di Kalimantan Barat" di dalam *Harian Kapuas*, tanggal 10 dan 11 Agustus 1983.
- Angkatan Darat Kodam XII Tanjungpura, *Petunjuk Teritorial Daerah Kalimantan Barat*, SUDAM XII Tanjungpura, Pontianak, 1972.
- Direktorat Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (DP3M) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen P dan K, *Bahan Seminar Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Bagi Peneliti Muda Departemen P dan K Ditjen Pendidikan Tinggi*, Jakarta/Solo, 1982.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistim Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Kalimantan Barat*, Jakarta, 1983.
- J.U. Lontan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, offset Bumi Restu, Jakarta/Pemda Tingkat I Kalbar, Pontianak, 1975.
- Kantor Sensus dan Statistik Kodya Pontianak, *Pengembangan Penduduk Kotamadya Pontianak dari tahun 1900 s/d 1950*, belum diterbitkan, Pontianak, 1972.

- Kadariusman, *Masalah Cina*, Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, Pontianak, 1969.
- Kadariusno, *Kalimantan Barat Membangun*, Memori sebagai Gubernur KDH Tingkat I Kalbar 1972-1977, Mandau Dharma, Pontianak, 1977.
- Mubyarto, *Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Daerah dan Pembangunan Pertanian*, Himpunan Kertas (1965-1969) Biro Penelitian Ekonomi, F.E. UGM, Yogyakarta, 1969.
- Mosher T. Arthur, *Getting Agriculture Moving*, a special edition, Pyramid books, New York, 1970.
- M. Yanis, *Kapal Terbang Sembilan*, Yayasan Panca Bhakti, Pontianak, 1983.
- Machrus Effendi, "*Latar Belakang Pembunuhan Besar-Besaran oleh Jepang Terhadap Rakyat Kalimantan Barat*" di dalam *Harian Kapuas*, terbitan 21 Juli 1983.
- Noerdin Dja'in, *Petunjuk Teritorial Daerah Kalimantan Barat*, SUDAM XII Tanjungpura, Pontianak, 1972.
- Pemda Tingkat II Kodya Pontianak, *200 Tahun Kotamadya Pontianak*, Mandau Dharma, Pontianak, 1971.
- Proyek IDKD, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K, *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Barat*, Proyek IDKD, Pontianak, 1980/1981.
- Pemda Tingkat I Kalimantan Barat, *Sejarah Singkat Perkembangan Propinsi Dati I Kalbar 1957-1977*. Pontianak, 1964.
- Sayyid Hamid Husien Alk, *Sejarah Alhabib Husin* (disunting dari bahasa Arab), belum diterbitkan, Pontianak, 1970.
- S. Kresnadi, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, CV. Jasa Guna, Jakarta, 1965.
- Syarif Ibrahim Alqadrie. *Kepemimpinan Kesultanan Pontianak*, Suatu Tinjauan Historis Sosiologis, Fakultas Sospol Untan, Pontianak, 1972.

-----, dan AB Tangdililing, *Sejarah Kerajaan Pontianak dan Perkembangan Kota Pontianak*, DP3M Ditjen Pend. Tinggi Departemen P dan K/Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1980.

Sumadi, *Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara*, Yayasan Tanjungpura, Pontianak, 1973.





